



Pemerintah
Kabupaten Tebo



LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TEBO
TAHUN 2025



LKPJ BUPATI TEBO 2025





KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Akhir Tahun Anggaran 2025, merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang tahun 2025, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 juga merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tebo di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Akhir Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan dalam pasal 71 ayat (2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tebo para tokoh



masyarakat dan tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tebo yang penuh ikhlas disertai kesadaran tinggi telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Tebo.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi seluruh upaya dan kinerja yang dilakukan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI TEBO,



AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	2
1.2 SISTEMATIKA PENULISAN	5
1.3 VISI DAN MISI	6
a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	8
b. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	8
1.4 DATA UMUM DAERAH	10
1. Kondisi Geografis Daerah	10
2. Kondisi Demografis	20
3. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	23
4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025	41
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	31
A PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	31
1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	32
2. Perubahan Kebijakan Dasar Belanja Daerah	37
3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	10
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	71
A CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	71
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	87
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	300
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PADA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEBO TAHUN ANGGARAN 2024	304
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	323
BAB V PENUTUP	336

DAFTAR TABEL

BAB I	TABEL 1.1	Desa dan Kelurahan Perkecamatan dalam Kabupaten Tebo Tahun 2025	11
	TABEL 1.2	Luas Wilayah Kabupaten Tebo Menurut Kecamatan Tahun 2025	12
	TABEL 1.3	Kondisi Geologi Kabupaten Tebo 2025	14
	TABEL 1.4	Luasan Wilayah Menurut Jenis Tanah dan Kecamatan di Kabupaten Tebo	15
	TABEL 1.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2025	20
	TABEL 1.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Tebo tahun 2025	21
	TABEL 1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Tebo tahun 2023-2025	21
	TABEL 1.8	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaeten tebo tahun 2025	22
	TABEL 1.9	PNS dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tebo Tahun 2025	23
	TABEL 1.10	PNS Berdasarkan Jenis Jabatan di Kabupaten Tebo Tahun 2025	24
	TABEL 1.11	PNS Berdasarkan Golongan di Kabupaten Tebo Tahun 2025	24
	TABEL 1.12	PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tebo Tahun 2025	25
	TABEL 1.13	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025	26
	TABEL 1.14	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	27
	TABEL 1.15	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Tahun 2025	28
	TABEL 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025	29
	TABEL 1.17	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025	30
BAB II	TABEL 2.1	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025	35
	TABEL 2.2	Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025	38
	TABEL 2.3	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025	42
	TABEL 2.4	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	43
BAB III	TABEL 3.1	Skala Pengukuran Ordinal	72
	TABEL 3.2	Pengukuran Indikator Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025	72
	TABEL 3.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi Tahun 2025	73
	TABEL 3.4	Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo 2023-2025	75
	TABEL 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2023–Agustus 2025	76
	TABEL 3.6	Indeks Gini Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2024	78
	TABEL 3.7	Produk Domestik Regionla Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2021-2025	79
	TABEL 3.8	Produk Domestik Regionla Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2021-2025	80
	TABEL 3.9	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	81
	TABEL 3.10	Ringkasan Laporan Realisasi Anggran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah	87
	TABEL 3.11	Realisasi Anggaran Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2025	89
	TABEL 3.12	Realisasi Anggaran Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2025	142
	TABEL 3.13	Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2025	196
	TABEL 3.14	Realisasi Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025	208

	TABEL 3.15	Realisasi Anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintrahan Tahun Anggaran 2025	220
	TABEL 3.16	Realisasi Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025	238
	TABEL 3.17	Realisasi Anggaran Unsur Kewilayahan Tahun Anggaran 2025	243
	TABEL 3.18	Realisasi Anggaran Unsur Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2025	293
	TABEL 3.19	Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2025	300
	TABEL 3.20	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan DPRD Kabupaten Tebo Nomor 100.3.7.1/11/Hkm/2024 dan 170/02/DPRD/2024	305
BAB IV	TABEL 4.1	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2025	326
	TABEL 4.2	Alokasi Anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2025	329



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban Konstitusional Kepala Daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 71 ayat (2) ditegaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Tahun 2025 disampaikan oleh Bupati Tebo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, berisi tentang capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana



ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. LKPJ Bupati Tebo Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang memiliki Dasar Hukum, Visi, Misi, Data Umum Daerah, Strategi dan Arah kebijakan Daerah, serta Prioritas Pembangunan Daerah.

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

- 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 2);

- 
18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 22);
 20. Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 18);

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tebo Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/659/OTDA Tanggal 20 Februari 2026 Hal Penyampaian LKPJ Kepala daerah dan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Dasar Hukum (menjelaskan Undang-undang tentang pembentukan daerah), Visi dan Misi kepala Daerah, Data Umum Daerah yang memuat Informasi Profil daerah secara umum yang meliputi; Data Geografis Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Jumlah PNS, Realisasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan; Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan Realisasi pembiayaan menurut Jenis belanja.



BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat; capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran, analisis kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Memuat tentang Urusan Pemerintahan melalui Tugas Pembantuan serta Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian.

BAB V PENUTUP

1.3 VISI DAN MISI

Tahun 2025 dalam perspektif perencanaan pembangunan nasional dan daerah menandai tahapan penting dalam transisi menuju visi Indonesia Emas 2045. Di tingkat nasional, Tahun 2025 menjadi tahun awal implementasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, yang fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM,



dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di tingkat daerah, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 akan menyelaraskan dengan RPD tahun 2023-2026 dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045, serta berpedoman pada RPJMN 2025-2029.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, tahun 2025 menjadi titik awal dimulainya pelaksanaan pembangunan jangka menengah untuk mencapai Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*, yang keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Pasca dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, untuk memastikan terlaksananya visi dan misi kepala daerah terpilih serta mensinergikan dengan Program Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Edaran tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat Edaran tersebut ditekankan bahwa Pemerintah daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih serta program asta cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan arah kebijakan tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
- 2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- 3) Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
- 4) Pengendalian dan inflasi di daerah
- 5) Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah
- 6) Dukungan swasembada Pangan; dan
- 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

Sejalan dengan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tebo Periode 2025-2029 terpilih memiliki visi ***Terwujudnya Kabupaten Tebo yang cerdas, Sehat dan Sejahtera***. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 5 (lima) misi yang telah dirumuskan yakni :

- 1) Mewujudkan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik

- 
- 4) Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
 - 5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka mencapai visi serta menjalankan misi yang telah dirumuskan tersebut, ada 11 (sebelas) program prioritas yang diharapkan menjadi daya ungkit utama pencapaian visi yakni pada fokus pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program prioritas ini merupakan agenda strategis serta sebagai kerangka program janji politik kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih yang pada Tahun 2025 ini sudah mulai untuk dilaksanakan secara bertahap tentunya dengan melihat ketersediaan alokasi pendanaan. Kesebelas program prioritas tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi, serta tenaga pendidik
- 2) Bantuan operasional ke pondok pesantren dan madrasah
- 3) Kesehatan gratis (UHC 100%) dan layanan kesehatan untuk semua (*Health for All*)
- 4) Dokter masuk dusun Menyediakan Balai Latihan Kerja / BLK terpadu
- 5) Insentif guru ngaji/TPQ dan tenaga kesehatan daerah terpencil
- 6) Infrastruktur jalan, irigasi, pertanian, sarana olahraga dan sekretariat lembaga kecamatan
- 7) Membuka Kawasan siap bangun, RTH dan penataan ibukota kecamatan
- 8) Menyediakan Balai Latihan Kerja/BLK terpadu
- 9) Ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ramah lingkungan
- 10) Layanan perijinan dan kependudukan berbasis web dan mobile dengan moto sijempol (sistim perijinan jemput bola)
- 11) Peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat desa



Mengacu pada arahan prioritas pemerintah pusat, visi-misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka dapat dilihat bahwa arah kebijakan pembangunan prioritas pembangunan pada tahun ketiga RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 masih relevan dengan arahan pemerintah pusat serta dapat mengakomodir visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di samping itu, secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 DATA UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Tebo baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tebo.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tebo akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Tebo merupakan satu di antara kabupaten di dalam wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah Kabupaten Tebo hingga akhir Tahun 2021 terdiri dari 12 Kecamatan, 107 desa dan 5 kelurahan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Kode Desa terjadi penambahan 15 Desa Pemekaran dan 2 kelurahan hasil pemekaran sehingga Kabupaten Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 122 desa, dan 7 kelurahan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Desa dan Kelurahan Perkecamatan
dalam Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Tebo Ilir	11	1
2	Muara Tabir	8	-
3	Tebo Tengah	10	2
4	Sumay	12	-
5	Tengah Ilir	6	-
6	Rimbo Bujang	13	3
7	Rimbo Ulu	12	-
8	Rimbo Ilir	10	-
9	Tebo Ulu	16	1
10	VII Koto	10	-
11	Serai Serumpun	8	-
12	VII Koto Ilir	6	-
Jumlah		122	7

Sumber :BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2025

Kabupaten Tebo memiliki luas wilayah 610.373 Ha (6.103,73 km²) atau 11,45% dari luas Provinsi Jambi. Wilayah kecamatan terluas adalah Sumay yakni 1.268 Km² atau 19.63% dari luas Kabupaten Tebo dan yang wilayah paling kecil adalah Kecamatan Rimbo Ilir dengan luas 214.34 Km² atau 3.32% dari luas Kabupaten Tebo, untuk lebih jelas rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

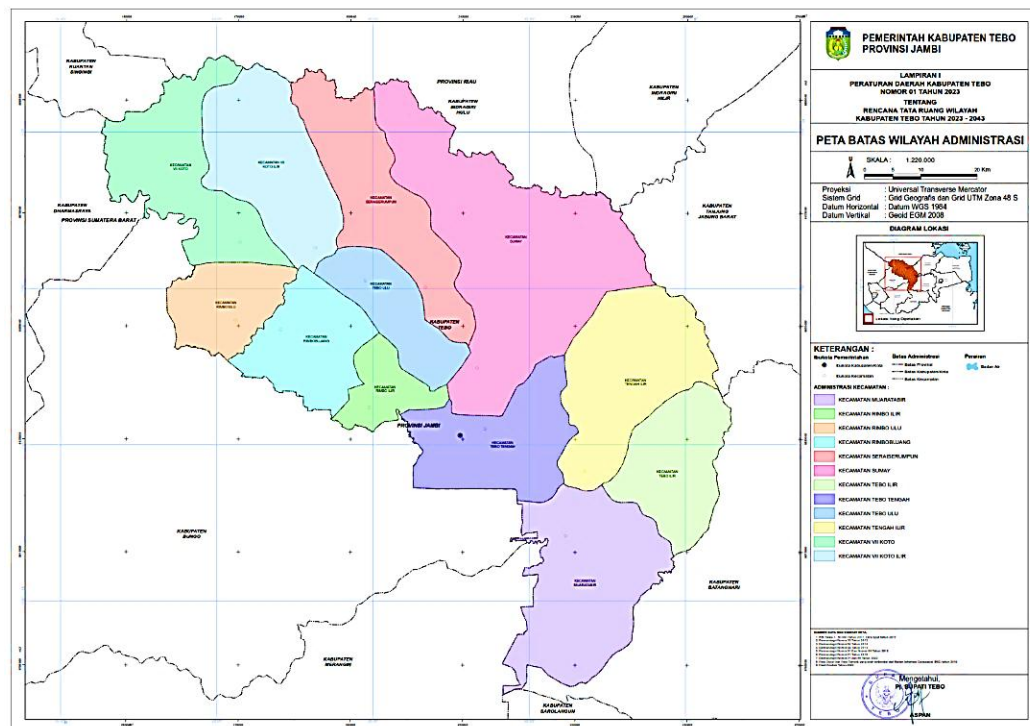
Tabel 1.2
Luas Wilayah Kabupaten Tebo
Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas	
			Ha	%
1	Muara Tabir	Pintas Tuo	68.018	11,14
2	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	39.875	6,53
3	Rimbo Ilir	Karang Dadi	17.222	2,82
4	Tebo Ulu	Pulau Temiang	28.87	4,73
5	Tebo Tengah	Muara Tebo	45.935	7,53
6	Sumay	Teluk Singkawang	121.506	19,91
7	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	55.243	9,05
8	Rimbo Bujang	Wirotho Agung	37.07	6,07
9	VII Koto Ilir	Balai Rajo	55.049	9,02
10	VII Koto	Sungai Abang	52.981	8,68
11	Rimbo Ulu	Suka Damai	27.484	4,50
12	Tengah Ilir	Mengupeh	61.12	10,01
Jumlah			610.373	100,00

Sumber :Permendagri tentang batas daerah dan BPS Tebo Dalam Angka, 2025

Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Tebo memiliki batas-batas dengan rincian sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo;
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.



Sumber: Pemerintah Kabupaten Tebo, 2025

b. Kondisi geografis

Secara astronomis, Kabupaten Tebo terletak pada posisi $0^{\circ}52'32''$ - $1^{\circ}54'50''$ LS (Lintang Selatan) dan diantara $101^{\circ}48'57''$ - $102^{\circ}49'17''$ BT (Bujur Timur). Kabupaten Tebo memiliki iklim tropis, dimana 84,96 persen daerahnya berada pada ketinggian <99 m dari permukaan laut.

c. Topografi

Kabupaten Tebo merupakan dataran rendah, sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Daerah rawa terdapat di sepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir dan Batang Sumay. Panjang sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kabupaten Tebo adalah Sungai Batanghari 300 Km, Sungai Batang Tebo 29 Km, Sungai Batang Tabir 52 Km, Sungai Batang Sumay 70 Km, Sungai Batang Langsiris 23 Km dan Sungai



Batang Jujuhan 7 Km. Berdasarkan ketinggian Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian <50 M di Kecamatan Tebo Ilir, dataran rendah dengan ketinggian 50–100 meter di Kecamatan Tebo Tengah dan Rimbo Bujang. Daerah dataran tinggi dengan ketinggian sedang diantara 100–1000 meter di Kecamatan Sumay.

d. Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Tebo relatif kompleks, meliputi peristiwa tektonik dari karbon dan resen. Unsur struktur utama batuan adalah lipatan termasuk belahan dan sesar. Batuan Pra Tersier memperlihatkan pelipatan dan belahan berulang-ulang. Penempatan belahan dalam batuan Pra Tersier menunjukkan pola komplek dimana corak umum sejarah tektonik Kabupaten Tebo yaitu belahan utama mempunyai arah Timur-Barat dengan kemiringan ke Utara dan Selatan menunjukkan belahan tersebut telah berlipat sekitar lipatan tegak yang berarah Timur-Barat. Formasi batuan di Kabupaten Tebo secara stratigrafi dari berumur tua kemuda adalah Granit, Formasi Gangsal, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Gumai, Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, Undak Sungai dan Alluvial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kondisi Geologi Kabupaten Tebo 2025

Formasi Geologi	Luas (Ha)	Formasi Geologi	Luas (Ha)
Alluvium	78.346,26	Formasi Lakat	2.382,40
Anggota Atas	66.909,64	Formasi Muara Enim	110.001,02
Anggota BatuGamping	11.963,27	Formasi Pengabuhan	2.602,46
Anggota Bawah	5.612,40	Formasi Talangakar	12.073,50
Anggota Bawah Formasi Telisa	5.319,00	Formasi Tualang	378,00
Diorit	212,68	Granit	7.266,55
Formasi Air Benakat	44.513,44	Granodiorit	12,46
Formasi Gangsal	27.097,72	Kipas Aluvium	90,23
Formasi Gumai	16.904,76	Lava	1,56
Formasi Kasai	162.909,28	Oligo-Miocene Volcanic Rock	228,75
Formasi Kelesa	150,12	Sedimen Jura	87,49
Formasi Lahat	7.888,65	Undifferentiated Volcanic Breccia	25.286,32

Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Tebo, 2025

Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup baik dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk pengembangan usaha pertanian. Di daerah ini terdapat empat jenis tanah, yakni jenis Tanah Podzolik merupakan yang terbesar yaitu 438.000 Ha (67,79%), selanjutnya adalah Latosol 204.600 Ha (31,67%), Aluvial 2.200 Ha (0,34%) dan Organosol 1.300 Ha (0,20%). Dilihat dari jenis tanah Kabupaten Tebo memiliki jenis tanah yang tidak terlalu bervariasi. Jenis tanah ini juga tidak sama di setiap kecamatan, yang memiliki tiga jenis tanah hanya Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Tebo Ulu, selebihnya memiliki paling banyak dua jenis tanah. Kondisi demikian mempermudah perencanaan pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan jenis tanahnya seperti kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan.

Jenis tanah latosol terdapat hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Muara Tabir. Sedangkan jenis tanah Organosol tidak terdapat di kecamatan Tengah Ilir, VII Koto Ilir, Serai Serumpun dan Muara Tabir. Jenis tanah Alluvial terdapat di kecamatan Tebo Tengah, Sumay, Tebo Ulu, VII Koto, Rimbo Bujang dan Rimbo Ilir. Untuk penyebaran jenis tanah di Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabe 1.4
Luasan Wilayah Menurut Jenis Tanah dan Kecamatan
di Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		PMK	Latosol	Alluvial	Organosol	
1	Tebo Tengah	80.789	3.537	13.747	283	98.356
2	Tebo Ilir	32.246	24.096	-	14.528	70.870
3	Sumay	56.566	49.991	6.722	13.521	126.800
4	Tebo Ulu	34.920	819	2.035	3.256	41.030
5	VII Koto	44.301	18.828	2.350	400	65.879
6	Rimbo Bujang	32.563	2.641	3.252	2.236	40.692
7	Rimbo Ilir	20.944	220	152	118	21.434
8	Rimbo Ulu	26.900	650	-	2.024	29.574
9	Tengah Ilir	12.456	9.688	-	-	22.144
10	VII Koto Ilir	26.358	18.114	2.349	-	46.821
11	Serai Serumpun	18.981	12.589	-	-	31.570
12	Muara Tabir	50.930	-	-	-	50.930
Jumlah		437.954	141.173	-	36.366	646.100
% Kabupaten		67,78	21,85	4,74	5,63	100,00

Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Tebo, 2025



e. Hidrologi

Ditinjau dari kondisi hidrologi Kabupaten Tebo memiliki banyak sungai yang melewati sebagian besar wilayahnya. Panjang sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kabupaten Tebo adalah Sungai Batang Hari 300 Km, Sungai Batang Tebo 29 Km, Sungai Batang Tabir 52 Km, Sungai Batang Sumay 70 Km, Sungai Batang Langsisip 23Km dan Sungai Batang Jujuhan 7 Km.

f. Klimatologi

Iklim Kabupaten Tebo secara umum iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara bulan September sampai bulan Mei dan musim kemarau antara bulan Juni sampai Agustus, sedangkan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.683 mm per tahun dengan rata-rata hari hujan 122 hari/tahun. Perbedaan temperatur antara daerah terendah dan tertinggi berkisar antara 0°C- 0,5°C dengan temperatur rata-rata 29°C-30°C.

Kelembaban udara di Kabupaten Tebo rata-rata tahunan berkisar antara 85,2 persen -96,1 persen dengan kelembaban rata-rata 87,92 persen. Adapun lamanya penyinaran matahari, umumnya dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, relief daerah dan waktu penyinaran serta pengaruh tumbuh-tumbuhan pada suatu daerah. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari tiap hari di Kabupaten Tebo selama 9 tahun bervariasi antara 4,20 jam sampai dengan 6,56 jam. Pada tahun 2018 ini, curah hujan Kabupaten Tebo rata-rata mencapai 167,5 mm³ dengan terendah curah hujan di bulan Januari sebesar 45 mm³ dengan 7 hari hujan dan tertinggi di bulan November sebesar 305 mm³ dengan 23 hari hujan.



g. Penggunaan lahan

Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan lindung (Hutan Lindung Bukit Limau) dengan luas 8.320,48 (delapan ribu tiga ratus dua puluh koma empat delapan) hektar, kawasan suaka alam seluas 1.173,04 (seribu seratus tujuh puluh tiga koma nol empat) hektar yang terdiri dari Cagar Alam Bulu Hitam yang terdapat di Kecamatan VII Koto Ilir seluas 455,87 (empat ratus lima puluh lima koma delapan tujuh) hektare; dan Cagar Alam Cempaka/Sungai Bengkal/Tabir Kejasung yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir dan Tengah Ilir seluas 717,17 (tujuh ratus tujuh belas koma satu tujuh) hektare sedangkan untuk kawasan pelestarian alam yang terdiri dari kawasan taman nasional dan taman hutan raya, kawasan taman nasional seluas 37.153,24 (tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga koma dua empat) hektare meliputi Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang terdapat di Kecamatan Sumay dan Tengah Ilir seluas 25.698,72 (dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua) hektare; dan Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang terdapat di Kecamatan Muara Tabir seluas 11.454,52 (sebelas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima dua) hektare dan untuk taman hutan raya yakni taman raya bukit sari yang terdapat di Kecamatan Tebo Ilir seluas 128,71 (seratus dua puluh delapan koma tujuh satu) hektare.

Untuk kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Tebo dapat di bagi menurut penggunaan dominan meliputi kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan pariwisata; dan kawasan permukiman. Kawasan hutan produksi yang terdiri dari Kawasan hutan produksi terbatas seluas 20.052,99 (dua puluh ribu lima puluh dua koma sembilan sembilan) hektare, yang tersebar di Kecamatan Serai Serumpun; Kecamatan Sumay; dan Kecamatan Tengah Ilir, dan Kawasan hutan produksi tetap seluas 222.549,09 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan koma nol Sembilan) hektare dengan sebaran pada 8 Kecamatan meliputi Kecamatan VII Koto; Kecamatan VII Koto Ilir; Kecamatan



Serai Serumpun; Kecamatan Sumay; Kecamatan Tengah Ilir; Kecamatan Tebo Ilir; Kecamatan Muara Tabir; dan Kecamatan Tebo Tengah.

Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Tebo terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 6.456 (enam ribu empat ratus lima puluh enam)—hektare dan untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan di dalam kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektare. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 290.567 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh) hektar dengan komoditas unggulan merupakan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet

Kawasan permukiman yang terdiri dari Kawasan permukiman perkotaan dengan luasan kurang lebih 7.694 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) hektar yang tersebar pada seluruh kecamatan di dalam Kabupaten Tebo dan untuk kawasan pariwisata berupa sebaran-sebaran objek wisata di dalam Kabupaten Tebo.

h. Wilayah rawan bencana

Definisi Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa



gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Di Kabupaten Tebo masih terdapat beberapa lokasi rawan bencana dengan rincian berikut:

- a. Banjir merupakan keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir saat musim penghujan setiap tahun pada kecamatan yang dilewati aliran Sungai Batanghari yaitu Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Sumay, Tebo Tengah, Tengah Ilir, Tebo Ilir dan Kecamatan Muara Tabir.
- b. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Tebo berpotensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kecuali Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir.
- c. Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 36.305 Ha yang meliputi kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Sumay, Tebo Tengah, Serai Serumpun dan Tengah Ilir.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo, Jumlah penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebanyak 359,638 jiwa, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rimbo Bujang dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Serai Serumpun. Dilihat dari jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki sebanyak 184,092 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 175,546 Jiwa dengan rasio jenis kelamin 105 yang berarti pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki. Selanjutnya jumlah penduduk dan rasio jumlah penduduk disetiap kecamatan dalam Kabupaten Tebo disajikan pada tabel dibawa ini :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2025

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan		
Tebo Ilir	15,392	14,669	104.93	30.061
Muara Tabir	9,298	8,623	107.83	17.921
Tebo Tengah	22,296	21,015	106.10	43.311
Sumay	12,312	11,213	109.80	23.525
Tengah Ilir	15,751	14,281	110.29	30.032
Rimbo Bujang	33,588	31,484	106.68	65.072
Rimbo Ulu	20,103	18,913	106.29	39.016
Rimbo Ilir	12,514	11,921	104.97	24.435
Tebo Ulu	17,177	16,670	103.04	33.847
VII Koto	10,877	10,180	106.85	21.057
Serai Serumpun	5,539	5,141	107.74	10.680
VII Koto Ilir	9,245	11,436	80.84	20.681
Total	184,092	175,546	104.87	359.638

Sumber : BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2026

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo pada Tahun 2025 berdasarkan kelompok umur di dominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun, yang pada tahun 2024 sebesar 241.643 jiwa naik menjadi 244.265 jiwa di Tahun 2025 atau meningkat sebesar 10.85 persen, sedangkan kelompok penduduk usia 0-14 tahun dari 94.944 jiwa pada Tahun 2024 naik menjadi 95.410 jiwa pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 4.91 persen, dan

kelompok usia diatas 65 tahun keatas dari sebelumnya 18.675 jiwa pada tahun 2024 naik menjadi 19.963 jiwa pada Tahun 2025 atau meningkat sebesar 68,97 persen. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Tebo Tahun 2025

Kelompok Umur	Tahun 2024	Tahun 2025	Persentase Pertumbuhan
0-14 Tahun	94.944	95.410	4.91
15-19 Tahun	241.643	244.265	10.85
65 Tahun ke atas	18.675	19.963	68.97
Jumlah	355.262	359.638	12.32

Sumber : BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2026

c. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2024 sebesar 1.23 persen dan pada Tahun 2025 sebesar 1,04 persen dengan rata-rata pertumbuhan dalam dua tahun terakhir sebesar 1,14 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel. 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaeten tebo tahun 2024-2025

TAHUN	PENDUDUK	PERTUMBUHAN
2024	355.262	1,04
2025	359.638	1,23
RATA-RATA		1,14

Sumber : BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2026

d. Kepadatan Penduduk

Tingkat Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu, Satuan tingkat

kepadatan penduduk adalah orang per kilometer persegi (orang/km²) atau orang per hektar (orang/ha).

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Kepadatan penduduk dapat dihitung menggunakan rumus $KP = P/L$, di mana: KP adalah kepadatan penduduk, P adalah jumlah penduduk, L adalah luas lahan.

Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Sementara itu, daerah yang memiliki akses mudah ke pusat industri dan memiliki tanah yang subur cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Kepadatan Penduduk Kabupaten Tebo pada Tahun 2025 sebesar 55,66 orang/km² yang berarti pada setiap km² di huni oleh sebanyak 55 orang. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tebo disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel. 1.8
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten tebo tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
1	2	3	4	5
1	Tebo Ilir	30,061	983,56	42.42
2	Muara Tabir	17,921	708,7	35.19
3	Tebo Tengah	43,311	410,3	44.03
4	Sumay	23,525	406,92	18.55
5	Tengah Ilir	30,032	1.268,00	135,62
6	Rimbo Bujang	65,072	658,79	159,91
7	Rimbo Ulu	39,016	295,74	131,93
8	Rimbo Ilir	24,435	214,34	114
9	Tebo Ulu	33,847	221,44	82,49
10	VII Koto	21,057	315,7	31,96
11	Serai Serumpun	10,680	468,21	33,83
12	VII Koto Ilir	20,681	509,3	44,17
Jumlah		359,638	6.461	55,66

Sumber : BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2026

3. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tebo yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin

Total keseluruhan ASN Kabupaten Tebo pada Tahun 2025 sebanyak 4.225 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.211 orang dan PPPK sebanyak 1.014 orang dengan komposisi yaitu 1.637 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.588 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2024 sebanyak 3.895 karena ada penambahan data PPPK, sedangkan bila dilihat dari jumlah aparatur yang berstatus PNS, angka tersebut berkurang sebanyak 46 orang, pengurangan ini disebabkan batas umur pensiun dan ada yang pindah dan meninggal dunia. Jumlah Pegawai Negeri Sipil disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.9
PNS dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tebo Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Jumlah Laki-laki	1.637
2.	Jumlah Perempuan	2.588
	Jumlah seluruh	4.225

Sumber : BKPSDM Kab. Tebo tahun 2026

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang jabatan karena terdapat pejabat dengan jabatan fungsional tertentu berjenis kelamin perempuan yang lebih besar daripada laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karier dan jabatan selain

mempertimbangkan aspek yang utama yaitu pendidikan, kompetensi, dan lain-lain.

Tabel. 1.10
PNS Berdasarkan Jenis Jabatan
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	19	2	21
4	Jabatan Administrator	108	36	144
5	Jabatan Pengawas	104	69	173
6	Jabatan Pelaksana	380	269	649
7	Jabatan Fungsional Tertentu	755	1,469	2,224
8	PPPK	271	743	1.014
Jumlah		1,637	2,588	4.225

Sumber : BKPSDM Kab. Tebo tahun 2026

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel berikut ini, Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kabupaten Tebo.

Tabel 1.11
PNS Berdasarkan Golongan
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Golongan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda	I/a	2	0	2
2	Juru Muda Tingkat I	I/b	1	0	1
3	Juru	I/c	3	1	4
4	Juru Tingkat I	I/d	4	0	4
Gol I			10	1	11
5	Pengatur Muda	II/a	9	9	18
6	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	22	9	31
7	Pengatur	II/c	49	26	75
8	Pengatur Tingkat I	II/d	106	138	244
Gol II			186	182	368
9	Penata Muda	III/a	182	255	437
10	Penata Muda Tingkat I	III/b	240	403	643
11	Penata	III/c	185	295	480

12	Penata Tingkat I	III/d	281	454	735
Gol III			888	1.407	2.295
13	Pembina	IV/a	125	113	238
14	Pembina Tingkat I	IV/b	106	92	198
15	Pembina Utama Muda	IV/c	51	50	101
16	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
17	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
Gol IV			282	255	537
Jumlah PNS			1.366	1.845	3.211
PPPK			271	743	1.014
Jumlah PNS + PPPK			1.637	2.588	4.225

Sumber : BKPSDM Kab. Tebo Tahun 2026

d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan tingkat Pendidikan

Jumlah PNS dengan tingkat golongan, golongan III dan IV, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana berikut ini menunjukkan bahwa golongan III dan IV tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan diploma III dan strata I.

Tabel. 1.12
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	6	0	6
2	SLTP	10	1	11
3	SLTA	238	108	346
4	D-I	1	7	8
5	D-II	35	34	69
6	D-III	121	436	557
7	S-1	853	1.208	2.061
8	S-2	100	51	151
9	S-3	2	0	2
Jumlah PNS		1.366	1.845	3.211
PPPK		271	743	1.014
Jumlah PNS + PPPK		1.637	2.588	4.225

Sumber : BKPSDM Kab. Tebo tahun 2026

4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri dari tiga komponen utama : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Struktur ini disusun sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang disetujui DPRD untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan :

a. Realisasi Pendapatan Daerah menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.244.766.814.725.16,- atau sebesar 102,10 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.219.058.319.974.10,-. Target, realisasi, dan capaian masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1 13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian %
	PENDAPATAN DAERAH	1.219.058.319.974.10	1.244.766.814.725.16	102.10
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.118.712.631.10	140.035.625.137.16	114.67
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.939.607.343.00	1.104.731.189.588.00	100.71
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2026

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp140.035.625.137,16, atau 114,67 persen dari target sebesar Rp122.118.712.631,10, meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp54.235.548.358, atau 116,49 persen dari target sebesar Rp46.556.575.511,10, retribusi daerah terealisasi sebesar Rp49.773.671.167, atau 131,64 persen dari target sebesar Rp37.808.043.760, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp11.620.841.618,95, atau 97,57 persen dari target sebesar Rp11.910.000.000, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp24.405.563.993,21, atau 94,43 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp25.844.093.360, Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.118.712.631,10	140.035.625.137,16	114,67
1	Pajak Daerah	46.556.575.511,10	54.235.548.358,00	116,49
2	Retribusi Daerah	37.808.043.760,00	49.773.671.167,00	131,64
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.910.000.000,00	11.620.841.618,95	97,57
4	Lain-lain PAD yang Sah	25.844.093.360,00	24.405.563.993,21	94,43

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.104.731.189.588,00, atau 100,71 persen dari target sebesar Rp1.096.939.607.343,00, meliputi realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebesar Rp1.020.922.547.510,00, atau 101,90 persen dari target sebesar Rp1.001.838.075.000,00, selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar

Rp83.808.642.078,00, atau 88,12 persen dari target sebesar Rp95.101.532.343,00, Rincian target, realisasi dan capaian Pendapatan Transfer Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN TRANSFER	1.096.939.607.343,00	1.104.731.189.588,00	100,71
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	1.001.838.075.000,00	1.020.922.547.510,00	101,90
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.101.532.343,00	83.808.642.078,00	88,12

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 tidak di anggarakan karena Berdasarkan informasi kebijakan anggaran tahun 2025, tidak adanya atau berkurangnya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (dan hibah/bantuan keuangan pada umumnya) ke daerah disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya pengetatan aturan (regulasi), efisiensi anggaran, dan peralihan fokus belanja pusat.

b. Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.283.945.623.239.94, sedangkan realisasinya sebesar Rp1.225.285.490.211.81, atau sebesar 95,43 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	1,283,945,623,239.94	1,225,285,490,211.81	95.43
1	BELANJA OPERASI	842,779,352,256.73	804,513,819,715.51	95.45
	Belanja Pegawai	450,249,116,282.39	429,939,775,230.30	95.48
	Belanja Barang dan Jasa	370,370,755,429.34	353,466,049,330.21	95.43
	Belanja Barang	91,414,178,081.20	87,483,067,848.36	95.69
	Belanja Jasa	113,844,714,661.50	107,985,803,788.25	94.85
	Belanja Bunga	6,115,981,227.00	6,115,981,227.00	100.00
	Belanja Subsidi	1,200,000,000.00	1,199,693,778.00	99.97
	Belanja Hibah	14,843,499,318.00	13,792,320,150.00	92.91
	JUMLAH BELANJA OPERASI	842,779,352,256.73	804,513,819,715.51	95.45
2	BELANJA MODAL	226,251,535,827.21	220,329,823,726.30	97.38
	Belanja Modal Tanah	115,947,129.00	115,898,089.00	99.95
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,375,522,128.00	41,798,071,472.00	94.19
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58,202,109,963.00	57,256,670,269.80	98.37
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116,463,051,459.21	114,148,220,597.50	98.01
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,094,905,148.00	7,010,963,298.00	98.81
	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	226,251,535,827.21	220,329,823,726.30	97.38
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,320,769,081.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak Terduga	6,320,769,081.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6,320,769,081.00	0.00	0.00
4	BELANJA TRANSFER	208,593,966,075.00	200,441,846,770.00	96.09
	Belanja Bagi Hasil	2,776,726,075.00	2,680,501,852.00	96.53
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2,594,609,347.00	2,504,696,169.00	96.53
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	182,116,728.00	175,805,683.00	96.53
	Belanja Bantuan Keuangan	205,817,240,000.00	197,761,344,918.00	96.08
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	150,000,000.00	100,000,000.00	66.66
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	205,667,240,000.00	197,661,344,918.00	96.10
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	208,593,966,075.00	200,441,846,770.00	96.09
	JUMLAH BELANJA	1,283,945,623,239.94	1,225,285,490,211.81	95.43

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada Pos Penerimaan Pembiayaan yang merupakan SiLPA Tahun sebelumnya dari

Anggaran sebanyak Rp.84.879.531.481,84 terealisasi Rp68,758,296,999.03 atau sebesar 81 Persen. Tidak maksimalnya penyerapan pada penerimaan pembiayaan ini karena alokasi dana SiLPA berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Bagi Hasil maupun dana Alokasi Khusus yang tidak terdapat petunjuk teknis penggunaannya.

Adapun pada Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan sebagai pembayaran Pokok Utang Pemerintah Kabupaten Tebo.

Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN DAERAH	64,887,303,265.84	48,766,068,783.03	75.15
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84,879,531,481.84	68,758,296,999.03	81.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84,879,531,481.84	68,758,296,999.03	81.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84,879,531,481.84	68,758,296,999.03	81.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,992,228,216.00	19,992,228,216.00	100.00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19,992,228,216.00	19,992,228,216.00	100.00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19,992,228,216.00	19,992,228,216.00	100.00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19,992,228,216.00	19,992,228,216.00	100.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,992,228,216.00	19,992,228,216.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	64,887,303,265.84	48,766,068,783.03	75.15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	68,247,393,296.38	0.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan merubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah dimaksud, sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar **Rp1.299.872.592.789,00** bertambah sebesar **Rp6.843.813.666,94** sehingga menjadi **Rp1.306.716.406.455,94** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp.1.240.599.787.474,00,-
b. Berkurang	<u>Rp. (18.762.912.499,90)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.1.221.836.874.974,00,-
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp. 1.279.880.364.573,00,-
b. Bertambah	<u>Rp. 6.843.813.666,94,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 1.286.724.178.239,94,-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 59.272.805.315,00-
2) Bertambah	<u>Rp. 25.606.726.166,84-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 84.879.531.481,84,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 19.992.228.216,00-
2) Bertambah	<u>Rp. _____</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 19.992.228.216,00-
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 64.887.303.265,84,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00,-



Asumsi dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang digunakan pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Program/ Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan Tahun 2025;
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui :
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile*, layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet, serta e-Samsat;
 - e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

- 
- f. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - h. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer, dilakukan melalui:
- a. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan sehingga peningkatan penerimaan dari target pendapatan dapat tercapai.

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp18.762.912.499,90-** atau sebesar 1,51% dari semula sebesar **Rp1.240.599.787.474,00-** menjadi **Rp 1.221.836.874.974,10-** , Sumber Pendapatan yang mengalami penurunan signifikan yaitu pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Berikut Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar **Rp4.552.812.522,10-** atau naik sebesar 3,87% dari semula sebesar **Rp117.565.900.131,00-** menjadi **Rp122.118.712.631,10-**

1) Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar **Rp2.680.000.000,10-** atau 6,11% dari semula sebesar **Rp43.876.575.511,00-** menjadi **Rp46.556.575.511,10-**.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar **Rp35.575.918.760,00-** atau 1.594% dari semula sebesar **Rp2.232.125.000,00-** menjadi **Rp 37.808.043.760,00-**.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, mengalami kenaikan sebesar **Rp910.000.000,00-** atau 8,27% dari semula sebesar **Rp11.000.000.000,00-** menjadi **Rp11.910.000.000,00-**.

4) lain-lain PAD yang sah

Asumsi lain-lain PAD sedikit mengalami penurunan sebesar **Rp34.613.106.260,00,-** atau 57,25% dari semula sebesar **Rp 60.457.199.620,00-** menjadi **Rp 25.844.093.360,00-**.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Murni tahun 2025 sebesar **Rp1.123.033.887.343,00-** dan pada Perubahan APBD tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp23.315.725.000,00,-** atau 2,08% menjadi **Rp1.099.718.162.343,00-** yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp45.845.725.000,00- atau 4,36% dari semula sebesar Rp1.050.462.355.000,00- menjadi sebesar Rp1.004.616.630.000,00- yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar **Rp 22.530.000.000,00-** atau sebesar 31,05% dari semula sebesar **Rp72.571.532.343,00-** menjadi sebesar **Rp 95.101.532.343,00-** yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Adapun Rincian Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.565.900.131,00	122.118.712.631,10	4.552.812.500,10
4.1.01	Pajak Daerah	43.876.575.511,00	46.556.575.511,10	2.680.000.000,10
4.1.02	Retribusi Daerah	2.232.125.000,00	37.808.043.760,00	35.575.918.760,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	11.910.000.000,00	910.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.457.199.620,00	25.844.093.360,00	-34.613.106.260,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.123.033.887.343,00	1.099.718.162.343,00	-23.315.725.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.462.355.000,00	1.004.616.630.000,00	-45.845.725.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.571.532.343,00	95.101.532.343,00	22.530.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.240.599.787.474,00	1.221.836.874.974,10	-18.762.912.499,90

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

a. Permasalahan

1. Ketergantungan pada sektor primer, Kabupaten Tebo masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Saat harga komoditas (karet, sawit,

- 
- dll.) turun, pendapatan masyarakat ikut turun dan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. PAD belum optimal, Pajak daerah dan retribusi masih terbatas, Banyak potensi pajak (usaha, parkir, reklame, tambang galian C) belum tergarap maksimal, dan Basis industri dan jasa masih kecil.
 3. Penurunan transfer pusat/daerah
 4. Lemahnya investasi
 5. Infrastruktur dan akses ekonomi, Kondisi jalan, irigasi, dan sarana pendukung ekonomi yang belum merata menghambat distribusi hasil produksi dan pertumbuhan usaha

b. Upaya Penyelesaian

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendataan ulang objek dan subjek pajak daerah (pajak hotel, restoran, reklame, parkir, PBB-P2, dan galian C), Digitalisasi sistem pajak dan retribusi untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Penegakan hukum pajak daerah melalui sanksi administratif yang tegas namun adil, serta Evaluasi tarif pajak dan retribusi agar sesuai dengan potensi ekonomi daerah tanpa memberatkan masyarakat.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah, Mengurangi ketergantungan pada sektor perkebunan dengan mengembangkan UMKM berbasis lokal, Ekonomi kreatif, Pariwisata alam dan budaya Kabupaten Tebo.
3. Mendorong hilirisasi produk pertanian dan perkebunan agar nilai tambah dinikmati di daerah.
4. Peningkatan Investasi Daerah, Penyederhanaan proses perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5. Optimalisasi Peran BUMD, Restrukturisasi dan profesionalisasi pengelolaan BUMD
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan SDM, Perbaikan infrastruktur jalan, pasar, dan sentra produksi untuk memperlancar aktivitas ekonomi.
7. Optimalisasi Dana Transfer dan Kerja Sama
8. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

2. Perubahan Kebijakan Dasar Belanja Daerah

Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun 2025 disesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025 yaitu **“Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan”** yang diarahkan untuk :

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan arah kebijakan :
 - a) Penguatan ekosistem industri pengolahan berbasis sektor pertanian;
 - b) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif;
 - c) Pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis keunggulan wilayah;
 - d) Peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - e) Penguatan keberdayaan masyarakat desa dan penyelarasan pembangunan Desa dan Kabupaten;
 - f) Sertifikasi Industri dan sertifikasi halal untuk peningkatan daya saing IKM dan UMKM;
 - g) Peningkatan iklim investasi daerah berbasis ekonomi hijau
- 2) Peningkatan Dan Pemerataan Kapasitas Modal Manusia Yang Berbudaya, dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan akses (pemerataan) dan mutu (kualitas) pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
 - b) Pemerataan perlindungan sosial yang adaptif;
 - c) Penguatan peran sekolah dan keluarga dalam pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan;
 - d) Penguatan keberdayaan lembaga keagamaan;
 - e) Pelestarian dan penguatan corak kebudayaan daerah;
 - f) Penguatan pengarusutamaan gender.
- 3) Pengembangan Kawasan Dan Lingkungan Yang Resilien, Tahan Bencana, Dan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a) Penguatan Regulasi dan penataan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur persampahan;

- c) Penguatan manajemen risiko bencana, trantibum, keselamatan dan perubahan iklim;
 - d) Peningkatan kualitas permukiman yang layak huni dan ramah anak serta ramah disabilitas;
 - e) Peningkatan kualitas infrastruktur strategis pendukung perekonomian;
 - f) Perlindungan sumber daya air berbasis kesesuaian perencanaan tata guna lahan.
- 4) Percepatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Inovatif serta Pelayanan Publik Berbasis Digital, dengan arah kebijakan:
- a) Penguatan arsitektur SPBE;
 - b) Penguatan sistem akuntabilitas;
 - c) Penguatan sistem merit pendukung birokrasi professional, inovatif, adaptif dan berintegritas;
 - d) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa/ Kelurahan;
 - e) Penguatan ekosistem inovasi;
 - f) Perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis IT;
 - g) Digitalisasi tata kelola keuangan daerah;
 - h) Peningkatan kapasitas dan integrasi layanan mall pelayanan publik (MPP) menuju MPP Digital.

Belanja Daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025, mengalami peningkatan dari **Rp1.279.880.364.573,00-** menjadi **Rp1.286.724.178.239,94-** bertambah sebesar **Rp6.843.813.666,94-** atau **0.53%**, adapun rincian Perubahan Belanja Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	838.526.573.826,85	845.653.822.877,73	7.127.249.050,88
5.1.01	Belanja Pegawai	428.543.725.781,85	453.024.671.282,39	24.480.945.500,54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.696.467.631,00	370.384.669.341,34	29.688.201.710,34
5.1.03	Belanja Bunga	6.009.417.096,00	6.115.981.227,00	106.564.131,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.076.963.318,00	14.928.501.027,00	-47.148.462.291,00
5.2	BELANJA MODAL	227.927.244.069,15	226.142.620.206,21	-1.784.623.862,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	115.947.129,00	115.947.129,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.489.234.941,00	44.773.163.825,00	9.283.928.884,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.785.800.372,00	58.202.109.963,00	3.416.309.591,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136.820.807.727,15	116.463.051.459,21	-20.357.756.267,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	715.453.900,00	6.588.347.830,00	5.872.893.930,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.4	BELANJA TRANSFER	206.426.546.677,00	208.443.966.075,00	2.017.419.398,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.537.580.677,00	2.776.726.075,00	-4.760.854.602,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	198.888.966.000,00	205.667.240.000,00	6.778.274.000,00
Jumlah Belanja		1.279.880.364.573,00	1.286.724.178.239,94	6.843.813.666,94

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo tahun 2025

Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2025 diupayakan dengan Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kewajiban penyediaan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan , infrastruktur dan pengawasan sesuai perundang-undangan, memberikan bantuan dalam bentuk Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan secara merata dan sesuai peraturan perundangundangan untuk menopang pemerataan fiskal daerah, memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum, Dana Alokasi Khusus lebih difokuskan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan



daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan elakukan rasionalisasi anggaran yang kurang prioritas dan strategis dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tebo yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target indikator makro pembangunan, maka berdasarkan belanja prioritas, alokasi belanja dalam Tahun 2025 terutama diarahkan pada:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2025-2029;
- 2) Prioritas Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2025;
- 3) Dukungan terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs)*; kemiskinan;
- 4) Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Tebo secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- 6) Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai

- 
- pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Desa, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi;
 - 8) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), DBH Kelapa Sawit, BOS Pusat dan Pajak Rokok;
 - 9) Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
 - 10) Pemberian penghargaan bagi altet berprestasi;

3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
- b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Tebo Tahun 2025 diarahkan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan pada APBD Murni 2025 dianggarkan sebesar **Rp59.272.805.315.00-** yang merupakan proyeksi dari pelampauan pendapatan transfer ke Pemerintah Kabupaten Tebo, dan setelah terbitnya hasil audit laporan keuangan Kabupaten Tebo dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdapat penambahan penerimaan pembiayaan sebesar **Rp.25.606.726.166,84-** atau 43,20% sehingga kenaikan pembiayaan menjadi **Rp. 84.879.531.481,84-** yang terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2024
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6. Penerimaan Piutang Daerah

Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2025 terdiri dari Penyetaraan Modal Daerah yang tidak terdapat Anggaran pembiayaan, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo **Rp.19.992.228.216,00-.**

Adapun perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	39.280.577.099,00	-64.887.303.265,84	-25.606.726.166,84
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.272.805.315,00	84.879.531.481,84	25.606.726.166,84
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.272.805.315,00	84.879.531.481,84	25.606.726.166,84
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo tahun 2025

Selanjutnya rincian penjabaran perubahan APBD yang di Klasifikasikan menurut kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Matrik berikut ini :

Tabel : 2.4
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DI KLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.565.900.131,00	122.118.712.631,10	4.552.812.500,10
4.1.01	Pajak Daerah	43.876.575.511,00	46.556.575.511,10	2.680.000.000,10
4.1.01.09	Pajak Reklame	460.000.000,00	550.000.000,00	90.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	460.000.000,00	550.000.000,00	90.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	460.000.000,00	550.000.000,00	90.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.340.000.000,00	19.380.000.000,00	40.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.211.839.938,00	13.211.839.937,90	1.999.999.999,90
4.1.01.20.01	Opsen PKB	11.211.839.938,00	13.211.839.937,90	1.999.999.999,90
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	11.211.839.938,00	13.211.839.937,90	1.999.999.999,90
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.929.735.573,00	8.429.735.573,20	500.000.000,20
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.929.735.573,00	8.429.735.573,20	500.000.000,20

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.929.735.573,00	8.429.735.573,20	500.000.000,20
4.1.02	Retribusi Daerah	2.232.125.000,00	37.808.043.760,00	35.575.918.760,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	722.500.000,00	35.989.606.260,00	35.267.106.260,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	35.267.106.260,00	35.267.106.260,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	3.245.261.260,00	3.245.261.260,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	32.021.845.000,00	32.021.845.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	517.000.000,00	517.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.309.625.000,00	1.618.437.500,00	308.812.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000,00	283.000.000,00	276.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.000.000,00	277.000.000,00	276.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	365.625.000,00	398.437.500,00	32.812.500,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	275.625.000,00	308.437.500,00	32.812.500,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Temak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	329.000.000,00	329.000.000,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	329.000.000,00	329.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	11.910.000.000,00	910.000.000,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000,00	11.910.000.000,00	910.000.000,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000,00	11.910.000.000,00	910.000.000,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.000.000.000,00	11.910.000.000,00	910.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.457.199.620,00	25.844.093.360,00	-34.613.106.260,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.199.799,00	187.199.799,00	0,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.199.799,00	187.199.799,00	0,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	187.199.799,00	187.199.799,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.230.000.000,00	1.884.000.000,00	654.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.000.000,00	1.884.000.000,00	654.000.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	1.230.000.000,00	1.884.000.000,00	654.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	49.389.999.821,00	14.122.893.561,00	-35.267.106.260,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.377.999.821,00	14.122.893.561,00	-35.255.106.260,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	49.377.999.821,00	14.122.893.561,00	-35.255.106.260,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.123.033.887.343,00	1.099.718.162.343,00	-23.315.725.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.462.355.000,00	1.004.616.630.000,00	-45.845.725.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	113.656.525.000,00	113.656.525.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	113.656.525.000,00	113.656.525.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	113.656.525.000,00	113.656.525.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.937.702.000,00	7.937.702.000,00	0,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.937.702.000,00	7.937.702.000,00	0,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.937.702.000,00	7.937.702.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	153.090.698.000,00	153.151.140.000,00	60.442.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	34.599.132.000,00	34.659.574.000,00	60.442.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	28.913.467.000,00	28.913.467.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.685.665.000,00	5.685.665.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	60.442.000,00	60.442.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	113.456.935.000,00	113.456.935.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	77.752.825.000,00	77.752.825.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	32.758.306.000,00	32.758.306.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.111.999.000,00	2.111.999.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.034.631.000,00	5.034.631.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	5.034.631.000,00	5.034.631.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	582.268.338.000,00	559.616.435.000,00	-22.651.903.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	460.873.005.000,00	460.873.005.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	460.873.005.000,00	460.873.005.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	121.395.333.000,00	98.743.430.000,00	-22.651.903.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.292.550.000,00	9.292.550.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	55.296.112.000,00	55.296.112.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.754.768.000,00	32.754.768.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	22.651.903.000,00	0,00	-22.651.903.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	193.509.092.000,00	170.254.828.000,00	-23.254.264.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	39.935.112.000,00	16.182.122.000,00	-23.752.990.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	649.944.000,00	649.944.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	263.029.000,00	263.029.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	253.680.000,00	253.680.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.373.311.000,00	5.373.311.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	9.511.658.000,00	9.511.658.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	23.752.990.000,00	0,00	-23.752.990.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	153.573.980.000,00	154.072.706.000,00	498.726.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	47.795.728.000,00	47.795.728.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.034.750.000,00	2.034.750.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	67.894.730.000,00	67.894.730.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	669.721.000,00	669.721.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.924.700.000,00	4.924.700.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	498.726.000,00	498.726.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.589.710.000,00	4.589.710.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.451.500.000,00	2.451.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.057.070.000,00	7.057.070.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	371.831.000,00	371.831.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.119.240.000,00	15.119.240.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.571.532.343,00	95.101.532.343,00	22.530.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.571.532.343,00	72.571.532.343,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.571.532.343,00	72.571.532.343,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000.000,00	14.887.500.000,00	-10.112.500.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	10.112.500.000,00	10.112.500.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.614.304.313,00	27.614.304.313,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.082.886,00	22.082.886,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.935.145.144,00	19.935.145.144,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	22.530.000.000,00	22.530.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	22.530.000.000,00	22.530.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	22.530.000.000,00	22.530.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.240.599.787.474,00	1.221.836.874.974,10	-18.762.912.499,90
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	838.526.573.826,85	845.653.822.877,73	7.127.249.050,88
5.1.01	Belanja Pegawai	428.543.725.781,85	453.024.671.282,39	24.480.945.500,54
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	265.368.798.558,85	283.139.934.532,45	17.771.135.973,60
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	200.079.935.382,85	211.269.510.784,45	11.189.575.401,60
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	182.417.745.636,85	179.082.795.342,95	-3.334.950.293,90
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.662.189.746,00	32.186.715.441,50	14.524.525.695,50
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.082.261.116,00	20.819.975.148,45	1.737.714.032,45
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.620.719.403,00	17.698.919.195,92	78.199.792,92
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.461.541.713,00	3.121.055.952,53	1.659.514.239,53
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.164.551.333,00	5.713.380.818,79	-451.170.514,21
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.148.622.833,00	5.713.380.818,79	-435.242.014,21

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	15.928.500,00	0,00	-15.928.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.821.843.732,00	11.966.794.232,00	2.144.950.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.813.879.482,00	11.966.794.232,00	2.152.914.750,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.964.250,00	0,00	-7.964.250,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.490.678.824,00	3.647.281.997,32	1.156.603.173,32
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.581.717.274,00	1.772.048.527,32	190.331.253,32
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	908.961.550,00	1.875.233.470,00	966.271.920,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.278.785.252,00	12.021.554.303,80	742.769.051,80
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.264.666.011,00	9.883.432.423,00	-381.233.588,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.014.119.241,00	2.138.121.880,80	1.124.002.639,80
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	981.298.487,00	1.530.179.068,27	548.880.581,27
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	981.298.487,00	1.530.179.068,27	548.880.581,27
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.039.453,00	4.317.243,60	-722.209,40
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.557.068,00	3.372.675,39	-1.184.392,61
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	482.385,00	944.568,21	462.183,21
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.556.240.460,00	14.176.272.226,36	620.031.766,36
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.863.997.887,00	12.825.227.527,33	-38.770.359,67
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	692.242.573,00	1.351.044.699,03	658.802.126,03
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	506.097.437,00	537.674.439,12	31.577.002,12
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.011.694,00	465.025.154,39	-986.539,61
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	40.085.743,00	72.649.284,73	32.563.541,73
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.402.067.082,00	1.452.994.270,29	50.927.188,29
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.291.804.379,00	1.246.932.004,88	-44.872.374,12
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	110.262.703,00	206.062.265,41	95.799.562,41
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	134.763.578.708,00	130.473.274.907,17	-4.290.303.800,83
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.107.484.302,00	31.192.858.507,00	-2.914.625.795,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.107.484.302,00	31.192.858.507,00	-2.914.625.795,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.617.705.603,00	4.638.530.362,00	20.824.759,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.617.705.603,00	4.638.530.362,00	20.824.759,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.024.320.000,00	1.114.039.076,00	89.719.076,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.024.320.000,00	1.114.039.076,00	89.719.076,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	25.362.145.442,00	22.681.834.405,17	-2.680.311.036,83
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	25.362.145.442,00	22.681.834.405,17	-2.680.311.036,83
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.651.923.361,00	70.846.012.557,00	1.194.089.196,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	1.571.889,00	2.460.000,00	888.111,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	52.234.256,00	73.800.000,00	21.565.744,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	172.604,00	205.000,00	32.396,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	18.051.583,00	18.860.000,00	808.417,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	598.256.625,00	713.400.000,00	115.143.375,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	3.041.558,00	3.156.896,00	115.338,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	101.385,00	820.000,00	718.615,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	558.036,00	615.000,00	56.964,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.225.000,00	12.300.000,00	3.075.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	106.600.000,00	106.600.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.659.425,00	82.000.000,00	34.340.575,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	67.894.730.000,00	68.594.235.861,00	699.505.861,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	250.000.000,00	399.088.800,00	149.088.800,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	669.721.000,00	838.471.000,00	168.750.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.078.036.589,00	18.251.963.081,77	-826.073.507,23
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	844.604.000,00	786.508.800,41	-58.095.199,59
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	844.604.000,00	786.508.800,41	-58.095.199,59
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	95.552.735,00	84.801.024,00	-10.751.711,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	95.552.735,00	84.801.024,00	-10.751.711,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.472.160,00	101.986.688,00	4.514.528,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.472.160,00	101.986.688,00	4.514.528,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	73.064.880,00	6.032.880,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	73.064.880,00	6.032.880,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000,00	1.222.244.730,00	169.283.730,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000,00	1.222.244.730,00	169.283.730,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.946.600,00	145.617.235,00	43.670.635,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.946.600,00	145.617.235,00	43.670.635,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.991.100,00	17.161.011,00	169.911,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.991.100,00	17.161.011,00	169.911,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.454.100.000,00	44.100.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.454.100.000,00	44.100.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.102.500.000,00	-1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.102.500.000,00	-1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.182.623,00	337.877.929,68	-25.304.693,32
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.182.623,00	337.877.929,68	-25.304.693,32
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.399.426.107,00	4.449.574.119,68	50.148.012,68
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	70.000.000,00	74.754.711,36	4.754.711,36
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.648.987,00	1.753.557,12	104.570,12
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.021.920,00	6.073.099,20	2.051.179,20
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.323.755.200,00	4.366.992.752,00	43.237.552,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.265.840.000,00	5.318.498.400,00	52.658.400,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.265.840.000,00	5.318.498.400,00	52.658.400,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	158.028.264,00	158.028.264,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	158.028.264,00	158.028.264,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	820.593.255,00	861.115.000,00	40.521.745,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	163.649.556,00	161.943.615,00	-1.705.941,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	163.649.556,00	161.943.615,00	-1.705.941,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	346.500.000,00	286.500.000,00	-60.000.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	346.500.000,00	286.500.000,00	-60.000.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	27.405.000,00	27.405.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	27.405.000,00	27.405.000,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	78.750,00	78.750,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	78.750,00	78.750,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.813.260,00	79.813.260,00	60.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.813.260,00	79.813.260,00	60.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	442.260,00	442.260,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	442.260,00	442.260,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.557.740,00	2.557.740,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.557.740,00	2.557.740,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	211.321.689,00	253.549.375,00	42.227.686,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	397.188,00	615.000,00	217.812,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	13.196.875,00	18.450.000,00	5.253.125,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	43.563,00	51.250,00	7.687,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.561.250,00	4.715.000,00	153.750,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	151.187.500,00	178.350.000,00	27.162.500,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	768.750,00	784.375,00	15.625,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.625,00	205.000,00	179.375,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	140.938,00	153.750,00	12.812,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.306.250,00	3.075.000,00	768.750,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.043.750,00	20.500.000,00	8.456.250,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	612.954.930,00	614.970.930,00	2.016.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	203.616.000,00	2.016.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	203.616.000,00	2.016.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	411.354.930,00	411.354.930,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	411.354.930,00	411.354.930,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.899.763.741,00	19.683.412.831,00	11.783.649.090,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	7.899.763.741,00	19.683.412.831,00	11.783.649.090,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	7.899.763.741,00	19.683.412.831,00	11.783.649.090,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.696.467.631,00	370.384.669.341,34	29.688.201.710,34
5.1.02.01	Belanja Barang	106.960.950.927,00	91.163.254.181,20	-15.797.696.745,80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	106.931.612.627,00	91.007.184.219,20	-15.924.428.407,80
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	240.496.410,00	189.057.710,00	-51.438.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	719.198.300,00	844.905.905,00	125.707.605,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.976.752.737,00	4.182.688.347,00	1.205.935.610,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	424.337.900,00	489.635.400,00	65.297.500,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	68.364.600,00	30.646.200,00	-37.718.400,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.040.572.800,00	1.050.288.000,00	9.715.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	120.504.000,00	120.704.000,00	200.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	85.716.000,00	127.367.950,00	41.651.950,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	24.131.897.500,00	4.215.020.863,00	-19.916.876.637,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	458.327.200,00	2.386.619.240,00	1.928.292.040,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.042.000,00	5.046.800,00	3.004.800,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	103.367.800,00	116.319.200,00	12.951.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.729.924.370,00	2.109.874.452,00	-1.620.049.918,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.720.631.187,00	1.232.104.900,00	-488.526.287,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.177.139.410,00	4.407.814.594,20	-1.769.324.815,80
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	229.222.950,00	158.644.000,00	-70.578.950,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.668.565.300,00	1.340.529.700,00	-328.035.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	914.281.365,00	838.395.400,00	-75.885.965,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	899.366.820,00	1.387.708.600,00	488.341.780,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.501.719.100,00	3.959.657.500,00	-3.542.061.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	462.381.100,00	439.607.400,00	-22.773.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	341.205.800,00	552.965.200,00	211.759.400,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.487.486.800,00	9.307.209.175,00	3.819.722.375,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.510.000,00	108.455.700,00	105.945.700,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.402.273.000,00	26.860.987.735,00	-541.285.265,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	575.133.200,00	575.133.200,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.364.588.570,00	5.266.189.770,00	3.901.601.200,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	420.880.000,00	412.840.000,00	-8.040.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.560.258.008,00	9.404.321.078,00	-155.936.930,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.291.490.000,00	4.611.118.400,00	319.628.400,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	155.610.000,00	194.625.000,00	39.015.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	39.900.000,00	20.300.000,00	-19.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.658.090.000,00	3.810.934.500,00	152.844.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	65.205.000,00	49.680.000,00	-15.525.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	326.750.100,00	77.493.300,00	-249.256.800,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	85.387.500,00	90.045.000,00	4.657.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	55.169.000,00	32.250.000,00	-22.919.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	29.338.300,00	48.735.800,00	19.397.500,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	29.204.300,00	29.204.300,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	134.000,00	19.531.500,00	19.397.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	107.334.162,00	107.334.162,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	27.334.162,00	27.334.162,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	115.863.886.733,00	114.306.700.261,50	-1.557.186.471,50
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.104.777.607,00	70.815.549.523,50	-1.289.228.083,50

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	998.649.950,00	858.370.000,00	-140.279.950,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.120.250.000,00	2.048.270.000,00	-1.071.980.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.206.595.000,00	3.064.035.000,00	-1.142.560.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	90.000.000,00	30.000.000,00	-60.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	535.200.000,00	451.450.000,00	-83.750.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	468.000.000,00	468.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.649.000.000,00	4.622.800.000,00	-26.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.477.795.000,00	4.179.049.000,00	2.701.254.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	60.310.500,00	310.500,00	-60.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.258.800.000,00	1.212.050.000,00	-46.750.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.685.740.000,00	1.701.620.000,00	15.880.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	483.450.000,00	1.180.450.000,00	697.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	299.800.000,00	262.650.000,00	-37.150.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	253.318.150,00	670.890.500,00	417.572.350,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	72.000.000,00	36.000.000,00	-36.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	487.700.000,00	529.350.000,00	41.650.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.705.705.324,00	7.795.558.500,00	-1.910.146.824,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	474.000.000,00	185.000.000,00	-289.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.456.000.000,00	2.700.800.000,00	244.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.663.215.000,00	3.737.089.800,00	73.874.800,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.171.781.100,00	7.198.181.100,00	26.400.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.191.910.200,00	2.442.010.200,00	-749.900.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	386.000.000,00	410.400.000,00	24.400.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	175.350.000,00	152.750.000,00	-22.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	282.000.000,00	208.000.000,00	-74.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.352.000,00	10.352.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.144.728.313,00	6.229.707.532,00	84.979.219,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	227.360.000,00	198.360.000,00	-29.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	21.013.400,00	21.013.400,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.584.019.648,00	1.829.919.648,00	245.900.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	72.000.000,00	97.501.357,00	25.501.357,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	577.831.100,00	693.634.550,00	115.803.450,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.944.863.705,00	4.687.245.181,50	-257.618.523,50
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	711.512.578,00	808.083.216,00	96.570.638,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.890.671.800,00	1.943.815.800,00	53.144.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	936.314.000,00	689.278.000,00	-247.036.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	7.069.279.239,00	6.979.279.239,00	-90.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	41.075.000,00	41.075.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.904.607.226,00	18.108.603.067,00	2.203.995.841,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.640.719.200,00	1.734.396.696,00	93.677.496,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.881.410.400,00	14.849.049.600,00	1.967.639.200,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	752.194.800,00	652.176.000,00	-100.018.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	128.223.655,00	204.883.088,00	76.659.433,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	73.200.000,00	73.200.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	104.340.896,00	229.848.408,00	125.507.512,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	397.718.275,00	365.049.275,00	-32.669.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.719.975.000,00	2.980.707.100,00	-1.739.267.900,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	195.500.000,00	195.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.479.200.000,00	0,00	-1.479.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	768.550.000,00	599.375.000,00	-169.175.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.000.000,00	80.300.500,00	38.300.500,00
5.1.02.02.04.0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	33.459.000,00	66.918.000,00	33.459.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.310.828.000,00	1.356.961.600,00	46.133.600,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	57.550.000,00	40.400.000,00	-17.150.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	583.788.000,00	431.252.000,00	-152.536.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	444.600.000,00	0,00	-444.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.095.700.000,00	1.920.650.000,00	-175.050.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	904.500.000,00	478.800.000,00	-425.700.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.250.000,00	3.750.000,00	-1.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.185.950.000,00	1.423.100.000,00	237.150.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	31.350.000,00	109.300.000,00	77.950.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	53.300.000,00	53.300.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	31.350.000,00	56.000.000,00	24.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.252.484.000,00	14.836.946.571,00	584.462.571,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6.765.000.000,00	7.751.022.546,00	986.022.546,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	395.382.000,00	395.382.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00	399.733.500,00	-266.500,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.752.484.000,00	6.056.308.525,00	-696.175.475,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	185.000.000,00	84.500.000,00	-100.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.527.191.000,00	5.318.302.000,00	-1.208.889.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.226.583.000,00	5.063.194.000,00	-1.163.389.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	174.878.000,00	45.148.000,00	-129.730.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	125.730.000,00	209.960.000,00	84.230.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	27.801.900,00	16.642.000,00	-11.159.900,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	27.801.900,00	16.642.000,00	-11.159.900,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.389.056.215,00	18.036.728.705,64	-4.352.327.509,36
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.944.822.031,00	7.711.917.952,00	-2.232.904.079,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	400.592.343,00	200.296.172,00	-200.296.171,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.952.920.000,00	4.093.292.000,00	-859.628.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000,00	72.000.000,00	32.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.044.063.128,00	1.460.430.000,00	-583.633.128,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.213.756.200,00	870.706.200,00	-343.050.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.480.000,00	16.800.000,00	-1.680.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	62.480.000,00	40.747.300,00	-21.732.700,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.811.500,00	1.920.500,00	-1.891.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	570.664.400,00	357.910.000,00	-212.754.400,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.805.000,00	8.805.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	17.899.060,00	17.899.060,00	0,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	143.371.000,00	143.371.000,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	49.637.720,00	49.637.720,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	339.940.000,00	174.520.000,00	-165.420.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	214.590.000,00	149.880.000,00	-64.710.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	47.625.400,00	43.703.000,00	-3.922.400,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.295.111.013,00	7.332.152.080,64	-2.962.958.932,36

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.086.121.013,00	7.199.979.456,64	-2.886.141.556,36
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	198.990.000,00	98.170.484,00	-100.819.516,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	34.002.140,00	24.002.140,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.961.118.171,00	2.804.653.673,00	843.535.502,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.148.560.851,00	1.997.495.673,00	848.934.822,00
5.1.02.03.04.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	49.637.720,00	0,00	-49.637.720,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	120.640.000,00	120.640.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	422.279.600,00	466.518.000,00	44.238.400,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	188.005.000,00	188.005.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.314.032.805,00	57.885.560.344,00	-4.428.472.461,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.314.032.805,00	57.885.560.344,00	-4.428.472.461,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.886.469.876,00	41.398.572.851,00	-7.487.897.025,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	14.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.559.830.348,00	14.507.637.681,00	3.947.807.333,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	402.744.016,00	394.588.652,00	-8.155.364,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.450.988.565,00	1.577.761.160,00	-873.227.405,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.420.424.800,00	8.025.626.600,00	605.201.800,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.830.872.800,00	2.107.816.600,00	276.943.800,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	835.872.800,00	782.816.600,00	-53.056.200,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	90.000.000,00	520.000.000,00	430.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	905.000.000,00	805.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.589.552.000,00	5.917.810.000,00	328.258.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.474.525.000,00	1.594.025.000,00	119.500.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.115.027.000,00	4.323.785.000,00	208.758.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	37.180.968.651,00	37.180.968.651,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	37.180.968.651,00	37.180.968.651,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	37.180.968.651,00	37.180.968.651,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.748.116.151,00	43.785.830.598,00	18.037.714.447,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.748.116.151,00	43.785.830.598,00	18.037.714.447,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.748.116.151,00	43.785.830.598,00	18.037.714.447,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.009.417.096,00	6.115.981.227,00	106.564.131,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.009.417.096,00	6.115.981.227,00	106.564.131,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	6.009.417.096,00	6.115.981.227,00	106.564.131,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	6.009.417.096,00	6.115.981.227,00	106.564.131,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.076.963.318,00	14.928.501.027,00	-47.148.462.291,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	5.686.626.000,00	3.235.000.000,00	-2.451.626.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.451.626.000,00	0,00	-2.451.626.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.451.626.000,00	0,00	-2.451.626.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	50.545.740.000,00	3.307.403.709,00	-47.238.336.291,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.545.740.000,00	0,00	-50.545.740.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.545.740.000,00	0,00	-50.545.740.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	0,00	3.307.403.709,00	3.307.403.709,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdus Swasta	0,00	3.307.403.709,00	3.307.403.709,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.179.887.318,00	1.179.887.318,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.179.887.318,00	1.179.887.318,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.179.887.318,00	1.179.887.318,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.664.710.000,00	7.206.210.000,00	2.541.500.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.664.710.000,00	4.664.710.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.664.710.000,00	4.664.710.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	2.541.500.000,00	2.541.500.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	2.541.500.000,00	2.541.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	227.927.244.069,15	226.142.620.206,21	-1.784.623.862,94
5.2.01	Belanja Modal Tanah	115.947.129,00	115.947.129,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	115.947.129,00	115.947.129,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	115.947.129,00	115.947.129,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	115.947.129,00	115.947.129,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.489.234.941,00	44.773.163.825,00	9.283.928.884,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.903.676.570,00	3.933.921.100,00	1.030.244.530,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.858.505.670,00	3.914.000.000,00	1.055.494.330,00
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	0,00	2.664.000.000,00	2.664.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.858.505.670,00	1.250.000.000,00	-1.608.505.670,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	45.170.900,00	19.921.100,00	-25.249.800,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	45.170.900,00	19.921.100,00	-25.249.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.604.943.550,00	6.827.471.010,00	2.222.527.460,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.604.943.550,00	6.827.471.010,00	2.222.527.460,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	945.275.550,00	4.969.854.850,00	4.024.579.300,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.256.160.000,00	0,00	-3.256.160.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	1.782.872.160,00	1.782.872.160,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	266.628.000,00	74.744.000,00	-191.884.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	136.880.000,00	0,00	-136.880.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	163.271.700,00	54.955.900,00	-108.315.800,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	61.454.900,00	24.988.900,00	-36.466.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	61.454.900,00	24.988.900,00	-36.466.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	26.750.500,00	17.777.300,00	-8.973.200,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	26.750.500,00	17.777.300,00	-8.973.200,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	75.066.300,00	12.189.700,00	-62.876.600,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	285.200,00	285.200,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	63.201.400,00	0,00	-63.201.400,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	11.904.500,00	11.904.500,00
5.2.02.03.03.0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	11.864.900,00	0,00	-11.864.900,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	31.576.400,00	28.853.100,00	-2.723.300,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	31.576.400,00	28.853.100,00	-2.723.300,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.403.100,00	899.000,00	-1.504.100,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	29.173.300,00	27.954.100,00	-1.219.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.700.710.479,00	11.520.074.671,00	-180.635.808,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	824.387.600,00	266.670.600,00	-557.717.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	636.842.300,00	96.558.900,00	-540.283.400,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	187.545.300,00	170.111.700,00	-17.433.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.805.478.879,00	11.223.898.571,00	418.419.692,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.535.296.264,00	7.505.738.900,00	-1.029.557.364,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.882.900,00	2.123.000,00	-2.759.900,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	646.976.660,00	433.027.120,00	-213.949.540,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	32.847.100,00	137.017.600,00	104.170.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.467.425.555,00	3.066.709.351,00	1.599.283.796,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	118.050.400,00	79.282.600,00	-38.767.800,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	70.844.000,00	29.505.500,00	-41.338.500,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	37.742.400,00	21.230.100,00	-16.512.300,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	33.101.600,00	8.275.400,00	-24.826.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	822.833.912,00	794.706.464,00	-28.127.448,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	233.410.100,00	207.753.290,00	-25.656.810,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.453.000,00	7.453.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	197.921.200,00	180.888.100,00	-17.033.100,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	721.590,00	721.590,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	28.035.900,00	18.690.600,00	-9.345.300,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.017.700,00	35.182.862,00	5.165.162,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	5.165.162,00	5.165.162,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	30.017.700,00	30.017.700,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	559.406.112,00	551.770.312,00	-7.635.800,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	559.406.112,00	551.770.312,00	-7.635.800,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.436.934.500,00	7.356.188.000,00	-80.746.500,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.436.934.500,00	7.356.188.000,00	-80.746.500,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	660.311.100,00	660.311.100,00	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.689.793.700,00	3.689.793.700,00	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	41.507.700,00	41.507.700,00	0,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	189.600.000,00	189.600.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	329.528.700,00	248.782.200,00	-80.746.500,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	122.270.300,00	122.270.300,00	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.403.923.000,00	2.403.923.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.676.890.800,00	1.440.464.099,00	-236.426.701,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	229.452.200,00	262.817.200,00	33.365.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	229.452.200,00	262.817.200,00	33.365.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.447.438.600,00	1.163.047.000,00	-284.391.600,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	649.944.000,00	0,00	-649.944.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	626.494.600,00	992.047.000,00	365.552.400,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	14.599.899,00	14.599.899,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	14.599.899,00	14.599.899,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.609.536.362,00	3.932.604.061,00	-676.932.301,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.540.098.560,00	3.274.759.600,00	-265.338.960,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.031.994.860,00	2.816.664.800,00	-215.330.060,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	508.103.700,00	458.094.800,00	-50.008.900,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.069.437.802,00	657.844.461,00	-411.593.341,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	755.797.400,00	442.709.275,00	-313.088.125,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	307.195.002,00	133.312.750,00	-173.882.252,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	928.400,00	8.817.904,00	7.889.504,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.517.000,00	73.004.532,00	67.487.532,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.460.000,00	2.230.000,00	-2.230.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.460.000,00	2.230.000,00	-2.230.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.460.000,00	2.230.000,00	-2.230.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	84.872.800,00	84.872.800,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	84.872.800,00	84.872.800,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	14.956.800,00	14.956.800,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	69.916.000,00	69.916.000,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	162.301.500,00	175.121.400,00	12.819.900,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	162.301.500,00	175.121.400,00	12.819.900,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	26.607.300,00	69.009.300,00	42.402.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	135.694.200,00	106.112.100,00	-29.582.100,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	4.025.054.410,00	4.025.054.410,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	4.025.054.410,00	4.025.054.410,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	4.025.054.410,00	4.025.054.410,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.287.226.368,00	4.596.646.810,00	3.309.420.442,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.287.226.368,00	4.596.646.810,00	3.309.420.442,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.287.226.368,00	4.596.646.810,00	3.309.420.442,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.785.800.372,00	58.202.109.963,00	3.416.309.591,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	40.588.943.772,00	44.928.442.309,00	4.339.498.537,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.588.943.772,00	44.928.442.309,00	4.339.498.537,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.737.340.759,00	22.776.031.764,00	4.038.691.005,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.105.360.300,00	7.105.360.300,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.703.181.700,00	11.032.709.300,00	-670.472.400,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.963.860,00	0,00	-15.963.860,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.849.988.810,00	2.683.025.727,00	833.036.917,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	156.400.000,00	156.400.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.020.708.343,00	1.174.915.218,00	154.206.875,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.696.856.600,00	13.023.667.654,00	-673.188.946,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	13.696.856.600,00	13.023.667.654,00	-673.188.946,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	142.153.200,00	142.960.160,00	806.960,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	13.554.703.400,00	12.880.707.494,00	-673.995.906,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	136.820.807.727,15	116.463.051.459,21	-20.357.756.267,94
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	101.229.770.577,15	89.626.183.236,21	-11.603.587.340,94
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	95.250.833.318,15	82.218.864.552,21	-13.031.968.765,94
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	86.698.689.318,15	81.847.264.227,21	-4.851.425.090,94
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	8.552.144.000,00	371.600.325,00	-8.180.543.675,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.978.937.259,00	7.407.318.684,00	1.428.381.425,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	5.978.937.259,00	7.407.318.684,00	1.428.381.425,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.920.907.150,00	9.357.970.977,00	-8.562.936.173,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.059.822.150,00	3.685.988.602,00	-373.833.548,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	599.815.110,00	0,00	-599.815.110,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.460.007.040,00	2.483.578.440,00	23.571.400,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.000.000.000,00	1.074.910.162,00	74.910.162,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.241.140.000,00	1.241.140.000,00	0,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	1.241.140.000,00	1.241.140.000,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	12.619.945.000,00	4.430.842.375,00	-8.189.102.625,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	12.345.945.000,00	3.707.482.375,00	-8.638.462.625,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	274.000.000,00	723.360.000,00	449.360.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	17.670.130.000,00	17.478.897.246,00	-191.232.754,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	12.112.100.000,00	12.112.100.000,00	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	12.112.100.000,00	12.112.100.000,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.558.030.000,00	5.366.797.246,00	-191.232.754,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.558.030.000,00	5.366.797.246,00	-191.232.754,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	715.453.900,00	6.588.347.830,00	5.872.893.930,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	634.873.100,00	432.776.400,00	-202.096.700,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	634.873.100,00	432.776.400,00	-202.096.700,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	271.438.000,00	265.969.000,00	-5.469.000,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	3.400.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	6.560.000,00	3.280.000,00	-3.280.000,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	3.400.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	9.240.000,00	4.620.000,00	-4.620.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	3.400.000,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	199.726.100,00	16.098.400,00	-183.627.700,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	137.709.000,00	137.709.000,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	27.308.800,00	62.211.200,00	34.902.400,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	48.397.400,00	48.397.400,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	48.397.400,00	48.397.400,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	27.308.800,00	13.813.800,00	-13.495.000,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	27.308.800,00	13.813.800,00	-13.495.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.2.05.03.02.0003	Belanja Modal Ternak Unggas	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	772.000,00	8.547.000,00	7.775.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	772.000,00	8.547.000,00	7.775.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	772.000,00	8.547.000,00	7.775.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	6.032.313.230,00	6.032.313.230,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0,00	6.032.313.230,00	6.032.313.230,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	6.032.313.230,00	6.032.313.230,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.483.769.081,00	-516.230.919,00
5.4	BELANJA TRANSFER	206.426.546.677,00	208.443.966.075,00	2.017.419.398,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.537.580.677,00	2.776.726.075,00	-4.760.854.602,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.787.657.555,00	2.594.609.347,00	-1.193.048.208,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.787.657.555,00	2.594.609.347,00	-1.193.048.208,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.787.657.555,00	2.594.609.347,00	-1.193.048.208,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.749.923.122,00	182.116.728,00	-3.567.806.394,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.749.923.122,00	182.116.728,00	-3.567.806.394,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.749.923.122,00	182.116.728,00	-3.567.806.394,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	198.888.966.000,00	205.667.240.000,00	6.778.274.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	198.888.966.000,00	205.667.240.000,00	6.778.274.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	198.888.966.000,00	205.667.240.000,00	6.778.274.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	12.200.000.000,00	20.740.000.000,00	8.540.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	113.656.525.000,00	113.656.525.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	73.032.441.000,00	71.270.715.000,00	-1.761.726.000,00
	Jumlah Belanja	1.279.880.364.573,00	1.286.724.178.239,94	6.843.813.666,94
	Total Surplus/(Defisit)	-39.280.577.099,00	-64.887.303.265,84	-25.606.726.166,84
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.272.805.315,00	84.879.531.481,84	25.606.726.166,84
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.272.805.315,00	84.879.531.481,84	25.606.726.166,84
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	59.272.805.315,00	39.564.412.426,80	-19.708.392.888,20

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	59.272.805.315,00	39.564.412.426,80	-19.708.392.888,20
6.1.01.02.01.0146	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	881.285.442,00	881.285.442,00
6.1.01.02.01.0189	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit	0,00	875.147.459,80	875.147.459,80
6.1.01.02.01.0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	59.272.805.315,00	0,00	-59.272.805.315,00
6.1.01.02.01.0191	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	86.739.450,00	86.739.450,00
6.1.01.02.01.0193	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	10.890.042.192,00	10.890.042.192,00
6.1.01.02.01.0194	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	12.716.612.372,00	12.716.612.372,00
6.1.01.02.01.0195	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	3.746.029.604,00	3.746.029.604,00
6.1.01.02.01.0196	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	96.976.581,00	96.976.581,00
6.1.01.02.01.0198	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	865.725.648,00	865.725.648,00
6.1.01.02.01.0226	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	390.500,00	390.500,00
6.1.01.02.01.0228	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	4.645.980,00	4.645.980,00
6.1.01.02.01.0233	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	11.027.858,00	11.027.858,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01.0236	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	98.961.000,00	98.961.000,00
6.1.01.02.01.0239	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	5.282.600,00	5.282.600,00
6.1.01.02.01.0241	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	78.800,00	78.800,00
6.1.01.02.01.0252	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	45.710.600,00	45.710.600,00
6.1.01.02.01.0286	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	181.666.313,00	181.666.313,00
6.1.01.02.01.0300	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	699.505.861,00	699.505.861,00
6.1.01.02.01.0301	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00
6.1.01.02.01.0302	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	4.378.625.600,00	4.378.625.600,00
6.1.01.02.01.0307	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	1.496.699.472,00	1.496.699.472,00
6.1.01.02.01.0311	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	102.297.448,00	102.297.448,00
6.1.01.02.01.0316	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	130.129.600,00	130.129.600,00
6.1.01.02.01.0319	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	6.902.110,00	6.902.110,00
6.1.01.02.01.0331	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	2.113.735.112,00	2.113.735.112,00
6.1.01.02.01.0336	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00	82.944.824,00	82.944.824,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	24.533.453.000,00	24.533.453.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	1.976.095.198,00	1.976.095.198,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	596.000.000,00	596.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00	596.000.000,00	596.000.000,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	1.380.095.198,00	1.380.095.198,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	1.380.095.198,00	1.380.095.198,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	18.805.570.857,04	18.805.570.857,04
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	18.757.890.418,95	18.757.890.418,95
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	18.757.890.418,95	18.757.890.418,95
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	47.680.438,09	47.680.438,09
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	46.139.619,09	46.139.619,09
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	1.540.819,00	1.540.819,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	59.272.805.315,00	84.879.531.481,84	25.606.726.166,84
37774	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.992.228.216,00	19.992.228.216,00	0,00
	Pembiayaan Netto	39.280.577.099,00	64.887.303.265,84	25.606.726.166,84
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo Tahun 2025

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tebo yang merupakan Indikator Kinerja Utama Makro sebagai bentuk akuntabilitas kinerja terhadap ketercapaian penyelenggaraan fungsi semua urusan. Melalui telaahan terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil pengendalian yang dilakukan secara berkala serta memperhatikan isu-isu nasional dan global maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terdiri dari **232 program, 402 kegiatan** dan **562 sub kegiatan** yang dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat capaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo.

Secara umum rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian IK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran kualitatif. Ia menggunakan urutan tertentu guna memberi peringkat, dan efektif untuk data yang memerlukan urutan ketika melakukan evaluasi. Skala ordinal mengukur data yang bersifat non-numerik dan nilai intervalnya tidak diketahui, sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>95-100	Sangat Baik (SB)
2	>80-95	Baik (B)
3	>55-80	Cukup (C)
4	>0-55	Kurang (K)

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaian kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029, pada Tahun 2025 terdapat 6 (enam) IKU Kabupaten yang keberhasilan kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Indikator Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	2024	2025			Perbandingan Capaian 2023-2024	Capaian 2024 terhadap Target
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	$8=(6-4)/4 \times 100$	9=7
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.32	70.15	73.41	104.65	2.09	Sangat Baik
2	Tingkat Kemiskinan	%	6.12	5.94	5.97	100.51	-0.15	Sangat Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1.93	2.55	2.21	86.67	0.28	Sangat Baik
4	Indeks Gini	Poin	0.257	0.275	0.248*	90.18*	-0.01*	Sangat Baik
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4.15	4.8	5.23	108.96	1.08	Sangat Baik
6	PDRB Per Kapita	Juta	67.39	48.65	67.39	138.52	0.00	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian Tahun 2025					104.91		Sangat Baik

Sumber : DATA BPS 2025 *indeks Gini angka sementara

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat terlihat bahwa secara rata-rata capaian kinerja Indikator Makro Pemerintah Kabupaten Tebo pada Tahun 2025 terhadap target tahun 2025 termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan angka rata-rata capaian sebesar **104,91 persen**. Dari 6 indikator makro, 4 indikator diantaranya capaiannya melebihi target.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selama tiga tahun terakhir angka IPM Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tebo semakin baik. Sesuai berita resmi Statistik BPS Kab. Tebo Desember 2025 pada tahun 2025 IPM Kabupaten Tebo sebesar 73,41, meningkat 0,74 poin dibanding tahun 2024, yakni 71,32, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo
di Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		2024	2025
1	PROVINSI JAMBI	74,36	75.13
2	KERINCI	74,33	75.1
3	MERANGIN	72,65	73.41
4	SAROLANGUN	73,76	74.72
5	BATANGHARI	73,12	73.94
6	MUARO JAMBI	73,11	73.87
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	70,77	71.28
8	TANJUNG JABUNG BARAT	72,01	73
9	TEBO	71.32	73.41
10	BUNGO	74,44	75.15
11	KOTA JAMBI	81,77	82.32
12	KOTA SUNGAI PENUH	77,93	78.89

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Tebo Desember 2025



Peningkatan IPM Kabupaten Tebo tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi standar hidup layak lebih cepat dari dimensi lainnya.

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH)

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,60 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Tebo adalah 73,02 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 73,88 Tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,86 tahun (0,23 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2025 (0,20 persen per tahun).

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Kabupaten Tebo rata-rata meningkat 0,64 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,46 persen per tahun. HLS tahun 2025 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2024, sedangkan RLS meningkat 0,10 tahun (1,24 persen).

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada Tahun 2025, Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan masyarakat Tebo mencapai Rp11,791 juta. Capaian ini meningkat 376 ribu rupiah (1,03 persen) dibandingkan tahun

sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 yang sebesar 1,57 persen per tahun.

Tabel.3.4
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tebo 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,45	73,62	73.88
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,92	12.93	13.20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,94	8.04	8.05
Pengeluaran/Kapita/Tahun (ribu rupiah)	10.894	11,415	11.791
IPM	71,99	71,32	73.41

Sumber : BPS Kab. Tebo Tahun 2025

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Selama periode Tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tebo berkurang sebanyak 380 jiwa, dari 22.480 jiwa pada Tahun 2024 menjadi 22.100 jiwa pada tahun 2025 atau mengalami penurunan sebesar 1,69 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan apabila dilihat dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Tebo, dalam rentang waktu satu tahun terjadi penurunan sebesar 2,51 persen dari 6,12 persen pada tahun 2024 turun menjadi 5,97 persen pada Tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan ini dianggap sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penurunan ini juga harus dilihat dalam konteks peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut. Garis kemiskinan di Kabupaten Tebo Tahun 2025 naik dari Rp 590.573 per kapita per bulan pada Tahun 2024 menjadi Rp 602.105 per kapita per bulan di Tahun 2025. Peningkatan garis kemiskinan ini disebabkan oleh

terjadinya kenaikan harga barang pokok di daerah tersebut, yang terutama dipengaruhi oleh inflasi.

Penetapan garis kemiskinan ini berdasarkan harga barang pokok di daerah tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tebo memang mengalami kenaikan harga barang, terutama saat inflasi. Meskipun ada penurunan persentase angka kemiskinan, masyarakat di Kabupaten Tebo tetap harus menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya hidup yang tercermin dari kenaikan garis kemiskinan. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten, maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tebo menurut Provinsi Tahun 2025.

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi,
2024–2025

Kabupaten/Kota	2024	2025
	persen	persen
1	2	3
Kerinci	2,51	2.39
Merangin	4,18	3.90
Sarolangun	5,03	4.68
Batanghari	4,49	4.21
Muaro Jambi	5,27	5.02
Tanjung Jabung Timur	2,06	2.00
Tanjung Jabung Barat	3,20	3.12
Tebo	1.93	2.21
Bungo	4,67	4.33
Kota Jambi	7,38	7.08
Kota Sungai Penuh	4,30	4.09
Provinsi Jambi	4,48	4.26

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Tebo Desember 2025



Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tebo pada tahun 2025 terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024. Data terbaru mencatat angka pengangguran 2.21 persen, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya di angka 1.93 persen atau naik sebesar 1.15 persen. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan beberapa perusahaan yang merumahkan karyawan yang disebabkan karena perusahaan tidak beroperasi lagi dan habisnya masa kontrak karyawan di perusahaan. Kebijakan tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Tebo.

4. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Berdasarkan data sementara dari BPS, Indeks Gini Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebesar 0,248 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang berada di angka 0,257 atau menurun sebesar 0,009 poin. Dengan angka tersebut, Kabupaten Tebo menjadi kabupaten dengan angka indeks gini terendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Jambi trend ini terjadi sama halnya pada tahun 2024. Dari target yang ditetapkan Tahun 2024, di angka 0,275, target tersebut tercapai dengan persentase capaian sebesar 110,89 Persen. Angka indeks gini Kabupaten/Kota Tahun 2025 belum dirilis dan masih mengacu pada angka sementara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.6
Indeks Gini Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	2024
1	Kerinci	0.293
2	Merangin	0.241
3	Sarolangun	0.286
4	Batang Hari	0.312
5	Muaro Jambi	0.295
6	Tanjab Timur	0.305
7	Tanjab Barat	0.292
8	Tebo	0.248
9	Bungo	0.266
10	Kota Jambi	0.395
11	Sungai Penuh	0.305

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2025

Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Tebo meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara menyeluruh, yang diharapkan pembangunan merata tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah yang masih terpencil.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan data dari BPS Kab. Tebo, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2025 mencapai 5.23%. Pertumbuhan tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2024 yaitu 4,15% atau 1.26 %, dengan demikian, secara persentase capaian tersebut merupakan capaian dalam kategori **Sangat Baik**. Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 56.73% dari total pertumbuhan regional.

6. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Semakin meningkat

PDRB setiap tahunnya, mencerminkan semakin pesat pula arus perekonomian di suatu wilayah tersebut. Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar yang biasa disebut dengan harga konstan.

Perhitungan nilai PDRB dengan harga berlaku disebut dengan nilai PDRB nominal, sedangkan perhitungan PDRB dengan harga konstan disebut dengan nilai PDRB Riil. PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga berlaku tahun 2025 yaitu sebesar Rp**24.823,830,000** juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga konstan 2024 adalah sebesar Rp**12.917,990,000** juta. Perkembangan PDRB Kabupaten Tebo disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2021-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.113,99	10.131,35	10.878,47	12.152,26	13.306,25
B	Pertambangan dan Penggalian	858,15	2.070,53	1.941,62	1.606,79	1.721,57
C	Industri Pengolahan	1.018,56	1.126,00	1.209,72	1.360,41	1.602,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,04	15,87	18,44	20,89	22,26
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,99	7,50	8,17	9,66	10,80
F	Konstruksi	1.130,41	1.158,08	1.258,06	1.332,66	1.305,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.748,98	1.948,20	2.242,44	2.579,16	2.880,29
H	Transportasi dan Pergudangan	212,69	244,02	285,73	313,10	353,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,24	60,13	65,84	70,65	75,54
J	Informasi dan Komunikasi	665,11	716,90	766,65	807,34	851,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	226,27	243,19	251,13	260,08	273,64
L	Real Estat	317,84	351,57	368,02	382,13	390,52
M,N	Jasa Perusahaan	9,35	11,00	13,09	15,30	16,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	751,87	757,97	767,72	864,89	905,39
P	Jasa Pendidikan	392,39	406,00	422,74	476,29	512,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	185,58	187,26	202,41	221,04	238,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	241,83	263,39	290,42	321,62	357,48
	Produk Domestik Regional Bruto	16.949,29	19.698,96	20.990,66	22.794,27	24.823,83

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka tahun 2026 *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 3.8
Produk Domestik Regionla Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2022-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.505,23	5.646,90	5.913,12	6.187,21	6.515,29
B	Pertambangan dan Penggalian	936,27	1.325,26	1.353,03	1.229,16	1.292,67
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	662,09	675,66	715,37	773,35	858,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,99	7,60	8,53	9,41	10,19
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,77	4,85	5,02	5,61	6,09
F	Konstruksi	746,91	747,00	785,25	822,10	800,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	881,85	928,39	1.007,85	1.108,80	1.198,78
H	Transportasi dan Pergudangan	157,59	171,01	183,53	199,87	225,16
I	Penyediaan Akomodasidan Makan Minum	39,42	42,38	46,02	49,03	50,49
J	Informasi dan Komunikasi	443,87	478,22	513,79	538,07	564,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	137,49	137,95	138,83	141,63	146,73
L	Real Estat	193,93	204,05	210,32	214,44	219,87
M,N	Jasa Perusahaan	5,70	6,18	7,05	7,79	8,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	325,38	327,27	327,57	361,41	359,01
P	Jasa Pendidikan	242,85	245,69	249,19	279,43	294,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	115,07	114,46	119,93	128,56	134,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya	188,55	197,67	202,82	220,14	232,40
Produk Domestik Regional Bruto		10.593,96	11.260,53	11.787,21	12.276,02	12.917,99

Sumber : Kabupaten Tebo Dalam Angka tahun 2026 *angka sementara **angka sangat sementara

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Perangkat Daerah di ukur berdasarkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam rencana strategis masing-masing perangkat daerah, dimana indikator sasaran tersebut harus selaras untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Berikut ini Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2025.

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

Nama SKPD		Sasaran Strategis	IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2		3	4	5	6	7	8
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Tahun	0.61	0.635	104
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.62	8.05	106
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.67	13.2	104
			Persentase Pelestarian warisan Budaya	Persen	98.08	98.076	100
Dinas Kesehatan	1	Menurunnya Angka Kematian, Kesakitan dan Stunting	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Tahun	2.30	10.48	456
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Tahun	95.00	74.86	79
			Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Tahun	232.42	129.33	56
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (per 100.000 penduduk)	Tahun	20.74	20.96	101
RSUD STS	1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60.50	58.42	96.56%
			Net Death Rate (NDR)	per mill	18.00	13.87	77.06%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79.15	86.95	109.85%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	20.45	24.00	117.36%
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	69.33	71.74	103.48%
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	88.26	89.24	101.11%
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	0.0192		
			Persentase bangunan dan prasarana pendukung kawasan milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	70	175.00	250.00%
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	20.27	68.14	336.16%
			Jumlah Ketersediaan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang yang di sahkan	Angka	1	1.00	100.00%
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0.01	1.08	108.00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	216	28.00	77,142.86
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	93.81	93.21	99.36%

	2	Meningkatkan Fasilitas Legalitas Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan atas Tanah	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	67.35	63.27	93.94%
			Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	3.6583	3.6572	99.97%
			Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6.19	6.79	109.69%
			Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	71.09	70.65	99.38%
			Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	10.2	-	0.00%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	129.89	129.89	100
	2	Respon Time Penetapan Status Darurat Bencana kurang dari 24 jam	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100	100
			Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.24	0.24	100
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar	Daerah	80	80	100%
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan	Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)	Menit	15	15	100%
Satuan Polisi Pamong Praja		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	92.89	97.63	105.10%
			persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100.00	100.00%
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	750.00	601.20	80.16%
	2	Meningkatnya sumber daya berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51.76	58.35	112.73%
			Persentase PPKS yang tertangani	Persen	48	42.74	89.04%
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	38	11.96	31.47%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan produktivitas komoditas unggulan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Nilai	71.72	72.09	100.52%
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	10.97	11.03	100.55%
	2	Meningkatkan produksi perikanan	Peningkatan jumlah produksi perikanan (Ton)	Ton	1.001,64	1.047,12	104.54%
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan		Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan serta Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air	Indeks	53	68.64	103,77
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	89.02	79.79	104,65
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks	50.63	66.31	84,89

			Persentase Pengelolaan Sampah	%	7.5	40.30	292,40	
		Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Layanan Distribusi Transportasi darat	%	75	87,50	116,67	
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Keselamatan dan Keamanan Transportasi	%	86	66.23	76,48	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Meningkatnya kepemilikan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	86	90.05	104.71%	
			Perekaman KTP elektronik	%	99.5	98.4	98.89%	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	57	58.7	102.98%	
			Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Persentase	9	9.01	100.11%	
			Kepemilikan akta kelahiran	%	98.37	98.35	99.98%	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen	85	85	100	
	2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi desa	Persentase Kapasitas Kelembagaan yang Berkembang	Persen	70	70	100	
	3	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa	Persentase Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persen	60	65	108	
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebaran informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	1. Persentase Layanan Publik Yang di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	60	100.00	166.67%	
			2. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Kominfo	Persen	35	82.93	236.94%	
			3. Persentase Desiminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	Persen	85	94.42	111.08%	
			4. Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	25	56.54	226.16%	
	2	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah	1. Persentase Data Statistik Sektoral	Persen	22	22.18	100.82%	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya IKM yang naik skala usaha	1. Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	%	2.75	7.25	263.64	
	2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Persentase barang yang memenuhi standar kesehatan dan halal	%	3.56	3.68	103.4	
	3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Persentase Koperasi yang aktif yang melaksanakan RAT	%	48	30	62.5	
			2. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0.2	0.27	135	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	1. Persentase Peningkatan Investasi Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Persen 2. Nilai	1. 5 2. 93	1. -45,64 2. 94,71		

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional terhadap Ajang yang diikuti 3. Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata berbasis Pemberdayaan dan Masyarakat	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan 2. Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	1. % 2.% 3.Orang	1. 3 2. 2 3. 337.944	1. 6,42% 2. - 3. 338.932		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	44.62			
	2	Meningkatnya pengelolaan arsip yang baik dan benar	2. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik dan benar	%	25%	32%	128%	
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan per hektar per tahun	Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun (Tanaman Pangan)	Ton	45500	39817,26	87.51%	
			Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun (Hortikultura)	Ton	8,572.354	11,743.88	136.99%	
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan tanaman perkebunan	%	0.3	1.00	333.3	
	2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	2	1.05	52.5	
Sekretariat Daerah		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	7	233%	
			2. Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	-	-			
Sekretariat DPRD		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Persentase Prolegda yang berhasil	%	85%	85%	100 %	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	%	92	113.45	123.32	
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Perangkat Daerah	%	112.95	198.75	175.96	
			Rata-Rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Perangkat Daerah		99.25	101.89	102.66	
		Menguatnya Fungsi Kelitbangan dalam Mendukung Perencanaan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		70	100	142.86	
			Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah		73.15	90.77	124.09	
			Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Tebo		Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	
Badan Keuangan Daerah	1	Mewujudkan Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel	Persentase Serapan Belanja Daerah	%	93,00%	95,79%	103,00%	
			Ketepatan waktu penyampaian LKPD Kabupaten Tebo		Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	
	2	Mewujudkan penatausahaan barang milik daerah yang tertib	Ketepatan waktu penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)		Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	
	3	Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase capaian pendapatan daerah	%	90,00%	116,49%	129,43%	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	1	Meningkatkan kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN	%	16	17,23	107,68	

Daya Manusia								
	2	Meningkatkan kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN	%	90,75	84,80	93,44	
			Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	%	80,5	80,97	100,58	
Inspektorat Daerah	1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	2,23	74.33%	
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,2	3,175	99.22%	
			Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	3	2,892.000	96.40%	
Kecamatan Tebo Tengah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	82	100.00	121,95%	
Kecamatan Tebo Ilir		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	69	85.00	123.19	
			Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	100	100.00	
Kecamatan Tebo Ulu		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	82	87.50	107%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		85	85.09	100%	
Kecamatan Rimbo Bujang		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	68	85	125%	
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85	85	100%	
Kecamatan Sumay		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Angka	90	85	90.00	
			Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	80	85	85.00	
Kecamatan VII Koto		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	69		92.00	
			Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100		92.00	
Kecamatan Rimbo Ulu		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	83	81.78	98.53	
			Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	85	85.00	100.00	
Kecamatan Rimbo Ilir		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	85	83.00	97,64	
Kecamatan Tengah Ilir		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	83	83,5	100.00	
Kecamatan Serai Serumpun		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintahan kecamatan	Angka	83,5	83,5	100.00	
			Nilai Sakip	Angka	52			
Kecamatan VII Koto Ilir		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	indek kepuasan masyarakat di kecamatan	%	100		90.00	
Kecamatan Muara Tabir		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	90	77.00		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Persentase Jumlah Konflik yang terjadi dan terselesaikan	%	85	89.00	105	
			Tingkat partisipasi politik masyarakat	%	75	-		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.45	2.21	0.90	
		Menekan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Tenaga Kerja yang diberikan Pelatihan	%	0.25	0.51	2.04	
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	1.34	0.063	4.70	

	Meningkatnya Kapasitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	78.83	70.00	88.80	
		Persentase perusahaan yang menyusun peraturan dan perjanjian kerja	%	38.46	32.00	83.20	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan meningkatnya kualitas Pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,50	66,8	105	
		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	63,44			
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	orang	2,34	2,43	98.31	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	orang	35,1	30,6	87.17	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,25	69,6	99.07	
	Jumlah Rata-rata					87.67	

Sumber : Data Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang terdiri dari 41 Perangkat Daerah memiliki Rata-rata capaian Keseluruhan sebesar **87.67** persen dengan kategori **Baik**

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2025 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, terbagi dalam 8 bagian Urusan dengan total Anggaran sebesar **Rp1,283,945,623,239.94**, dan terealisasi sebesar **Rp1,225,285,490,211.81**, atau dengan capaian sebesar **95,43** persen dengan kategori **Sangat Baik** sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.10
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	796,087,059,827.94	769,751,689,138.98	96,69
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66,358,411,562.00	62,091,390,495.36	93,57
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21,553,907,022.00	20,002,463,698.66	92,80
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	95,029,811,490.00	89,245,658,061.07	93,91
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	253,439,889,882.00	236,289,095,650.00	93,23
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10,576,764,778.00	9,958,413,842.00	94,15
7	UNSUR KEWILAYAHAN	35,671,426,314.00	32,960,801,818.74	92,40
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5,228,352,364.00	4,985,977,507.00	95,36
	JUMLAH	1,283,945,623,239.94	1,225,285,490,211.81	95.43

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terbagi lagi menjadi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Selanjutnya semua urusan tersebut tersebar di 9 (sembilan) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp796,087,059,827.94,-** dan terealisasi sebesar **Rp769,751,689,138.98,-** atau **96.69**, adapun rincian realisasi masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.11
Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penjelasan terkait kebijakan ada pada Sub BAB 3.2		796,087,059,827.94	769,751,689,138.98	96.69			Penjelasan terkait kebijakan ada pada Sub BAB 3.3
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				325,823,547,769.00	318,907,601,215.00	97.88			
1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			325,823,547,769.00	318,907,601,215.00	97.88			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220,711,138,617.00	215,750,631,181.00	97.75			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396,000,000.00	391,407,900.00	98.84			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95,000,000.00	94,667,600.00	99.65			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,000,000.00	13,967,800.00	99.77			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13,000,000.00	12,954,300.00	99.65			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19,500,000.00	19,451,500.00	99.75			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19,000,000.00	14,926,700.00	78.56			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200,000,000.00	199,940,000.00	99.97			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,500,000.00	35,500,000.00	100.00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	217,330,125,451.50	212,604,085,184.00	97.83			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	217,310,125,451.50	212,584,085,184.00	97.83			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,000,000.00	28,098,500.00	93.66			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	28,098,500.00	93.66			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,000,000.00	43,937,430.00	97.64			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000.00	43,937,430.00	97.64			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	481,622,211.00	430,782,599.00	89.44			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26,000,000.00	25,988,600.00	99.96			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,500,000.00	65,312,100.00	99.71			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,998,200.00	94,997,800.00	100.00			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00	49,995,700.00	99.99			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95,124,011.00	44,743,930.00	47.04			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,000,000.00	131,744,469.00	99.81			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,009,798,054.50	1,867,904,946.00	92.94			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	792,920,900.00	787,014,912.00	99.26			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154,659,554.50	138,606,334.00	89.62			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,062,217,600.00	942,283,700.00	88.71			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418,592,900.00	384,414,622.00	91.83			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293,594,700.00	282,578,622.00	96.25			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124,998,200.00	101,836,000.00	81.47			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101,428,384,752.00	99,817,807,920.00	98.41			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72,256,645,794.00	71,316,506,875.00	98.70			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	10,000,000.00	8,395,400.00	83.95			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7,211,632,245.00	7,178,538,241.00	99.54			
				Pengadaan Mebel Sekolah	4,500,000,000.00	4,493,629,941.00	99.86			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	359,999,825.00	295,797,012.00	82.17			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,588,066,800.00	1,588,023,118.00	100.00			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150,500,000.00	146,664,000.00	97.45			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50,545,740,000.00	49,799,249,321.00	98.52			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200,000,000.00	199,980,000.00	99.99			
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	4,916,775,400.00	4,899,397,030.00	99.65			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50,000,000.00	8,292,400.00	16.58			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,623,931,524.00	1,616,864,979.00	99.56			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1,000,000,000.00	981,675,433.00	98.17			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,456,780,790.00	9,191,052,146.00	97.19			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,741,925,500.00	2,727,803,622.00	99.48			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	357,326,600.00	300,446,350.00	84.08			
				Pengadaan Mebel Sekolah	1,036,532,990.00	1,031,018,156.00	99.47			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	400,000,000.00	383,651,175.00	95.91			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	199,999,700.00	160,296,200.00	80.15			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,787,081,200.00	1,783,729,060.00	99.81			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	180,000,000.00	117,548,285.00	65.30			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60,000,000.00	602,000.00	1.00			
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,243,922,300.00	2,237,963,598.00	99.73			
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100,000,000.00	99,604,000.00	99.60			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	199,992,500.00	198,389,700.00	99.20			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14,386,353,821.00	14,186,035,281.00	98.61			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4,560,996,000.00	4,535,710,105.00	99.45			
				Pengadaan Mebel PAUD	397,612,900.00	378,914,000.00	95.30			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	232,442,000.00	169,361,180.00	72.86			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1,899,999,800.00	1,876,231,200.00	98.75			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1,040,143,700.00	1,038,402,050.00	99.83			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	391,994,400.00	377,237,889.00	96.24			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,699,800,000.00	4,663,062,543.00	99.22			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	158,000,000.00	156,902,000.00	99.31			
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	52,349,600.00	52,349,600.00	100.00			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	518,697,471.00	513,827,380.00	99.06			
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	434,317,950.00	424,037,334.00	97.63			
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,328,604,347.00	5,124,213,618.00	96.16			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,160,000,000.00	1,154,548,500.00	99.53			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,049,996,600.00	860,860,300.00	81.99			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,636,660,000.00	2,635,183,143.00	99.94			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80,000,000.00	74,392,500.00	92.99			
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	130,000,000.00	129,695,175.00	99.77			
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	246,925,300.00	244,531,600.00	99.03			
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25,022,447.00	25,002,400.00	99.92			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	418,524,400.00	343,016,900.00	81.96			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	103,906,900.00	81,512,900.00	78.45			
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	103,906,900.00	81,512,900.00	78.45			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	314,617,500.00	261,504,000.00	83.12			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	264,617,500.00	211,762,000.00	80.03			
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50,000,000.00	49,742,000.00	99.48			
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,215,500,000.00	2,946,673,614.00	91.64			
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,215,500,000.00	2,946,673,614.00	91.64			
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,215,500,000.00	2,946,673,614.00	91.64			
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50,000,000.00	49,471,600.00	98.94			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000.00	49,471,600.00	98.94			
				Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50,000,000.00	49,471,600.00	98.94			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				228,829,146,386.00	216,650,241,462.60	94.68			
2		Dinas Kesehatan			132,412,611,125.00	125,767,129,388.60	94.98			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80,957,585,450.00	77,432,069,152.60	95.65			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,000,000.00	8,844,210.00	98.27			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,000,000.00	8,844,210.00	98.27			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57,084,121,754.00	55,622,583,497.00	97.44			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56,689,899,754.00	55,251,391,708.00	97.46			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	394,222,000.00	371,191,789.00	94.16			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72,680,000.00	71,808,100.00	98.80			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72,680,000.00	71,808,100.00	98.80			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,000,000.00	-	0.00			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6,000,000.00	-	0.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	22,144,341.00	13,899,319.00	62.77			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,906,000.00	-	0.00			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,912,000.00	-	0.00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,714,841.00	3,370,524.00	43.69			
				Penyediaan Bahan/Material	10,611,500.00	10,528,795.00	99.22			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,840,953,900.00	1,748,541,219.00	94.98			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454,197,900.00	453,791,219.00	99.91			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,386,756,000.00	1,294,750,000.00	93.37			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696,731,500.00	563,843,796.00	80.93			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	696,731,500.00	563,843,796.00	80.93			
				Peningkatan Pelayanan BLUD	21,225,953,955.00	19,402,549,011.60	91.41			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21,225,953,955.00	19,402,549,011.60	91.41			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49,794,316,058.00	46,924,061,656.00	94.24			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,877,179,735.00	15,724,122,671.00	99.04			
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,806,851,000.00	1,801,225,900.00	99.69			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	171,093,500.00	170,529,600.00	99.67			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,904,595,732.00	3,877,909,012.00	99.32			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	193,008,720.00	149,702,188.00	77.56			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9,678,522,783.00	9,660,004,261.00	99.81			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	123,108,000.00	64,751,710.00	52.60			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33,695,719,324.00	31,030,516,043.00	92.09			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,192,125,500.00	1,172,641,469.00	98.37			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	256,109,000.00	204,975,325.00	80.03			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	59,500,000.00	56,839,160.00	95.53			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	41,741,800.00	33,791,922.00	80.95			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	881,526,200.00	862,540,000.00	97.85			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55,385,800.00	28,276,400.00	51.05			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67,291,200.00	63,063,000.00	93.72			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	44,233,900.00	23,565,200.00	53.27			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	43,067,600.00	28,670,500.00	66.57			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	203,485,000.00	175,864,244.00	86.43			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	373,739,000.00	344,427,400.00	92.16			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	57,472,000.00	41,053,100.00	71.43			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	39,538,800.00	39,306,000.00	99.41			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,754,504,009.00	4,116,213,934.00	86.58			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	271,138,800.00	238,775,000.00	88.06			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	491,513,300.00	408,590,200.00	83.13			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	347,762,000.00	243,669,788.00	70.07			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	13,091,500.00	9,626,210.00	73.53			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	393,820,840.00	330,575,300.00	83.94			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	114,080,000.00	112,280,000.00	98.42			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15,800,300.00	8,613,050.00	54.51			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,108,507,112.00	2,027,193,395.00	96.14			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15,999,190,035.00	15,274,428,140.00	95.47			
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	70,500,000.00	6,480,000.00	9.19			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	3,593,045,440.00	3,304,582,156.00	91.97			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	172,003,600.00	78,140,615.00	45.43			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	100,000,000.00	62,750,875.00	62.75			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/Kota						
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	29,750,000.00	20,549,150.00	69.07			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	29,503,200.00	10,666,400.00	36.15			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	40,543,360.00	24,357,750.00	60.08			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	580,250,000.00	579,140,000.00	99.81			
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	295,110,028.00	181,930,360.00	61.65			
				Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	366,360,000.00	341,640,000.00	93.25			
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	594,030,000.00	575,300,000.00	96.85			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	74,700,000.00	60,394,900.00	80.85			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	74,700,000.00	60,394,900.00	80.85			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	146,716,999.00	109,028,042.00	74.31			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	146,716,999.00	109,028,042.00	74.31			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	742,104,768.00	635,228,086.00	85.60			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60,455,700.00	48,673,307.00	80.51			
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	60,455,700.00	48,673,307.00	80.51			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	108,596,068.00	75,785,779.00	69.79			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10,403,100.00	7,790,183.00	74.88			
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	98,192,968.00	67,995,596.00	69.25			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	573,053,000.00	510,769,000.00	89.13			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	573,053,000.00	510,769,000.00	89.13			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	423,099,329.00	324,042,138.00	76.59			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,869,579.00	19,961,132.00	95.65			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20,869,579.00	19,961,132.00	95.65			
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	145,903,250.00	101,636,620.00	69.66			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	145,903,250.00	101,636,620.00	69.66			
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	256,326,500.00	202,444,386.00	78.98			
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	256,326,500.00	202,444,386.00	78.98			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	495,505,520.00	451,728,356.00	91.17			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	30,300,000.00	29,445,000.00	97.18			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/Kota						
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30,300,000.00	29,445,000.00	97.18			
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187,299,500.00	176,316,756.00	94.14			
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	187,299,500.00	176,316,756.00	94.14			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277,906,020.00	245,966,600.00	88.51			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	277,906,020.00	245,966,600.00	88.51			
3		RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo			96,416,535,261.00	90,883,112,074.00	94.26			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74,522,184,961.00	69,905,697,731.00	93.81			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,738,685,877.00	21,080,205,799.00	96.97			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,738,685,877.00	21,080,205,799.00	96.97			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,663,562,800.00	5,530,651,096.00	97.65			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,756,971,500.00	1,625,757,100.00	92.53			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,906,591,300.00	3,904,893,996.00	99.96			
				Peningkatan Pelayanan BLUD	47,119,936,284.00	43,294,840,836.00	91.88			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47,119,936,284.00	43,294,840,836.00	91.88			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21,894,350,300.00	20,977,414,343.00	95.81			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21,894,350,300.00	20,977,414,343.00	95.81			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,358,716,100.00	7,221,691,979.00	98.14			
				Pengembangan Rumah Sakit	6,917,895,500.00	6,863,274,605.00	99.21			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7,617,738,700.00	6,892,447,759.00	90.48			
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				173,172,077,738.94	169,400,803,022.58	97.82			
4		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			173,172,077,738.94	169,400,803,022.58	97.82			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,281,172,001.09	12,840,891,217.16	89.91			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,593,420.00	69,774,000.00	98.84			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70,593,420.00	69,774,000.00	98.84			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,396,453,995.09	5,018,359,767.00	92.99			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,793,969,779.09	4,479,547,767.00	93.44			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	602,484,216.00	538,812,000.00	89.43			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98,880,000.00	38,880,000.00	39.32			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	98,880,000.00	38,880,000.00	39.32			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,000,000.00	73,684,700.00	98.25			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75,000,000.00	73,684,700.00	98.25			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	499,708,061.00	489,260,333.00	97.91			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,105,300.00	21,364,000.00	92.46			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,337,700.00	42,735,000.00	98.61			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72,216,965.00	67,671,300.00	93.71			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,055,550.00	50,231,070.00	96.50			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,499,800.00	16,574,800.00	94.71			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61,792,746.00	61,713,600.00	99.87			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,700,000.00	14,684,000.00	99.89			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215,000,000.00	214,286,563.00	99.67			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,123,294,125.00	5,887,706,262.00	96.15			
				Pengadaan Alat Besar	5,950,577,925.00	5,715,473,662.00	96.05			
				Pengadaan Mebel	99,016,200.00	98,532,600.00	99.51			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,700,000.00	73,700,000.00	100.00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441,021,100.00	405,037,133.00	91.84			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99,599,700.00	64,437,145.00	64.70			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335,981,400.00	335,159,988.00	99.76			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,576,221,300.00	858,189,022.16	54.45			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172,296,300.00	133,088,748.00	77.24			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1,310,937,000.00	644,595,114.16	49.17			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,570,000.00	15,470,000.00	99.36			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77,418,000.00	65,035,160.00	84.01			
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4,971,760,577.00	4,924,144,534.50	99.04			
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,891,942,367.00	1,874,294,430.00	99.07			
				Normalisasi/Restorasi Sungai	1,333,694,617.00	1,316,660,430.00	98.72			
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	558,247,750.00	557,634,000.00	99.89			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,079,818,210.00	3,049,850,104.50	99.03			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,037,118,040.00	2,022,425,219.00	99.28			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	139,188,272.00	137,372,242.50	98.70			
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	388,907,398.00	388,050,500.00	99.78			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	514,604,500.00	502,002,143.00	97.55			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	32,489,198,310.00	32,217,444,413.14	99.16			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	32,489,198,310.00	32,217,444,413.14	99.16			
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	287,158,500.00	285,300,400.00	99.35			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,086,250,700.00	1,082,404,428.00	99.65			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,275,531,405.00	1,212,120,442.00	95.03			
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	7,237,858,250.00	7,232,588,392.00	99.93			
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	18,238,490,155.00	18,095,785,739.03	99.22			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	640,629,575.00	638,129,400.00	99.61			
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	702,777,050.00	698,077,510.68	99.33			
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,020,502,675.00	2,973,038,101.43	98.43			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11,273,995,838.00	11,242,027,528.27	99.72			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11,273,995,838.00	11,242,027,528.27	99.72			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,273,995,838.00	11,242,027,528.27	99.72			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1,592,266,325.00	1,588,692,507.31	99.78			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,592,266,325.00	1,588,692,507.31	99.78			
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1,592,266,325.00	1,588,692,507.31	99.78			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	39,378,873,510.64	38,449,332,396.10	97.64			
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	39,378,873,510.64	38,449,332,396.10	97.64			
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	39,050,941,679.64	38,141,355,096.10	97.67			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	327,931,831.00	307,977,300.00	93.92			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,117,476,950.00	2,113,247,039.96	99.80			
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2,117,476,950.00	2,113,247,039.96	99.80			
				Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2,117,476,950.00	2,113,247,039.96	99.80			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	65,922,280,754.21	64,911,393,123.64	98.47			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	65,922,280,754.21	64,911,393,123.64	98.47			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	450,680,590.00	440,646,770.00	97.77			
				Pembangunan Jalan	17,409,681,999.57	17,082,988,753.52	98.12			
				Rekonstruksi Jalan	17,573,701,732.14	17,382,775,616.75	98.91			
				Pemeliharaan Berkala Jalan	3,962,738,882.50	3,921,170,144.96	98.95			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,199,129,871.00	1,175,789,270.84	98.05			
				Pembangunan Jembatan	9,250,838,197.00	9,065,679,804.66	98.00			
				Pemeliharaan Berkala Jembatan	1,178,868,132.00	1,160,884,356.85	98.47			
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	847,121,724.00	832,502,065.00	98.27			
				Pemeliharaan Rutin Jalan	14,049,519,626.00	13,848,956,341.06	98.57			
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	111,338,122.00	95,816,000.00	86.06			
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	111,338,122.00	95,816,000.00	86.06			
				Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	11,476,600.00	11,232,200.00	97.87			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	99,861,522.00	84,583,800.00	84.70			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,033,715,351.00	1,017,814,262.50	98.46			
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	779,916,451.00	768,961,162.50	98.60			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	779,916,451.00	768,961,162.50	98.60			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	253,798,900.00	248,853,100.00	98.05			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	253,798,900.00	248,853,100.00	98.05			
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				18,937,777,953.00	18,643,611,874.50	98.45			
5		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			18,937,777,953.00	18,643,611,874.50	98.45			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,839,546,915.00	2,607,013,551.00	91.81			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,217,400.00	3,306,400.00	78.40			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,217,400.00	3,306,400.00	78.40			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,357,619,343.00	2,149,944,194.00	91.19			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,194,509,343.00	2,008,437,694.00	91.52			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163,110,000.00	141,506,500.00	86.76			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31,520,000.00	29,346,000.00	93.10			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31,520,000.00	29,346,000.00	93.10			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,500,000.00	6,000,000.00	80.00			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7,500,000.00	6,000,000.00	80.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	137,209,630.00	136,201,471.00	99.27			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,163,700.00	9,146,500.00	99.81			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,043,000.00	9,630,645.00	95.89			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,877,300.00	17,705,800.00	99.04			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	7,467,600.00	99.57			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,335,630.00	11,290,000.00	99.60			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,290,000.00	6,290,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000.00	74,670,926.00	99.56			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213,730,950.00	202,575,451.00	94.78			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	816,000.00	600,000.00	73.53			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,379,950.00	37,593,351.00	79.34			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165,535,000.00	164,382,100.00	99.30			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,749,592.00	79,640,035.00	90.76			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,704,000.00	63,670,035.00	88.80			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,470,000.00	4,470,000.00	100.00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,575,592.00	11,500,000.00	99.35			
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	30,891,487.00	30,322,800.00	98.16			
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00			
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00			
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	28,913,487.00	28,344,800.00	98.03			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	28,913,487.00	28,344,800.00	98.03			
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,315,989,941.00	1,307,354,150.00	99.34			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	334,335,600.00	333,912,700.00	99.87			
				Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	334,335,600.00	333,912,700.00	99.87			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	981,654,341.00	973,441,450.00	99.16			
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	931,654,341.00	923,937,050.00	99.17			
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	50,000,000.00	49,504,400.00	99.01			
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14,751,349,610.00	14,698,921,373.50	99.64			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	14,751,349,610.00	14,698,921,373.50	99.64			
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14,751,349,610.00	14,698,921,373.50	99.64			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				43,516,301,362.00	41,055,280,489.30	94.34			
6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			31,984,171,498.00	30,411,569,897.30	95.08			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,230,482,716.00	3,111,011,088.19	96.30			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,934,920,081.00	1,842,023,727.00	95.20			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,823,704,081.00	1,730,807,727.00	94.91			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111,216,000.00	111,216,000.00	100.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,840,000.00	5,990,000.00	87.57			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,840,000.00	5,990,000.00	87.57			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,548,300.00	37,301,550.00	99.34			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37,548,300.00	37,301,550.00	99.34			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	211,959,840.00	211,802,650.00	99.93			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,486,600.00	7,486,000.00	99.99			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,968,400.00	74,917,300.00	99.93			
				Penyediaan Barang Cetak dan	57,966,600.00	57,966,350.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penggandaan						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,588,240.00	15,500,000.00	99.43			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,950,000.00	15,950,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,000,000.00	39,983,000.00	99.96			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,076,400.00	177,880,330.00	94.58			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,472,800.00	8,470,000.00	99.97			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,761,600.00	51,697,630.00	97.98			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126,842,000.00	117,712,700.00	92.80			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851,138,095.00	836,012,831.19	98.22			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181,542,000.00	167,721,699.00	92.39			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,960,000.00	7,910,000.00	99.37			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	661,636,095.00	660,381,132.19	99.81			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Lainnya						
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	28,753,688,782.00	27,300,558,809.11	94.95			
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,401,829,000.00	1,284,661,600.00	91.64			
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1,401,829,000.00	1,284,661,600.00	91.64			
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,144,575,282.00	970,968,000.00	84.83			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,144,575,282.00	970,968,000.00	84.83			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	26,207,284,500.00	25,044,929,209.11	95.56			
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	26,207,284,500.00	25,044,929,209.11	95.56			
1.05		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			6,144,780,474.00	5,661,658,828.00	92.14			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,953,230,474.00	3,491,517,708.00	88.32			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,379,145.00	66,956,803.00	99.37			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000.00	5,750,000.00	95.83			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	61,379,145.00	61,206,803.00	99.72			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,908,743,529.00	2,597,548,112.00	89.30			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,795,943,529.00	2,488,559,312.00	89.01			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112,800,000.00	108,988,800.00	96.62			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58,000,000.00	58,000,000.00	100.00			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58,000,000.00	58,000,000.00	100.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	150,945,200.00	150,706,760.00	99.84			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9,993,900.00	9,976,500.00	99.83			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Bangunan Kantor						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53,818,600.00	53,707,900.00	99.79			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,032,700.00	9,937,700.00	99.05			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,100,000.00	17,092,900.00	99.96			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	59,991,760.00	99.99			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,450,800.00	77,415,000.00	99.95			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,450,800.00	77,415,000.00	99.95			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314,001,800.00	220,076,349.00	70.09			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,968,300.00	61,328,849.00	81.81			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000.00	3,190,000.00	53.17			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233,033,500.00	155,557,500.00	66.75			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361,110,000.00	305,214,684.00	84.52			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338,460,000.00	282,565,500.00	83.49			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,650,000.00	22,649,184.00	100.00			
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2,191,550,000.00	2,170,141,120.00	99.02			
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,128,300,000.00	2,108,714,500.00	99.08			
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,826,850,000.00	1,807,993,400.00	98.97			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	285,750,000.00	285,086,100.00	99.77			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	15,700,000.00	15,635,000.00	99.59			
				Investigasi Kejadian Kebakaran	10,500,000.00	10,428,000.00	99.31			
				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10,500,000.00	10,428,000.00	99.31			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	52,750,000.00	50,998,620.00	96.68			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	52,750,000.00	50,998,620.00	96.68			
1.05		Satuan Polisi Pamong Praja			5,387,349,390.00	4,982,051,764.00	92.48			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,723,424,390.00	4,323,505,264.00	91.53			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,050,000.00	15,050,000.00	100.00			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,050,000.00	15,050,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,981,016,432.00	2,637,730,331.00	88.48			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,887,272,432.00	2,552,146,331.00	88.39			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93,744,000.00	85,584,000.00	91.30			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	155,449,600.00	150,215,897.00	96.63			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,497,200.00	7,497,200.00	100.00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,460,600.00	-	0.00			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,737,700.00	43,471,500.00	97.17			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,718,900.00	7,718,700.00	100.00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,535,200.00	14,135,188.00	97.25			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,500,000.00	2,464,000.00	98.56			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000.00	74,929,309.00	99.91			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,233,036,800.00	1,189,045,678.00	96.43			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	149,600.00	149,600.00	100.00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,687,200.00	15,896,078.00	55.41			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,204,200,000.00	1,173,000,000.00	97.41			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326,371,558.00	318,963,358.00	97.73			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,788,000.00	4,412,800.00	37.43			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131,680,000.00	131,677,000.00	100.00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,820,000.00	6,790,000.00	99.56			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176,083,558.00	176,083,558.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	663,925,000.00	658,546,500.00	99.19			
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	663,925,000.00	658,546,500.00	99.19			
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	516,620,000.00	511,292,500.00	98.97			
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	147,305,000.00	147,254,000.00	99.97			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5,808,208,619.00	5,094,151,075.00	87.71			
1.06		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5,808,208,619.00	5,094,151,075.00	87.71			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,505,485,404.00	3,872,278,621.00	85.95			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,195,934.00	30,169,000.00	99.91			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,195,934.00	30,169,000.00	99.91			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,766,508,092.00	3,174,861,220.00	84.29			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,653,060,892.00	3,062,054,020.00	83.82			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113,447,200.00	112,807,200.00	99.44			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60,480,800.00	49,140,800.00	81.25			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60,480,800.00	49,140,800.00	81.25			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	11,997,470.00	79.98			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	11,997,470.00	79.98			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	212,708,400.00	211,356,679.00	99.36			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	67,701,400.00	66,467,630.00	98.18			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Kantor						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,469,000.00	42,393,300.00	99.82			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,486,000.00	12,480,000.00	99.95			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,972,000.00	4,972,000.00	100.00			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,080,000.00	10,080,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000.00	74,963,749.00	99.95			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,362,100.00	31,176,780.00	99.41			
				Pengadaan Mebel	31,362,100.00	31,176,780.00	99.41			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202,320,100.00	194,594,312.00	96.18			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,597,700.00	61,274,312.00	92.01			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135,722,400.00	133,320,000.00	98.23			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186,909,978.00	168,982,360.00	90.41			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,879,578.00	26,686,860.00	72.36			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135,030,000.00	127,298,000.00	94.27			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,400.00	14,997,500.00	99.98			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	204,108,506.00	203,155,818.00	99.53			
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	124,091,378.00	123,218,318.00	99.30			
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	124,091,378.00	123,218,318.00	99.30			
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80,017,128.00	79,937,500.00	99.90			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	80,017,128.00	79,937,500.00	99.90			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	432,974,500.00	417,648,085.00	96.46			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	358,365,400.00	351,701,785.00	98.14			
				Penyediaan Permakanan	254,589,800.00	250,326,800.00	98.33			
				Penyediaan Alat Bantu	53,776,600.00	51,396,450.00	95.57			
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	49,999,000.00	49,978,535.00	99.96			
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	74,609,100.00	65,946,300.00	88.39			
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00			
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24,609,100.00	15,946,300.00	64.80			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	195,004,588.00	174,061,160.00	89.26			
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	30,377,000.00	30,344,380.00	99.89			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	30,377,000.00	30,344,380.00	99.89			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	164,627,588.00	143,716,780.00	87.30			
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33,002,288.00	32,812,280.00	99.42			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	131,625,300.00	110,904,500.00	84.26			
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	409,430,478.00	366,034,391.00	89.40			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	332,918,578.00	289,551,291.00	86.97			
				Penyediaan Makanan	239,371,723.00	197,912,731.00	82.68			
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	93,546,855.00	91,638,560.00	97.96			
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	76,511,900.00	76,483,100.00	99.96			
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	76,511,900.00	76,483,100.00	99.96			
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	61,205,143.00	60,973,000.00	99.62			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	61,205,143.00	60,973,000.00	99.62			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	61,205,143.00	60,973,000.00	99.62			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terbagi lagi menjadi 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 14 (empat belas) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp66,358,411,562.00,-** terealisasi sebesar **Rp62,091,390,495.36,-** atau **93,57** persen dengan Kategori **Sangat Baik**

Adapun rincian realisasi masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada masing-



masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3.12
Realisasi Anggaran Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Penjelasan terkait kebijakan ada pada Sub BAB 3.2		66,358,411,562.00	62,091,390,495.36	93.57			Penjelasan terkait kebijakan ada pada Sub BAB 3.3
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2,649,424,510.00	2,563,232,793.00	96.75			
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			2,649,424,510.00	2,563,232,793.00	96.75			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,874,943,695.00	1,798,034,092.00	95.90			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,396,027,454.00	1,348,018,229.00	96.56			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,305,379,454.00	1,257,372,229.00	96.32			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90,648,000.00	90,646,000.00	100.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34,367,300.00	14,827,200.00	43.14			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34,367,300.00	14,827,200.00	43.14			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,776,650.00	10,688,000.00	99.18			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,776,650.00	10,688,000.00	99.18			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	135,832,552.00	132,170,379.00	97.30			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,500,200.00	10,500,200.00	100.00			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,723,700.00	10,074,400.00	73.41			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,821,010.00	19,814,650.00	99.97			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,272,642.00	12,271,129.00	99.99			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,515,000.00	4,510,000.00	99.89			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,050,950.00	6,970,000.00	98.85			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,050,950.00	6,970,000.00	98.85			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220,093,700.00	214,565,879.00	97.49			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,614,500.00	58,213,857.00	91.51			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,479,200.00	156,352,022.00	99.92			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,795,089.00	70,794,405.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54,749,800.00	54,749,505.00	100.00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,045,289.00	16,044,900.00	100.00			
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	3,245,000.00	3,245,000.00	100.00			
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	3,245,000.00	3,245,000.00	100.00			
				Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	3,245,000.00	3,245,000.00	100.00			
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655,744,614.00	647,143,801.00	98.69			
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655,744,614.00	647,143,801.00	98.69			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	635,370,000.00	626,797,801.00	98.65			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	20,374,614.00	20,346,000.00	99.86			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	7,654,150.00	7,594,900.00	99.23			
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	7,654,150.00	7,594,900.00	99.23			
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	7,654,150.00	7,594,900.00	99.23			
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	107,837,051.00	107,215,000.00	99.42			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41,146,850.00	40,566,100.00	98.59			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	17,290,300.00	17,194,900.00	99.45			
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	23,856,550.00	23,371,200.00	97.97			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	66,690,201.00	66,648,900.00	99.94			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,429,800.00	30,388,500.00	99.86			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	36,260,401.00	36,260,400.00	100.00			
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				942,487,928.00	823,614,365.00	87.39			
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			942,487,928.00	823,614,365.00	87.39			
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	445,278,818.00	404,978,985.00	90.95			
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	112,033,529.00	92,636,400.00	82.69			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	60,502,737.00	52,922,000.00	87.47			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	51,530,792.00	39,714,400.00	77.07			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000.00	185,537,785.00	92.77			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200,000,000.00	185,537,785.00	92.77			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	133,245,289.00	126,804,800.00	95.17			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	92,877,695.00	92,760,000.00	99.87			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40,367,594.00	34,044,800.00	84.34			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	226,619,280.00	169,062,600.00	74.60			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	226,619,280.00	169,062,600.00	74.60			
2.08				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66,093,700.00	65,194,100.00	98.64			
2.08				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	160,525,580.00	103,868,500.00	64.71			
2.08				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16,634,360.00	12,828,080.00	77.12			
2.08				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,634,360.00	12,828,080.00	77.12			
2.08				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	16,634,360.00	12,828,080.00	77.12			
2.08				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	253,955,470.00	236,744,700.00	93.22			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	173,554,390.00	157,489,650.00	90.74			
2.08				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	173,554,390.00	157,489,650.00	90.74			
2.08				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80,401,080.00	79,255,050.00	98.57			
2.08				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80,401,080.00	79,255,050.00	98.57			
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3,640,911,199.00	3,471,298,659.97	95.34			
2.09		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			3,626,602,937.00	3,456,990,397.97	95.32			
2.09				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,080,574,934.00	2,918,781,631.00	94.75			
2.09				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,060,020.00	18,866,925.00	98.99			
2.09				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,992,150.00	9,911,725.00	99.20			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,067,870.00	8,955,200.00	98.76			
2.09				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,665,887,174.00	2,524,150,292.00	94.68			
2.09				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,580,579,174.00	2,439,808,292.00	94.54			
2.09				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85,308,000.00	84,342,000.00	98.87			
2.09				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,240,000.00	12,240,000.00	100.00			
2.09				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,240,000.00	12,240,000.00	100.00			
2.09				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	6,000,000.00	60.00			
2.09				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	6,000,000.00	60.00			
2.09				Administrasi Umum Perangkat Daerah	197,522,940.00	196,344,458.00	99.40			
2.09				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,705,300.00	4,705,300.00	100.00			
2.09				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,555,410.00	53,010,110.00	98.98			
2.09				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,796,630.00	29,674,440.00	99.59			
2.09				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,499,600.00	4,499,600.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,966,000.00	4,955,584.00	99.79			
2.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	99,499,424.00	99.50			
2.09				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,034,800.00	70,349,956.00	82.73			
2.09				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	992,800.00	990,000.00	99.72			
2.09				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,042,000.00	36,359,956.00	71.24			
2.09				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00			
2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,830,000.00	90,830,000.00	100.00			
2.09				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,800,000.00	88,800,000.00	100.00			
2.09				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,030,000.00	2,030,000.00	100.00			
2.09				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	155,469,854.00	154,089,800.00	99.11			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	155,469,854.00	154,089,800.00	99.11			
2.09				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	140,111,854.00	138,876,200.00	99.12			
2.09				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	15,358,000.00	15,213,600.00	99.06			
2.09				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	342,836,730.00	339,005,766.97	98.88			
2.09				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	96,470,920.00	95,619,004.00	99.12			
2.09				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	37,942,460.00	37,312,504.00	98.34			
2.09				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	24,917,050.00	24,874,500.00	99.83			
2.09				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	33,611,410.00	33,432,000.00	99.47			
2.09				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	192,634,500.00	191,530,182.97	99.43			
2.09				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	192,634,500.00	191,530,182.97	99.43			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	53,731,310.00	51,856,580.00	96.51			
2.09				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	7,058,900.00	6,970,000.00	98.74			
2.09				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	46,672,410.00	44,886,580.00	96.17			
2.09				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	18,739,550.00	18,149,000.00	96.85			
2.09				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	12,469,850.00	12,075,000.00	96.83			
2.09				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	12,469,850.00	12,075,000.00	96.83			
2.09				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6,269,700.00	6,074,000.00	96.88			
2.09				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	6,269,700.00	6,074,000.00	96.88			
2.09				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	28,981,869.00	26,964,200.00	93.04			
2.09				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	28,981,869.00	26,964,200.00	93.04			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14,456,043.00	12,468,400.00	86.25			
2.09				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14,525,826.00	14,495,800.00	99.79			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				172,375,313.00	134,842,200.00	78.23			
2.10		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			172,375,313.00	134,842,200.00	78.23			
2.10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	172,375,313.00	134,842,200.00	78.23			
2.10				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	172,375,313.00	134,842,200.00	78.23			
2.10				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	172,375,313.00	134,842,200.00	78.23			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				14,223,615,708.00	13,530,016,344.18	95.12			
2.11		Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan			14,223,615,708.00	13,530,016,344.18	95.12			
2.11				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,640,823,989.00	6,135,850,693.23	92.40			
2.11				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,803,942.00	36,369,900.00	84.97			
2.11				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,209,730.00	29,828,100.00	84.72			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,594,212.00	6,541,800.00	86.14			
2.11				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,791,609,600.00	4,420,405,884.00	92.25			
2.11				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,659,489,600.00	4,292,053,884.00	92.11			
2.11				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132,120,000.00	128,352,000.00	97.15			
2.11				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,680,000.00	24,413,600.00	85.12			
2.11				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28,680,000.00	24,413,600.00	85.12			
2.11				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199,125,000.00	151,126,719.00	75.90			
2.11				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	199,125,000.00	151,126,719.00	75.90			
2.11				Administrasi Umum Perangkat Daerah	327,093,879.00	318,626,889.00	97.41			
2.11				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,778,000.00	10,773,200.00	99.96			
2.11				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,254,000.00	33,704,400.00	95.60			
2.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,934,000.00	45,590,000.00	97.14			
2.11				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,454,050.00	12,866,000.00	73.71			
2.11				Fasilitasi Kunjungan Tamu	29,750,000.00	29,225,000.00	98.24			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186,923,829.00	186,468,289.00	99.76			
2.11				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,545,920.00	75,924,500.00	97.91			
2.11				Pengadaan Mebel	6,313,600.00	6,271,500.00	99.33			
2.11				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71,232,320.00	69,653,000.00	97.78			
2.11				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579,168,100.00	548,010,600.00	94.62			
2.11				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,264,000.00	2,400,000.00	73.53			
2.11				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130,450,000.00	109,300,600.00	83.79			
2.11				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445,454,100.00	436,310,000.00	97.95			
2.11				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594,797,548.00	560,972,601.23	94.31			
2.11				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,800,000.00	40,607,400.00	99.53			
2.11				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202,916,000.00	176,096,147.00	86.78			
2.11				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,360,000.00	30,211,000.00	96.34			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	319,721,548.00	314,058,054.23	98.23			
2.11				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	162,155,900.00	156,028,267.00	96.22			
2.11				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	162,155,900.00	156,028,267.00	96.22			
2.11				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	162,155,900.00	156,028,267.00	96.22			
2.11				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	362,001,444.00	332,943,145.00	91.97			
2.11				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	362,001,444.00	332,943,145.00	91.97			
2.11				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	98,753,704.00	97,606,050.00	98.84			
2.11				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	263,247,740.00	235,337,095.00	89.40			
2.11				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	694,810,600.00	673,575,343.00	96.94			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	694,810,600.00	673,575,343.00	96.94			
2.11				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	694,810,600.00	673,575,343.00	96.94			
2.11				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25,184,255.00	23,926,500.00	95.01			
2.11				Penyimpanan sementara Limbah B3	25,184,255.00	23,926,500.00	95.01			
2.11				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25,184,255.00	23,926,500.00	95.01			
2.11				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100,533,820.00	92,580,046.00	92.09			
2.11				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,533,820.00	92,580,046.00	92.09			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31,045,000.00	27,471,167.00	88.49			
2.11				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	69,488,820.00	65,108,879.00	93.70			
2.11				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6,791,200.00	5,382,240.00	79.25			
2.11				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	6,791,200.00	5,382,240.00	79.25			
2.11				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	6,791,200.00	5,382,240.00	79.25			
2.11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6,231,314,500.00	6,109,730,109.95	98.05			
2.11				Pengelolaan Sampah	6,231,314,500.00	6,109,730,109.95	98.05			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	220,542,000.00	196,829,000.00	89.25			
2.11				Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	6,010,772,500.00	5,912,901,109.95	98.37			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				957,622,568.00	923,976,260.21	96.49			
2.15				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	652,622,568.00	622,347,020.21	95.36			
2.15				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	102,298,968.00	78,527,748.21	76.76			
2.15				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24,967,268.00	24,967,267.21	100.00			
2.15				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,640,000.00	-	0.00			
2.15				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59,691,700.00	53,560,481.00	89.73			
2.15				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	500,513,600.00	496,118,672.00	99.12			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	84,872,800.00	84,723,000.00	99.82			
2.15				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	415,640,800.00	411,395,672.00	98.98			
2.15				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,810,000.00	47,700,600.00	95.77			
2.15				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	49,810,000.00	47,700,600.00	95.77			
2.15				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	305,000,000.00	301,629,240.00	98.89			
2.15				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	305,000,000.00	301,629,240.00	98.89			
2.15				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	305,000,000.00	301,629,240.00	98.89			
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,109,897,034.00	3,743,657,916.00	91.09			
2.12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4,109,897,034.00	3,743,657,916.00	91.09			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,921,643,634.00	3,567,718,916.00	90.98			
2.12				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,819,757,634.00	2,532,008,411.00	89.80			
2.12				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,746,989,634.00	2,459,258,411.00	89.53			
2.12				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72,768,000.00	72,750,000.00	99.98			
2.12				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,920,000.00	11,400,000.00	81.90			
2.12				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,920,000.00	11,400,000.00	81.90			
2.12				Administrasi Umum Perangkat Daerah	688,808,000.00	637,576,676.00	92.56			
2.12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,140,100.00	2,140,100.00	100.00			
2.12				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402,860,600.00	353,243,800.00	87.68			
2.12				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76,982,200.00	76,151,400.00	98.92			
2.12				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,526,000.00	8,524,800.00	99.99			
2.12				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,799,100.00	10,796,800.00	99.98			
2.12				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187,500,000.00	186,719,776.00	99.58			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252,538,000.00	242,157,429.00	95.89			
2.12				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,360,000.00	1,360,000.00	100.00			
2.12				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,000,000.00	58,934,529.00	93.55			
2.12				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188,178,000.00	181,862,900.00	96.64			
2.12				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,620,000.00	144,576,400.00	98.61			
2.12				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146,620,000.00	144,576,400.00	98.61			
2.12				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	188,253,400.00	175,939,000.00	93.46			
2.12				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	188,253,400.00	175,939,000.00	93.46			
2.12				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	188,253,400.00	175,939,000.00	93.46			
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6,887,113,232.00	6,738,986,662.00	97.85			
2.13		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			6,887,113,232.00	6,738,986,662.00	97.85			
2.13				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,636,665,048.00	4,495,188,424.00	96.95			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.13				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,736,900.00	22,709,900.00	99.88			
2.13				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,736,900.00	22,709,900.00	99.88			
2.13				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,262,855,890.00	2,140,756,496.00	94.60			
2.13				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,262,855,890.00	2,140,756,496.00	94.60			
2.13				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,340,572.00	17,300,572.00	99.77			
2.13				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17,340,572.00	17,300,572.00	99.77			
2.13				Administrasi Umum Perangkat Daerah	163,937,490.00	163,351,310.00	99.64			
2.13				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,348,400.00	24,348,400.00	100.00			
2.13				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,583,400.00	10,583,400.00	100.00			
2.13				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,985,690.00	14,400,000.00	96.09			
2.13				Fasilitasi Kunjungan Tamu	17,040,000.00	17,040,000.00	100.00			
2.13				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96,980,000.00	96,979,510.00	100.00			
2.13				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,029,818,196.00	2,014,199,718.00	99.23			
2.13				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,500,000.00	43,172,938.00	87.22			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.13				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,980,318,196.00	1,971,026,780.00	99.53			
2.13				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,976,000.00	136,870,428.00	97.78			
2.13				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97,496,000.00	94,492,428.00	96.92			
2.13				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,940,000.00	14,940,000.00	100.00			
2.13				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,540,000.00	27,438,000.00	99.63			
2.13				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	25,148,350.00	25,088,601.00	99.76			
2.13				Fasilitas Kerja Sama antar Desa	25,148,350.00	25,088,601.00	99.76			
2.13				Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	25,148,350.00	25,088,601.00	99.76			
2.13				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	500,611,488.00	499,527,478.00	99.78			
2.13				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500,611,488.00	499,527,478.00	99.78			
2.13				Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	31,633,863.00	30,932,900.00	97.78			
2.13				Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	32,145,600.00	32,120,600.00	99.92			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.13				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	11,030,000.00	11,030,000.00	100.00			
2.13				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	21,141,400.00	21,141,400.00	100.00			
2.13				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	40,162,700.00	40,162,700.00	100.00			
2.13				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	123,670,325.00	123,522,278.00	99.88			
2.13				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	145,027,600.00	145,027,600.00	100.00			
2.13				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	95,800,000.00	95,590,000.00	99.78			
2.13				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,724,688,346.00	1,719,182,159.00	99.68			
2.13				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,724,688,346.00	1,719,182,159.00	99.68			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.13				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	151,708,145.00	151,542,000.00	99.89			
2.13				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	614,338,125.00	613,861,690.00	99.92			
2.13				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	69,760,043.00	69,707,700.00	99.92			
2.13				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	888,882,033.00	884,070,769.00	99.46			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8,662,760,536.00	7,846,411,181.00	90.58			
2.14		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			8,662,760,536.00	7,846,411,181.00	90.58			
2.14				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,751,949,336.00	2,259,603,608.00	82.11			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,944,180.00	45,409,140.00	98.84			
2.14				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,164,180.00	19,952,640.00	98.95			
2.14				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,780,000.00	25,456,500.00	98.75			
2.14				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,314,235,983.80	1,838,663,781.00	79.45			
2.14				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,202,744,183.80	1,727,444,981.00	78.42			
2.14				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90,625,000.00	90,552,000.00	99.92			
2.14				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20,866,800.00	20,666,800.00	99.04			
2.14				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,130,000.00	11,030,000.00	99.10			
2.14				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,130,000.00	11,030,000.00	99.10			
2.14				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,542,080.00	16,289,900.00	92.86			
2.14				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8,042,080.00	7,889,300.00	98.10			
2.14				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,500,000.00	8,400,600.00	88.43			
2.14				Administrasi Umum Perangkat Daerah	114,269,842.20	113,859,640.00	99.64			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,902,717.20	10,884,500.00	99.83			
2.14				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,200.00	-	0.00			
2.14				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,916,250.00	1,912,300.00	99.79			
2.14				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33,125.00	-	0.00			
2.14				Penyediaan Bahan/Material	3,497,200.00	3,497,200.00	100.00			
2.14				Fasilitas Kunjungan Tamu	10,000,000.00	9,883,620.00	98.84			
2.14				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,899,350.00	87,682,020.00	99.75			
2.14				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,426,600.00	21,403,600.00	99.89			
2.14				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	933,600.00	910,600.00	97.54			
2.14				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,493,000.00	20,493,000.00	100.00			
2.14				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,400,650.00	52,390,224.00	80.11			
2.14				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,400,650.00	22,390,224.00	76.16			
2.14				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,000,000.00	30,000,000.00	83.33			
2.14				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,000,000.00	160,557,323.00	99.11			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162,000,000.00	160,557,323.00	99.11			
2.14				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	103,435,200.00	82,872,900.00	80.12			
2.14				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	52,835,400.00	37,328,600.00	70.65			
2.14				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	22,995,900.00	20,861,900.00	90.72			
2.14				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	29,839,500.00	16,466,700.00	55.18			
2.14				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50,599,800.00	45,544,300.00	90.01			
2.14				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	50,599,800.00	45,544,300.00	90.01			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,074,875,800.00	3,771,445,471.00	92.55			
2.14				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2,230,271,892.00	2,053,517,641.00	92.07			
2.14				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	60,000,000.00	36,794,500.00	61.32			
2.14				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	779,839,892.00	721,633,141.00	92.54			
2.14				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	440,000,000.00	370,132,800.00	84.12			
2.14				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,032,000.00	74,557,200.00	74.53			
2.14				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	850,400,000.00	850,400,000.00	100.00			
2.14				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	493,257,500.00	470,882,939.00	95.46			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	480,482,000.00	458,287,739.00	95.38			
2.14				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12,775,500.00	12,595,200.00	98.59			
2.14				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,091,658,408.00	987,806,650.00	90.49			
2.14				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,095,900.00	44,684,450.00	99.09			
2.14				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	799,642,108.00	702,243,300.00	87.82			
2.14				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	152,483,800.00	147,304,700.00	96.60			
2.14				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	94,436,600.00	93,574,200.00	99.09			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	259,688,000.00	259,238,241.00	99.83			
2.14				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	14,478,900.00	14,313,000.00	98.85			
2.14				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	36,623,100.00	36,345,241.00	99.24			
2.14				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	208,586,000.00	208,580,000.00	100.00			
2.14				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,732,500,200.00	1,732,489,202.00	100.00			
2.14				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,732,500,200.00	1,732,489,202.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130,000,000.00	129,990,002.00	99.99			
2.14				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1,537,800,000.00	1,537,800,000.00	100.00			
2.14				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	32,430,200.00	32,429,200.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	32,270,000.00	32,270,000.00	100.00			
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,582,910,180.00	6,093,934,084.00	92.57			
2.16		Dinas Komunikasi dan Informatika			6,582,910,180.00	6,093,934,084.00	92.57			
2.16				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,825,364,031.00	3,479,198,137.00	90.95			
2.16				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,063,764,271.00	2,729,621,420.00	89.09			
2.16				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,969,792,271.00	2,635,649,420.00	88.75			
2.16				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93,972,000.00	93,972,000.00	100.00			
2.16				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,520,000.00	15,510,000.00	88.53			
2.16				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17,520,000.00	15,510,000.00	88.53			
2.16				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,545,000.00	25,485,000.00	99.77			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,500,000.00	22,440,000.00	99.73			
2.16				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3,045,000.00	3,045,000.00	100.00			
2.16				Administrasi Umum Perangkat Daerah	143,000,960.00	140,020,200.00	97.92			
2.16				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,652,200.00	6,552,000.00	98.49			
2.16				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,078,600.00	23,830,900.00	98.97			
2.16				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,566,000.00	6,414,500.00	97.69			
2.16				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,950,200.00	7,950,000.00	100.00			
2.16				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,657,000.00	3,420,700.00	60.47			
2.16				Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,195,000.00	7,000,000.00	97.29			
2.16				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,901,960.00	84,852,100.00	99.94			
2.16				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484,395,800.00	478,619,617.00	98.81			
2.16				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,984,800.00	3,982,500.00	99.94			
2.16				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382,046,400.00	376,284,517.00	98.49			
2.16				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,364,600.00	98,352,600.00	99.99			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,138,000.00	89,941,900.00	98.69			
2.16				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,748,000.00	82,552,400.00	98.57			
2.16				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,390,000.00	7,389,500.00	99.99			
2.16				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,270,879,734.00	1,200,448,152.00	94.46			
2.16				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,270,879,734.00	1,200,448,152.00	94.46			
2.16				Relasi Media	1,029,686,110.00	960,103,443.00	93.24			
2.16				Pelayanan Informasi Publik	23,110,200.00	22,992,339.00	99.49			
2.16				Diseminasi Informasi	205,302,994.00	204,574,270.00	99.65			
2.16				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	12,780,430.00	12,778,100.00	99.98			
2.16				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,486,666,415.00	1,414,287,795.00	95.13			
2.16				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103,976,250.00	101,647,956.00	97.76			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	103,976,250.00	101,647,956.00	97.76			
2.16				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,382,690,165.00	1,312,639,839.00	94.93			
2.16				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	44,629,675.00	40,492,600.00	90.73			
2.16				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	291,659,630.00	233,167,600.00	79.95			
2.16				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	207,393,485.00	207,253,600.00	99.93			
2.16				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	839,007,375.00	831,726,039.00	99.13			
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				76,799,315.00	76,734,400.00	99.92			
2.20				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	76,799,315.00	76,734,400.00	99.92			
2.20				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	76,799,315.00	76,734,400.00	99.92			
2.20				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	38,457,969.00	38,457,300.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.20				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	38,341,346.00	38,277,100.00	99.83			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				51,249,650.00	51,224,350.00	99.95			
2.21				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	51,249,650.00	51,224,350.00	99.95			
2.21				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51,249,650.00	51,224,350.00	99.95			
2.21				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,955,700.00	20,930,800.00	99.88			
2.21				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,293,950.00	30,293,550.00	100.00			
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3,706,004,308.00	3,334,152,128.00	89.97			
2.18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			3,706,004,308.00	3,334,152,128.00	89.97			
2.18				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,316,343,318.00	2,952,996,812.00	89.04			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,502,750.00	11,220,316.00	97.54			
2.18				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,157,600.00	5,021,316.00	97.36			
2.18				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,345,150.00	6,199,000.00	97.70			
2.18				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,067,897,418.00	1,738,868,818.00	84.09			
2.18				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,977,870,618.00	1,650,913,018.00	83.47			
2.18				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86,448,000.00	84,408,000.00	97.64			
2.18				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,578,800.00	3,547,800.00	99.13			
2.18				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,567,050.00	3,227,300.00	90.48			
2.18				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,567,050.00	3,227,300.00	90.48			
2.18				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,500,100.00	26,592,748.00	96.70			
2.18				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17,500,000.00	17,388,648.00	99.36			
2.18				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3,650,100.00	3,300,100.00	90.41			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6,350,000.00	5,904,000.00	92.98			
2.18				Administrasi Umum Perangkat Daerah	215,187,000.00	213,687,799.00	99.30			
2.18				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,994,600.00	4,968,340.00	99.47			
2.18				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,807,400.00	24,531,000.00	98.89			
2.18				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,894,800.00	20,894,800.00	100.00			
2.18				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,728,400.00	20,728,400.00	100.00			
2.18				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,191,600.00	6,048,000.00	84.10			
2.18				Fasilitasi Kunjungan Tamu	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00			
2.18				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119,070,200.00	119,017,259.00	99.96			
2.18				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,986,300.00	76,453,600.00	95.58			
2.18				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,986,300.00	76,453,600.00	95.58			
2.18				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295,530,700.00	284,167,376.00	96.15			
2.18				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	503,200.00	503,200.00	100.00			
2.18				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106,438,000.00	98,011,076.00	92.08			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,990,000.00	9,990,000.00	100.00			
2.18				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178,599,500.00	175,663,100.00	98.36			
2.18				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,172,000.00	598,778,855.00	97.34			
2.18				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,698,000.00	7,194,800.00	40.65			
2.18				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77,760,000.00	75,440,000.00	97.02			
2.18				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00			
2.18				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504,784,000.00	501,214,055.00	99.29			
2.18				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,710,000.00	10,710,000.00	100.00			
2.18				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	44,632,703.00	43,108,752.00	96.59			
2.18				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	44,632,703.00	43,108,752.00	96.59			
2.18				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	44,632,703.00	43,108,752.00	96.59			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	8,553,573.00	8,134,200.00	95.10			
2.18				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,553,573.00	8,134,200.00	95.10			
2.18				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8,553,573.00	8,134,200.00	95.10			
2.18				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	270,119,420.00	264,010,634.00	97.74			
2.18				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	270,119,420.00	264,010,634.00	97.74			
2.18				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80,409,168.00	76,889,714.00	95.62			
2.18				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	182,200,649.00	179,631,920.00	98.59			
2.18				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	7,509,603.00	7,489,000.00	99.73			
2.18				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	13,907,700.00	13,478,730.00	96.92			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13,907,700.00	13,478,730.00	96.92			
2.18				Pengawasan Penanaman Modal	13,907,700.00	13,478,730.00	96.92			
2.18				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	52,447,594.00	52,423,000.00	99.95			
2.18				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52,447,594.00	52,423,000.00	99.95			
2.18				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	52,447,594.00	52,423,000.00	99.95			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7,597,485,588.00	7,018,086,679.00	92.37			
2.19		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			7,597,485,588.00	7,018,086,679.00	92.37			
2.19				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,012,407,348.00	2,752,216,259.00	91.36			
2.19				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,231,063,133.00	2,049,961,976.00	91.88			
2.19				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,107,361,133.00	1,934,953,976.00	91.82			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123,702,000.00	115,008,000.00	92.97			
2.19				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34,920,000.00	33,670,000.00	96.42			
2.19				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34,920,000.00	33,670,000.00	96.42			
2.19				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,250,000.00	17,749,052.00	79.77			
2.19				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22,250,000.00	17,749,052.00	79.77			
2.19				Administrasi Umum Perangkat Daerah	147,986,140.00	144,327,335.00	97.53			
2.19				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,449,800.00	10,449,800.00	100.00			
2.19				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,550,500.00	16,400,000.00	99.09			
2.19				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,786,400.00	41,614,000.00	99.59			
2.19				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,199,440.00	15,996,440.00	83.32			
2.19				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	59,867,095.00	99.78			
2.19				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,739,800.00	8,664,400.00	99.14			
2.19				Pengadaan Mebel	8,739,800.00	8,664,400.00	99.14			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404,440,700.00	340,278,932.00	84.14			
2.19				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,653,200.00	55,038,932.00	62.08			
2.19				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315,787,500.00	285,240,000.00	90.33			
2.19				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,007,575.00	157,564,564.00	96.66			
2.19				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,420,775.00	119,284,764.00	95.87			
2.19				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,307,000.00	24,185,000.00	99.50			
2.19				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,279,800.00	14,094,800.00	98.70			
2.19				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	503,425,400.00	496,407,198.00	98.61			
2.19				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	253,367,400.00	252,195,200.00	99.54			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	123,341,400.00	122,180,400.00	99.06			
2.19				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	130,026,000.00	130,014,800.00	99.99			
2.19				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250,058,000.00	244,211,998.00	97.66			
2.19				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	250,058,000.00	244,211,998.00	97.66			
2.19				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3,731,652,840.00	3,419,463,222.00	91.63			
2.19				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	526,727,592.00	439,248,900.00	83.39			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	129,647,400.00	129,035,500.00	99.53			
2.19				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	397,080,192.00	310,213,400.00	78.12			
2.19				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	967,954,654.00	824,537,122.00	85.18			
2.19				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	287,463,139.00	252,760,424.00	87.93			
2.19				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	680,491,515.00	571,776,698.00	84.02			
2.19				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	62,385,675.00	61,902,800.00	99.23			
2.19				pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	62,385,675.00	61,902,800.00	99.23			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.19				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00	100.00			
2.19				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00	100.00			
2.19				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	124,584,919.00	43,774,400.00	35.14			
2.19				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	101,009,940.00	20,478,400.00	20.27			
2.19				Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	23,574,979.00	23,296,000.00	98.82			
2.19				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00			
2.19				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00			
2.19				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00			
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2,270,000,000.00	2,268,438,040.00	99.93			
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,270,000,000.00	2,268,438,040.00	99.93			
2.22				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,450,000,000.00	1,449,351,640.00	99.96			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,200,000,000.00	1,199,658,840.00	99.97			
2.22				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,100,000,000.00	1,099,877,040.00	99.99			
2.22				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100,000,000.00	99,781,800.00	99.78			
2.22				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	99,960,000.00	99.96			
2.22				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100,000,000.00	99,960,000.00	99.96			
2.22				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	149,732,800.00	99.82			
2.22				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	150,000,000.00	149,732,800.00	99.82			
2.22				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	470,000,000.00	469,487,000.00	99.89			
2.22				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470,000,000.00	469,487,000.00	99.89			
2.22				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	400,000,000.00	399,567,000.00	99.89			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	70,000,000.00	69,920,000.00	99.89			
2.22				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	50,000,000.00	49,960,000.00	99.92			
2.22				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,960,000.00	99.92			
2.22				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	50,000,000.00	49,960,000.00	99.92			
2.22				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	300,000,000.00	299,639,400.00	99.88			
2.22				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	300,000,000.00	299,639,400.00	99.88			
2.22				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100,000,000.00	99,647,000.00	99.65			
2.22				Penetapan Cagar Budaya	200,000,000.00	199,992,400.00	100.00			
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3,554,504,290.00	3,218,158,278.00	90.54			
2.23		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			3,554,504,290.00	3,218,158,278.00	90.54			
2.23				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,828,143,790.00	2,559,717,193.00	90.51			
2.23				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,376,020,490.00	2,130,897,779.00	89.68			
2.23				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,285,462,490.00	2,040,339,779.00	89.27			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.23				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90,558,000.00	90,558,000.00	100.00			
2.23				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,840,000.00	5,820,000.00	85.09			
2.23				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,840,000.00	5,820,000.00	85.09			
2.23				Administrasi Umum Perangkat Daerah	208,063,200.00	203,738,300.00	97.92			
2.23				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68,414,500.00	67,739,600.00	99.01			
2.23				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,671,300.00	4,021,300.00	52.42			
2.23				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131,977,400.00	131,977,400.00	100.00			
2.23				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,798,100.00	146,192,114.00	89.25			
2.23				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,012,800.00	2,012,800.00	100.00			
2.23				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,410,000.00	45,184,014.00	80.10			
2.23				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,375,300.00	98,995,300.00	93.95			
2.23				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,422,000.00	73,069,000.00	99.52			
2.23				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73,422,000.00	73,069,000.00	99.52			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.23				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	689,532,000.00	623,242,585.00	90.39			
2.23				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	329,787,500.00	292,472,185.00	88.69			
2.23				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63,859,900.00	62,322,385.00	97.59			
2.23				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	38,088,500.00	26,808,500.00	70.38			
2.23				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	83,714,300.00	75,226,500.00	89.86			
2.23				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	144,124,800.00	128,114,800.00	88.89			
2.23				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	359,744,500.00	330,770,400.00	91.95			
2.23				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	14,710,400.00	3,488,400.00	23.71			
2.23				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00			
2.23				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	122,551,200.00	121,061,200.00	98.78			
2.23				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	199,982,900.00	183,720,800.00	91.87			
2.23				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	36,828,500.00	35,198,500.00	95.57			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.23				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	36,828,500.00	35,198,500.00	95.57			
2.23				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	36,828,500.00	35,198,500.00	95.57			
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				77,580,875.00	77,431,600.00	99.81			
2.24				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	77,580,875.00	77,431,600.00	99.81			
2.24				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	32,473,945.00	32,401,400.00	99.78			
2.24				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	32,473,945.00	32,401,400.00	99.78			
2.24				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	18,933,830.00	18,915,800.00	99.90			
2.24				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	18,933,830.00	18,915,800.00	99.90			
2.24				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	26,173,100.00	26,114,400.00	99.78			
2.24				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	26,173,100.00	26,114,400.00	99.78			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

III. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan terbagi menjadi 5 (lima) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp21,553,907,022.00,-** terealisasi sebesar **Rp20,002,463,698.66,-** atau **92.80** persen dengan masing-masing perangkat daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.13
Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Penjelasan terkait kebijakan ada pada Sub BAB 3.2		21,553,907,022.00	20,002,463,698.66	92.80			Penjelasan terkait Tindak Lanjut ada pada Sub BAB 3.3
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				613,510,272.00	601,958,140.00	98.12			
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			613,510,272.00	601,958,140.00	98.12			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	79,758,114.00	76,684,600.00	96.15			
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	79,758,114.00	76,684,600.00	96.15			
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	79,758,114.00	76,684,600.00	96.15			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	370,027,700.00	363,076,600.00	98.12			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	370,027,700.00	363,076,600.00	98.12			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	370,027,700.00	363,076,600.00	98.12			
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	139,101,000.00	138,090,740.00	99.27			
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	139,101,000.00	138,090,740.00	99.27			
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	139,101,000.00	138,090,740.00	99.27			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	24,623,458.00	24,106,200.00	97.90			

				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24,623,458.00	24,106,200.00	97.90			
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24,623,458.00	24,106,200.00	97.90			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,065,280,255.00	1,064,276,801.00	99.91			
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				1,065,280,255.00	1,064,276,801.00	99.91			
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	128,570,298.00	128,435,400.00	99.90			
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	81,415,048.00	81,367,200.00	99.94			
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	81,415,048.00	81,367,200.00	99.94			
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	47,155,250.00	47,068,200.00	99.82			
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	47,155,250.00	47,068,200.00	99.82			
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	867,514,174.00	866,646,443.00	99.90			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	867,514,174.00	866,646,443.00	99.90			
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	267,816,946.00	266,958,503.00	99.68			
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	599,697,228.00	599,687,940.00	100.00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	69,195,783.00	69,194,958.00	100.00			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	69,195,783.00	69,194,958.00	100.00			
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	48,895,858.00	48,895,858.00	100.00			

				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	20,299,925.00	20,299,100.00	100.00			
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				14,853,871,026.00	13,825,557,872.50	93.08			
3.27		Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura			8,717,597,777.00	8,093,189,615.50	92.84			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,615,314,622.00	7,137,918,481.50	93.73			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,478,714,516.00	6,033,055,980.50	93.12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,392,418,016.00	5,946,759,480.50	93.03			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86,296,500.00	86,296,500.00	100.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,000,000.00	14,800,000.00	77.89			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,000,000.00	14,800,000.00	77.89			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23,740,000.00	23,739,200.00	100.00			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23,740,000.00	23,739,200.00	100.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	333,124,206.00	327,935,661.00	98.44			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173,126,540.00	167,960,732.00	97.02			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,997,666.00	9,975,868.00	99.78			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	149,999,061.00	100.00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,794,500.00	8,269,500.00	70.11			
				Pengadaan Mebel	11,794,500.00	8,269,500.00	70.11			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417,381,400.00	414,034,840.00	99.20			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,806,000.00	68,459,440.00	99.50			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,575,400.00	345,575,400.00	99.14			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331,560,000.00	316,083,300.00	95.33			

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331,560,000.00	316,083,300.00	95.33			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	42,829,482.00	42,465,873.00	99.15			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	42,829,482.00	42,465,873.00	99.15			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20,507,232.00	20,310,990.00	99.04			
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22,322,250.00	22,154,883.00	99.25			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	258,309,100.00	251,517,824.00	97.37			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	258,309,100.00	251,517,824.00	97.37			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	33,524,146.00	33,394,000.00	99.61			
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	224,784,954.00	218,123,824.00	97.04			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	62,492,344.00	61,533,254.00	98.47			
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	62,492,344.00	61,533,254.00	98.47			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62,492,344.00	61,533,254.00	98.47			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	738,652,229.00	599,754,183.00	81.20			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	738,652,229.00	599,754,183.00	81.20			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	642,785,050.00	511,069,671.00	79.51			

				dan Desa						
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	95,867,179.00	88,684,512.00	92.51			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,308,262.00	14,308,262.00	100.00			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,308,262.00	14,308,262.00	100.00			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,308,262.00	14,308,262.00	100.00			
3.27				Dinas Perkebunan dan Peternakan	6,136,273,249.00	5,732,368,257.00	93.42			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,659,861,244.00	4,378,802,564.00	93.97			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,739,689,728.00	3,490,359,223.00	93.33			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,631,621,728.00	3,382,291,223.00	93.13			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103,668,000.00	103,668,000.00	100.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,240,000.00	13,620,000.00	89.37			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,240,000.00	13,620,000.00	89.37			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	14,700,000.00	98.00			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	14,700,000.00	98.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	160,632,806.00	151,757,089.00	94.47			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,999,400.00	4,611,900.00	92.25			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,712,860.00	16,985,900.00	86.17			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,440,000.00	14,440,000.00	100.00			

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,747,146.00	11,435,946.00	72.62			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,233,400.00	96,783,343.00	98.52			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53,797,710.00	53,613,000.00	99.66			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,797,710.00	53,613,000.00	99.66			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436,993,000.00	417,993,662.00	95.65			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	788,800.00	780,000.00	98.88			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,342,400.00	81,426,262.00	86.31			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341,861,800.00	335,787,400.00	98.22			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238,508,000.00	236,759,590.00	99.27			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203,248,000.00	201,499,590.00	99.14			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,860,000.00	14,860,000.00	100.00			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,213,991,060.00	1,126,539,633.00	92.80			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	53,063,335.00	9,124,225.00	17.19			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	53,063,335.00	9,124,225.00	17.19			

				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	809,127,000.00	769,507,775.00	95.10			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12,056,050.00	11,700,200.00	97.05			
				Penjaminan Kemumian dan Kelestarian SDG Tanaman	797,070,950.00	757,807,575.00	95.07			
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	351,800,725.00	347,907,633.00	98.89			
				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	351,800,725.00	347,907,633.00	98.89			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	50,153,470.00	42,808,661.00	85.36			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	50,153,470.00	42,808,661.00	85.36			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	28,297,920.00	21,606,200.00	76.35			
				Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	21,855,550.00	21,202,461.00	97.01			
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	140,250,200.00	130,551,960.00	93.09			
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	97,326,900.00	94,148,160.00	96.73			
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97,326,900.00	94,148,160.00	96.73			
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	42,923,300.00	36,403,800.00	84.81			
				Pengawasan Peredaran Produk Hewan	42,923,300.00	36,403,800.00	84.81			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	17,830,050.00	7,472,473.00	41.91			

				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	17,830,050.00	7,472,473.00	41.91			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	17,830,050.00	7,472,473.00	41.91			
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	30,004,500.00	25,424,400.00	84.74			
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30,004,500.00	25,424,400.00	84.74			
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	30,004,500.00	25,424,400.00	84.74			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	24,182,725.00	20,768,566.00	85.88			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	24,182,725.00	20,768,566.00	85.88			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	24,182,725.00	20,768,566.00	85.88			
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				937,327,642.00	922,960,833.47	98.47			
3.30		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			937,327,642.00	922,960,833.47	98.47			
3.30				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	154,790,134.00	154,756,483.47	99.98			
3.30				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	142,034,484.00	142,030,483.47	100.00			
3.30				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	142,034,484.00	142,030,483.47	100.00			
3.30				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	12,755,650.00	12,726,000.00	99.77			
3.30				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12,755,650.00	12,726,000.00	99.77			
3.30				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	218,803,800.00	218,720,200.00	99.96			
3.30				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	218,803,800.00	218,720,200.00	99.96			

3.30				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	13,075,600.00	13,059,600.00	99.88			
3.30				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	205,728,200.00	205,660,600.00	99.97			
3.30				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	52,643,700.00	52,627,250.00	99.97			
3.30				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	52,643,700.00	52,627,250.00	99.97			
3.30				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	29,067,400.00	29,067,400.00	100.00			
3.30				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	23,576,300.00	23,559,850.00	99.93			
3.30				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	511,090,008.00	496,856,900.00	97.22			
3.30				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	511,090,008.00	496,856,900.00	97.22			
3.30				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	511,090,008.00	496,856,900.00	97.22			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4,083,917,827.00	3,587,710,051.69	87.85			
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4,083,917,827.00	3,587,710,051.69	87.85			
3.31				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,766,405,007.00	3,274,049,136.69	86.93			
3.31				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,601,600.00	28,218,200.00	98.66			
3.31				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,601,600.00	28,218,200.00	98.66			
3.31				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,909,820,248.00	2,426,433,204.00	83.39			
3.31				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,805,948,248.00	2,322,561,204.00	82.77			
3.31				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103,872,000.00	103,872,000.00	100.00			
3.31				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,120,000.00	12,120,000.00	100.00			

3.31				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,120,000.00	12,120,000.00	100.00			
3.31				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,812,500.00	13,811,600.00	99.99			
3.31				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,812,500.00	13,811,600.00	99.99			
3.31				Administrasi Umum Perangkat Daerah	89,812,240.00	89,298,727.00	99.43			
3.31				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,742,400.00	9,736,400.00	99.94			
3.31				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,786,900.00	8,775,290.00	99.87			
3.31				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,282,940.00	15,800,000.00	97.03			
3.31				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,000,000.00	54,987,037.00	99.98			
3.31				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,572,600.00	34,018,732.00	98.40			
3.31				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,004,500.00	28,453,192.00	98.10			
3.31				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,568,100.00	5,565,540.00	99.95			
3.31				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420,974,600.00	417,949,150.00	99.28			
3.31				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,227,500.00	39,289,150.00	97.67			
3.31				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380,747,100.00	378,660,000.00	99.45			
3.31				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256,691,219.00	252,199,523.69	98.25			
3.31				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112,872,000.00	112,628,625.00	99.78			
3.31				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,498,000.00	42,249,680.00	90.86			
3.31				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97,321,219.00	97,321,218.69	100.00			
3.31				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	276,248,870.00	272,670,915.00	98.70			

3.31				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	276,248,870.00	272,670,915.00	98.70			
3.31				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	216,231,950.00	212,873,715.00	98.45			
3.31				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	60,016,920.00	59,797,200.00	99.63			
3.31				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	41,263,950.00	40,990,000.00	99.34			
3.31				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	41,263,950.00	40,990,000.00	99.34			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 2 (dua) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp95,029,811,490.00,-** terealisasi sebesar **Rp89,245,658,061.07,-** atau **93,91** persen dengan masing-masing perangkat daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Penjelasan terkait kebijakan ada pada Sub BAB 3.2		95,029,811,490.00	89,245,658,061.07	93.91			Penjelasan terkait tindak Lanjut DPRD ada pada Sub BAB 3.3
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				42,130,259,970.00	39,313,961,146.07	93.32			
4.01		Sekretariat Daerah			42,130,259,970.00	39,313,961,146.07	93.32			
4.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,445,257,020.00	32,715,423,249.07	92.30			
4.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,779,600.00	42,662,300.00	99.73			
4.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,779,600.00	42,662,300.00	99.73			
4.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,121,581,782.00	10,413,383,842.00	93.63			
4.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,425,726,112.00	9,765,719,111.00	93.67			
4.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	654,819,570.00	606,811,531.00	92.67			
4.01				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41,036,100.00	40,853,200.00	99.55			

4.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	44,155,000.00	43,441,140.00	98.38			
4.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44,155,000.00	43,441,140.00	98.38			
4.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	358,685,365.00	357,890,665.00	99.78			
4.01				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	139,725,000.00	139,310,100.00	99.70			
4.01				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,495,165.00	45,474,165.00	99.95			
4.01				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173,465,200.00	173,106,400.00	99.79			
4.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,757,984,782.00	7,666,548,870.00	98.82			
4.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,464,100.00	36,316,275.00	96.94			
4.01				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,734,791,082.00	2,681,753,828.00	98.06			
4.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	799,604,000.00	784,789,096.00	98.15			
4.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,132,500.00	19,485,396.00	74.56			
4.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	133,999,300.00	121,738,225.00	90.85			
4.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,025,993,800.00	3,022,514,000.00	99.89			
4.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000.00	999,952,050.00	100.00			
4.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,598,944,384.00	3,557,763,304.00	98.86			
4.01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,640,100,000.00	2,612,533,200.00	98.96			

4.01				Pengadaan Mebel	177,980,767.00	173,979,600.00	97.75			
4.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,618,500.00	71,743,004.00	92.43			
4.01				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	703,245,117.00	699,507,500.00	99.47			
4.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,105,887,079.00	2,874,710,339.00	92.56			
4.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,660,000.00	16,500,000.00	99.04			
4.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,174,507,479.00	1,104,291,339.00	94.02			
4.01				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236,000,000.00	235,959,000.00	99.98			
4.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,678,719,600.00	1,517,960,000.00	90.42			
4.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,298,768,911.00	2,134,616,555.07	92.86			
4.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413,902,900.00	342,704,737.00	82.80			
4.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,101,445,210.00	1,069,838,379.00	97.13			
4.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178,346,541.00	168,031,865.00	94.22			
4.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83,309,200.00	82,516,600.00	99.05			

4.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	337,849,700.00	288,036,774.07	85.26			
4.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183,915,360.00	183,488,200.00	99.77			
4.01				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,018,920,555.00	477,208,570.00	46.83			
4.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	607,565,625.00	134,412,790.00	22.12			
4.01				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	411,354,930.00	342,795,780.00	83.33			
4.01				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,425,472,547.00	1,328,067,099.00	93.17			
4.01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	857,365,195.00	827,263,400.00	96.49			
4.01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	526,720,203.00	459,620,950.00	87.26			
4.01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	41,387,149.00	41,182,749.00	99.51			
4.01				Penataan Organisasi	335,077,015.00	326,698,701.00	97.50			
4.01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	86,102,700.00	84,239,100.00	97.84			
4.01				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	141,168,505.00	137,176,105.00	97.17			
4.01				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	47,223,100.00	46,684,600.00	98.86			

4.01				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	13,035,400.00	12,572,000.00	96.45			
4.01				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	47,547,310.00	46,026,896.00	96.80			
4.01				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4,337,000,000.00	3,492,431,864.00	80.53			
4.01				Fasilitasi Keprotokolan	2,687,000,000.00	2,383,633,793.00	88.71			
4.01				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,650,000,000.00	1,108,798,071.00	67.20			
4.01				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,096,798,980.00	6,021,080,029.00	98.76			
4.01				Administrasi Tata Pemerintahan	599,918,175.00	597,046,681.00	99.52			
4.01				Penataan Administrasi Pemerintahan	82,818,940.00	82,075,771.00	99.10			
4.01				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	433,872,850.00	432,115,500.00	99.59			
4.01				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	83,226,385.00	82,855,410.00	99.55			
4.01				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4,790,678,155.00	4,718,792,377.00	98.50			
4.01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3,809,084,826.00	3,758,688,081.00	98.68			
4.01				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	727,306,428.00	716,643,614.00	98.53			
4.01				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	254,286,901.00	243,460,682.00	95.74			
4.01				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	621,688,200.00	621,153,921.00	99.91			

4.01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	321,688,200.00	321,291,724.00	99.88			
4.01				Fasilitasi Bantuan Hukum	300,000,000.00	299,862,197.00	99.95			
4.01				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	84,514,450.00	84,087,050.00	99.49			
4.01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	84,514,450.00	84,087,050.00	99.49			
4.01				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	588,203,970.00	577,457,868.00	98.17			
4.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	142,671,235.00	140,178,600.00	98.25			
4.01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	23,147,400.00	22,997,100.00	99.35			
4.01				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100,925,400.00	98,730,700.00	97.83			
4.01				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18,598,435.00	18,450,800.00	99.21			
4.01				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	32,211,900.00	31,637,000.00	98.22			
4.01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3,221,200.00	3,188,000.00	98.97			
4.01				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9,122,000.00	8,924,400.00	97.83			
4.01				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19,868,700.00	19,524,600.00	98.27			
4.01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	290,675,610.00	283,980,918.00	97.70			
4.01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124,530,125.00	123,906,375.00	99.50			
4.01				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	114,006,925.00	108,554,538.00	95.22			

4.01				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52,138,560.00	51,520,005.00	98.81			
4.01				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	122,645,225.00	121,661,350.00	99.20			
4.01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	76,321,300.00	75,917,000.00	99.47			
4.01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	21,724,800.00	21,241,200.00	97.77			
4.01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	24,599,125.00	24,503,150.00	99.61			
4.02	SEKRETARIAT DPRD				52,899,551,520.00	49,931,696,915.00	94.39			
4.02		Sekretariat DPRD			52,899,551,520.00	49,931,696,915.00	94.39			
4.02				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,916,755,386.00	31,159,735,038.00	94.66			
4.02				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,380,949.00	18,270,600.00	99.40			
4.02				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,380,949.00	18,270,600.00	99.40			
4.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,663,140,697.23	3,444,948,185.00	94.04			
4.02				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,599,614,537.23	2,383,762,499.00	91.70			
4.02				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,023,085,760.00	1,021,425,386.00	99.84			

4.02				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,440,400.00	39,760,300.00	98.32			
4.02				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210,100,600.00	195,973,865.00	93.28			
4.02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68,850,600.00	68,657,940.00	99.72			
4.02				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43,750,000.00	34,806,800.00	79.56			
4.02				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	97,500,000.00	92,509,125.00	94.88			
4.02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,717,253,200.00	1,652,137,773.00	96.21			
4.02				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,275,000.00	28,142,000.00	99.53			
4.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186,187,300.00	163,542,575.00	87.84			
4.02				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64,150,500.00	63,103,298.00	98.37			
4.02				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,947,000.00	47,802,550.00	55.62			
4.02				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	887,392,500.00	887,337,000.00	99.99			
4.02				Fasilitasi Kunjungan Tamu	340,300,900.00	338,316,650.00	99.42			
4.02				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,000,000.00	123,893,700.00	99.11			
4.02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,227,958,600.00	2,103,300,000.00	94.40			
4.02				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,227,958,600.00	2,103,300,000.00	94.40			

4.02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,330,951,400.00	1,304,716,768.00	98.03			
4.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295,163,100.00	291,193,668.00	98.66			
4.02				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114,400,000.00	114,400,000.00	100.00			
4.02				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	921,388,300.00	899,123,100.00	97.58			
4.02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598,125,300.00	567,684,284.00	94.91			
4.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,641,300.00	85,233,223.00	88.20			
4.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174,000,000.00	173,963,212.00	99.98			
4.02				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,290,000.00	29,121,000.00	90.19			
4.02				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252,255,000.00	236,520,971.00	93.76			
4.02				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,440,000.00	5,400,000.00	99.26			
4.02				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37,499,000.00	37,445,878.00	99.86			
4.02				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18,621,275,881.77	17,378,940,968.00	93.33			

4.02				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18,455,579,081.77	17,238,966,968.00	93.41			
4.02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	115,696,800.00	113,224,000.00	97.86			
4.02				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50,000,000.00	26,750,000.00	53.50			
4.02				Layanan Administrasi DPRD	4,529,568,758.00	4,493,762,595.00	99.21			
4.02				Fasilitasi Fraksi DPRD	528,916,500.00	524,620,827.00	99.19			
4.02				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4,000,652,258.00	3,969,141,768.00	99.21			
4.02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19,982,796,134.00	18,771,961,877.00	93.94			
4.02				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	318,300,000.00	258,889,888.00	81.34			
4.02				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	143,300,000.00	134,796,564.00	94.07			
4.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	125,000,000.00	124,093,324.00	99.27			
4.02				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50,000,000.00	-	0.00			
4.02				Pembahasan Kebijakan Anggaran	185,883,500.00	184,634,400.00	99.33			
4.02				Pembahasan KUA dan PPAS	60,000,000.00	59,105,900.00	98.51			
4.02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
4.02				Pembahasan APBD	85,883,500.00	85,554,000.00	99.62			
4.02				Pembahasan APBD Perubahan	20,000,000.00	19,974,500.00	99.87			
4.02				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			

4.02				Peningkatan Kapasitas DPRD	2,201,986,934.00	2,153,659,588.00	97.81			
4.02				Pendalaman Tugas DPRD	1,662,500,000.00	1,654,843,988.00	99.54			
4.02				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	288,000,000.00	264,000,000.00	91.67			
4.02				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100,000,000.00	83,640,000.00	83.64			
4.02				Publikasi dan Dokumentasi DPRD	151,486,934.00	151,175,600.00	99.79			
4.02				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,776,625,700.00	2,656,037,480.00	95.66			
4.02				Kunjungan Kerja dalam Daerah	25,000,000.00	7,435,000.00	29.74			
4.02				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	75,000,000.00	73,727,480.00	98.30			
4.02				Pelaksanaan Reses	2,676,625,700.00	2,574,875,000.00	96.20			
4.02				Fasilitasi Tugas DPRD	14,500,000,000.00	13,518,740,521.00	93.23			
4.02				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11,500,000,000.00	10,518,803,352.00	91.47			
4.02				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3,000,000,000.00	2,999,937,169.00	100.00			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi menjadi 4 (empat) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- 1. Perencanaan**
- 2. Kepegawaian**
- 3. Pendidikan dan Pelatihan**
- 4. Penelitian dan Pengembangan**

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp253,439,889,882.00,-** terealisasi sebesar **Rp236,289,095,650,00,-** atau **93,23** persen dengan masing-masing perangkat daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintrahan
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				253,439,889,882	236,289,095,650	93.23			
5.01	PERENCANAAN				8,069,641,929.00	7,684,005,093.00	95.22			
5.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan			8,069,641,929.00	7,684,005,093.00	95.22			
5.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,026,342,468.00	4,724,671,513.00	94.00			
5.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,931,239,679.00	3,701,601,473.00	94.16			
5.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,812,523,679.00	3,587,553,473.00	94.10			
5.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118,716,000.00	114,048,000.00	96.07			
5.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	173,400,690.00	122,161,466.00	70.45			
5.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84,710,000.00	34,000,000.00	40.14			
5.01				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88,690,690.00	88,161,466.00	99.40			
5.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	388,134,899.00	387,062,289.00	99.72			
5.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,420,800.00	2,413,000.00	99.68			

5.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,598,500.00	42,500,000.00	99.77			
5.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,575,700.00	50,467,700.00	99.79			
5.01				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,103,400.00	11,088,000.00	99.86			
5.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57,310,500.00	57,220,000.00	99.84			
5.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00			
5.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,125,999.00	220,373,589.00	99.66			
5.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252,144,300.00	235,529,675.00	93.41			
5.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	408,000.00	400,000.00	98.04			
5.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,402,000.00	101,809,675.00	86.72			
5.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134,334,300.00	133,320,000.00	99.24			
5.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281,422,900.00	278,316,610.00	98.90			
5.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215,055,700.00	212,630,710.00	98.87			
5.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,480,000.00	29,332,900.00	99.50			
5.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,887,200.00	36,353,000.00	98.55			

5.01				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,908,892,730.00	1,860,687,425.00	97.47			
5.01				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	978,320,200.00	967,381,580.00	98.88			
5.01				Pelaksanaan Konsultasi Publik	14,597,000.00	14,260,000.00	97.69			
5.01				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	193,235,000.00	187,336,580.00	96.95			
5.01				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	770,488,200.00	765,785,000.00	99.39			
5.01				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	556,076,430.00	528,219,539.00	94.99			
5.01				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300,200,000.00	290,011,539.00	96.61			
5.01				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	255,876,430.00	238,208,000.00	93.09			
5.01				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	374,496,100.00	365,086,306.00	97.49			
5.01				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	301,934,800.00	294,476,800.00	97.53			

5.01				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	72,561,300.00	70,609,506.00	97.31			
5.01				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,134,406,731.00	1,098,646,155.00	96.85			
5.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	307,658,206.00	298,822,187.00	97.13			
5.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52,673,672.00	51,652,400.00	98.06			
5.01				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2,178,700.00	2,178,700.00	100.00			
5.01				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2,028,000.00	2,028,000.00	100.00			
5.01				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	21,029,800.00	20,413,600.00	97.07			
5.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111,687,950.00	108,493,237.00	97.14			

5.01				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4,484,300.00	4,484,000.00	99.99			
5.01				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113,575,784.00	109,572,250.00	96.48			
5.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	320,224,678.00	308,043,244.00	96.20			
5.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83,080,374.00	78,511,900.00	94.50			
5.01				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41,040,345.00	40,416,950.00	98.48			
5.01				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8,869,412.00	7,686,200.00	86.66			
5.01				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	13,019,874.00	12,119,400.00	93.08			
5.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125,455,737.00	124,395,673.00	99.16			

5.01				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25,033,572.00	23,255,221.00	92.90			
5.01				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8,534,011.00	7,780,000.00	91.16			
5.01				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	15,191,353.00	13,877,900.00	91.35			
5.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	506,523,847.00	491,780,724.00	97.09			
5.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44,540,800.00	38,211,077.00	85.79			
5.01				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	24,148,432.00	23,800,200.00	98.56			
5.01				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23,638,229.00	20,780,000.00	87.91			
5.01				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	66,726,286.00	66,725,322.00	100.00			

5.01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	227,190,493.00	225,908,614.00	99.44			
5.01				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	46,661,092.00	44,250,800.00	94.83			
5.01				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7,638,229.00	6,690,000.00	87.59			
5.01				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	65,980,286.00	65,414,711.00	99.14			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				288,307,800.00	286,044,616.00	99.22			
5.05				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	288,307,800.00	286,044,616.00	99.22			
5.05				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	288,307,800.00	286,044,616.00	99.22			
5.05				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	288,307,800.00	286,044,616.00	99.22			
5.02	KEUANGAN				238,107,341,740.00	221,753,479,271.00	93.13			
5.02		Badan Keuangan Daerah			238,107,341,740.00	221,753,479,271.00	93.13			
5.02				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,342,127,008.00	8,951,568,521.00	86.55			

5.02				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,936,700.00	43,942,850.00	91.67			
5.02				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47,936,700.00	43,942,850.00	91.67			
5.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,340,842,430.00	7,104,833,354.00	85.18			
5.02				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,926,027,430.00	6,722,965,854.00	84.82			
5.02				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	414,815,000.00	381,867,500.00	92.06			
5.02				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31,920,000.00	31,914,200.00	99.98			
5.02				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31,920,000.00	31,914,200.00	99.98			
5.02				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141,018,000.00	140,838,000.00	99.87			
5.02				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3,698,000.00	3,698,000.00	100.00			
5.02				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	137,320,000.00	137,140,000.00	99.87			
5.02				Administrasi Umum Perangkat Daerah	702,098,405.00	700,046,074.00	99.71			
5.02				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,996,800.00	14,930,900.00	99.56			
5.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105,195,980.00	104,173,500.00	99.03			
5.02				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159,996,600.00	159,942,100.00	99.97			

5.02				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84,910,200.00	84,320,850.00	99.31			
5.02				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79,999,024.00	79,900,000.00	99.88			
5.02				Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,000,000.00	6,800,000.00	97.14			
5.02				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249,999,801.00	249,978,724.00	99.99			
5.02				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26,485,000.00	26,390,250.00	99.64			
5.02				Pengadaan Mebel	26,485,000.00	26,390,250.00	99.64			
5.02				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654,577,698.00	512,515,214.00	78.30			
5.02				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,593,600.00	12,000,000.00	95.29			
5.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276,999,198.00	244,715,214.00	88.35			
5.02				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364,984,900.00	255,800,000.00	70.09			
5.02				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397,248,775.00	391,088,579.00	98.45			
5.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311,296,375.00	306,801,079.00	98.56			
5.02				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,410,000.00	25,850,000.00	97.88			
5.02				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,420,000.00	31,580,000.00	97.41			

5.02				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,122,400.00	26,857,500.00	99.02			
5.02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	224,913,273,638.00	210,359,584,746.00	93.53			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,198,164,870.00	1,162,433,321.00	97.02			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	27,858,400.00	26,097,000.00	93.68			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24,434,800.00	24,092,000.00	98.60			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	692,284,045.00	659,167,419.00	95.22			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	114,914,025.00	114,534,025.00	99.67			
5.02				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	338,673,600.00	338,542,877.00	99.96			
5.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	759,553,569.00	724,090,034.00	95.33			

5.02				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	235,699,670.00	231,065,392.00	98.03			
5.02				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	36,096,300.00	34,900,000.00	96.69			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28,979,750.00	26,742,000.00	92.28			
5.02				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	153,043,349.00	138,507,608.00	90.50			
5.02				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6,417,500.00	3,572,500.00	55.67			
5.02				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299,317,000.00	289,302,534.00	96.65			

5.02				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	367,311,000.00	358,011,800.00	97.47			
5.02				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	26,286,000.00	25,918,200.00	98.60			
5.02				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	81,685,600.00	81,351,150.00	99.59			
5.02				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156,997,500.00	154,609,680.00	98.48			
5.02				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	45,941,900.00	43,962,770.00	95.69			
5.02				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56,400,000.00	52,170,000.00	92.50			
5.02				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	222,588,244,199.00	208,115,049,591.00	93.50			

5.02				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6,473,509,043.00	6,473,509,043.00	100.00			
5.02				Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1,200,000,000.00	1,199,693,778.00	99.97			
5.02				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	205,817,240,000.00	88,200,265,812.00	42.85			
5.02				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6,320,769,081.00	-	0.00			
5.02				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,776,726,075.00	112,241,580,958.00	4042.23			
5.02				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,508,216,589.00	1,262,076,665.00	83.68			
5.02				Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,508,216,589.00	1,262,076,665.00	83.68			
5.02				Penyusunan Standar Harga	139,881,650.00	121,918,400.00	87.16			
5.02				Inventarisasi Barang Milik Daerah	310,899,950.00	304,570,400.00	97.96			
5.02				Pengamanan Barang Milik Daerah	470,252,431.00	340,045,700.00	72.31			
5.02				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	145,586,444.00	141,032,665.00	96.87			
5.02				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	304,868,225.00	238,617,700.00	78.27			
5.02				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	136,727,889.00	115,891,800.00	84.76			

5.02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,343,724,505.00	1,180,249,339.00	87.83			
5.02				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,343,724,505.00	1,180,249,339.00	87.83			
5.02				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97,264,413.00	88,653,000.00	91.15			
5.02				Penetapan Wajib Pajak Daerah	200,110,554.00	193,755,400.00	96.82			
5.02				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	380,731,808.00	343,273,391.00	90.16			
5.02				Penagihan Pajak Daerah	249,613,080.00	222,690,448.00	89.21			
5.02				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	366,004,650.00	298,707,300.00	81.61			
5.02				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50,000,000.00	33,169,800.00	66.34			
5.03	KEPEGAWAIAN				5,957,675,413.00	5,550,840,936.00	93.17			
5.03		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			5,957,675,413.00	5,550,840,936.00	93.17			
5.03				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,294,292,371.00	4,152,598,139.00	96.70			
5.03				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,464,800.00	20,164,000.00	98.53			
5.03				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,464,800.00	20,164,000.00	98.53			

5.03				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,570,370,921.00	3,460,963,938.00	96.94			
5.03				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,470,596,921.00	3,361,189,938.00	96.85			
5.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,774,000.00	99,774,000.00	100.00			
5.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,600,000.00	12,600,000.00	80.77			
5.03				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,600,000.00	12,600,000.00	80.77			
5.03				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000.00	30,274,300.00	86.50			
5.03				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000.00	30,274,300.00	86.50			
5.03				Administrasi Umum Perangkat Daerah	278,933,200.00	275,790,177.00	98.87			
5.03				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82,003,400.00	80,306,433.00	97.93			
5.03				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,934,600.00	29,882,090.00	99.82			
5.03				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,995,200.00	16,995,200.00	100.00			
5.03				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	148,606,454.00	99.07			
5.03				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,197,900.00	172,178,930.00	91.49			
5.03				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,000,500.00	70,098,930.00	82.47			
5.03				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103,197,400.00	102,080,000.00	98.92			

5.03				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185,725,550.00	180,626,794.00	97.25			
5.03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131,895,550.00	128,257,794.00	97.24			
5.03				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,330,000.00	11,299,000.00	99.73			
5.03				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,500,000.00	41,070,000.00	96.64			
5.03				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,663,383,042.00	1,398,242,797.00	84.06			
5.03				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	396,604,275.00	370,682,352.00	93.46			
5.03				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	349,893,600.00	326,052,791.00	93.19			
5.03				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	19,995,675.00	18,613,200.00	93.09			
5.03				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	26,715,000.00	26,016,361.00	97.38			
5.03				Mutasi dan Promosi ASN	1,169,653,804.00	950,664,455.00	81.28			
5.03				Pengelolaan Mutasi ASN	1,112,829,304.00	893,856,926.00	80.32			
5.03				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	56,824,500.00	56,807,529.00	99.97			
5.03				Pengembangan Kompetensi ASN	54,581,213.00	52,389,290.00	95.98			
5.03				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	54,581,213.00	52,389,290.00	95.98			
5.03				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42,543,750.00	24,506,700.00	57.60			

5.03				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	23,000,000.00	22,756,700.00	98.94			
5.03				Pembinaan Disiplin ASN	19,543,750.00	1,750,000.00	8.95			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,016,923,000.00	1,014,725,734.00	99.78			
5.04				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,016,923,000.00	1,014,725,734.00	99.78			
5.04				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,016,923,000.00	1,014,725,734.00	99.78			
5.04				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,016,923,000.00	1,014,725,734.00	99.78			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

VI. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (Urusan) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Inspektorat Daerah

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar **Rp10,576,764,778.0,-** terealisasi sebesar **Rp9,958,413,842.00,-** atau **94,15** persen dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Adapun rincian realisasi masing-masing Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10,576,764,778.00	9,958,413,842.00	94.15			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				10,576,764,778.00	9,958,413,842.00	94.15			
6.01		Inspektorat			10,576,764,778.00	9,958,413,842.00	94.15			
6.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,475,963,976.00	8,932,059,169.00	94.26			
6.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,284,872,558.00	6,892,436,610.00	94.61			
6.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,135,400,558.00	6,747,764,610.00	94.57			
6.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149,472,000.00	144,672,000.00	96.79			
6.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338,441,900.00	294,122,220.00	86.90			
6.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	304,671,000.00	285,397,820.00	93.67			
6.01				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33,770,900.00	8,724,400.00	25.83			
6.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,062,774,918.00	1,008,349,950.00	94.88			
6.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,538,200.00	14,422,300.00	87.21			
6.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525,261,930.00	498,234,599.00	94.85			

6.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102,631,500.00	91,662,100.00	89.31			
6.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,551,988.00	18,480,000.00	75.27			
6.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	43,791,300.00	35,808,500.00	81.77			
6.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000.00	349,742,451.00	99.93			
6.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243,087,900.00	241,813,500.00	99.48			
6.01				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243,087,900.00	241,813,500.00	99.48			
6.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320,241,800.00	275,528,223.00	86.04			
6.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,295,200.00	10,258,000.00	99.64			
6.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,760,600.00	86,346,123.00	69.77			
6.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,186,000.00	178,924,100.00	96.10			
6.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226,544,900.00	219,808,666.00	97.03			
6.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,357,300.00	27,851,836.00	98.22			
6.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,707,600.00	157,603,830.00	96.27			

6.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,480,000.00	34,353,000.00	99.63			
6.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	913,724,796.00	887,596,264.00	97.14			
6.01				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	811,309,296.00	790,101,264.00	97.39			
6.01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	113,219,000.00	111,735,335.00	98.69			
6.01				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	207,185,368.00	205,375,000.00	99.13			
6.01				Reviu Laporan Kinerja	50,618,600.00	50,169,000.00	99.11			
6.01				Reviu Laporan Keuangan	184,957,400.00	177,508,529.00	95.97			
6.01				Pengawasan Desa	183,105,660.00	179,552,400.00	98.06			
6.01				Kerja Sama Pengawasan Internal	11,490,100.00	11,450,000.00	99.65			
6.01				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60,733,168.00	54,311,000.00	89.43			
6.01				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102,415,500.00	97,495,000.00	95.20			
6.01				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	102,415,500.00	97,495,000.00	95.20			
6.01				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	187,076,006.00	138,758,409.00	74.17			
6.01				Pendampingan dan Asistensi	187,076,006.00	138,758,409.00	74.17			
6.01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	16,651,006.00	15,880,000.00	95.37			

6.01				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49,550,000.00	39,052,500.00	78.81			
6.01				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	87,120,000.00	66,763,409.00	76.63			
6.01				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33,755,000.00	17,062,500.00	50.55			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025

VII. Unsur Kewilayahan

Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 (Urusan) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Kecamatan yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan Target Anggaran sebesar Rp**35,671,426,314.00,-** dan Realisasi sebesar Rp**32,960,801,818.74** atau **92,40** persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Unsur Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Unsur Kewilayahan
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	UNSUR KEWILAYAHAN				35,671,426,314.00	32,960,801,818.74	92.40			
7.01	KECAMATAN				35,671,426,314.00	32,960,801,818.74	92.40			
7.01		Kecamatan Tebo Tengah			6,132,911,116.00	5,816,422,400.74	94.84			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,742,872,227.00	4,528,508,111.74	95.48			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,974,107,531.00	3,803,858,341.00	95.72			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,852,319,531.00	3,682,070,341.00	95.58			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121,788,000.00	121,788,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,860,000.00	10,860,000.00	100.00			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,860,000.00	10,860,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56,853,506.00	55,539,924.00	97.69			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56,853,506.00	55,539,924.00	97.69			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	167,416,440.00	166,978,782.00	99.74			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,908,000.00	36,871,200.00	99.90			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,780,100.00	46,431,700.00	99.26			
7.01				Fasilitas Kunjungan Tamu	30,449,400.00	30,449,400.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,278,940.00	53,226,482.00	99.90			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68,837,050.00	67,300,000.00	97.77			
7.01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,970,750.00	56,500,000.00	97.46			
7.01				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,866,300.00	10,800,000.00	99.39			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252,621,700.00	217,772,189.00	86.20			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,660,000.00	58,212,189.00	64.93			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,961,700.00	159,560,000.00	97.91			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212,176,000.00	206,198,875.74	97.18			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109,716,000.00	104,855,200.00	95.57			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102,460,000.00	101,343,675.74	98.91			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	802,765,289.00	704,433,689.00	87.75			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	380,738,289.00	380,738,289.00	100.00			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11,240,200.00	11,240,200.00	100.00			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	369,498,089.00	369,498,089.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	422,027,000.00	323,695,400.00	76.70			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	422,027,000.00	323,695,400.00	76.70			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	533,976,800.00	531,183,600.00	99.48			
7.01				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	410,000,000.00	407,446,000.00	99.38			
7.01				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400,000,000.00	397,446,000.00	99.36			
7.01				Evaluasi Kelurahan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
7.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34,142,100.00	34,142,100.00	100.00			
7.01				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	23,431,500.00	23,431,500.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10,710,600.00	10,710,600.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	89,834,700.00	89,595,500.00	99.73			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	89,834,700.00	89,595,500.00	99.73			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42,996,800.00	42,787,000.00	99.51			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42,996,800.00	42,787,000.00	99.51			
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42,996,800.00	42,787,000.00	99.51			
7.01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,300,000.00	9,510,000.00	92.33			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,300,000.00	9,510,000.00	92.33			
7.01				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10,300,000.00	9,510,000.00	92.33			
7.01		Kecamatan Tebo Ilir			3,763,371,929.00	3,430,824,764.00	91.16			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,067,149,569.00	2,776,972,644.00	90.54			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,628,230,059.00	2,355,648,523.00	89.63			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,527,524,859.00	2,254,988,523.00	89.22			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,705,200.00	100,660,000.00	99.96			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14,000,000.00	13,710,000.00	97.93			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14,000,000.00	13,710,000.00	97.93			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	115,394,410.00	114,843,667.00	99.52			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,460,110.00	20,362,234.00	99.52			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,874,300.00	18,864,033.00	99.95			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,765,000.00	18,750,000.00	99.92			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57,295,000.00	56,867,400.00	99.25			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,856,800.00	219,204,154.00	92.94			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,986,000.00	42,348,854.00	90.13			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188,870,800.00	176,855,300.00	93.64			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,668,300.00	73,566,300.00	99.86			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,258,300.00	56,156,300.00	99.82			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17,410,000.00	17,410,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	221,037,500.00	180,530,500.00	81.67			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	221,037,500.00	180,530,500.00	81.67			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	221,037,500.00	180,530,500.00	81.67			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	430,743,860.00	429,640,620.00	99.74			
7.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44,772,639.00	44,715,000.00	99.87			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44,772,639.00	44,715,000.00	99.87			
7.01				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000.00	199,850,920.00	99.93			
7.01				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200,000,000.00	199,850,920.00	99.93			
7.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	144,145,040.00	144,050,000.00	99.93			
7.01				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	144,145,040.00	144,050,000.00	99.93			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	41,826,181.00	41,024,700.00	98.08			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	41,826,181.00	41,024,700.00	98.08			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44,441,000.00	43,681,000.00	98.29			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	44,441,000.00	43,681,000.00	98.29			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	44,441,000.00	43,681,000.00	98.29			
7.01		Kecamatan Tebo Ulu			4,181,339,826.00	3,971,288,730.00	94.98			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,403,085,726.00	3,236,645,438.00	95.11			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,002,097,126.00	2,839,962,382.00	94.60			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,890,113,126.00	2,727,978,382.00	94.39			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111,984,000.00	111,984,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,120,000.00	6,680,000.00	93.82			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,120,000.00	6,680,000.00	93.82			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	19,996,000.00	99.98			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	19,996,000.00	99.98			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	109,789,000.00	109,760,000.00	99.97			
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,517,600.00	3,517,000.00	99.98			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,844,000.00	10,831,800.00	99.89			
7.01				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,293,300.00	1,291,000.00	99.82			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,175,400.00	7,175,400.00	100.00			
7.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,377,000.00	10,376,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,631,700.00	4,630,000.00	99.96			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,950,000.00	21,950,000.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	49,988,000.00	99.98			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28,703,900.00	28,703,900.00	100.00			
7.01				Pengadaan Mebel	11,105,800.00	11,105,800.00	100.00			
7.01				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,598,100.00	17,598,100.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,052,400.00	176,415,096.00	99.64			
7.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	680,000.00	680,000.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,514,300.00	37,137,097.00	98.99			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,161,300.00	5,158,000.00	99.94			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133,696,800.00	133,439,999.00	99.81			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,323,300.00	55,128,060.00	94.52			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6,020,000.00	2,909,600.00	48.33			
7.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,406,700.00	41,328,000.00	99.81			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,896,600.00	10,890,460.00	99.94			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	433,648,700.00	392,698,270.00	90.56			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	149,447,700.00	149,398,500.00	99.97			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8,456,200.00	8,418,500.00	99.55			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	140,991,500.00	140,980,000.00	99.99			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	284,201,000.00	243,299,770.00	85.61			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	284,201,000.00	243,299,770.00	85.61			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	283,824,600.00	281,174,222.00	99.07			
7.01				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000.00	197,399,800.00	98.70			
7.01				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200,000,000.00	197,399,800.00	98.70			
7.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8,158,300.00	8,145,300.00	99.84			
7.01				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8,158,300.00	8,145,300.00	99.84			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75,666,300.00	75,629,122.00	99.95			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	75,666,300.00	75,629,122.00	99.95			
7.01				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,784,800.00	7,784,800.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,784,800.00	7,784,800.00	100.00			
7.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,784,800.00	6,784,800.00	100.00			
7.01				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50,996,000.00	50,986,000.00	99.98			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50,996,000.00	50,986,000.00	99.98			
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48,496,000.00	48,496,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2,500,000.00	2,490,000.00	99.60			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00			
7.01		Kecamatan Rimbo Bujang			5,184,116,236.00	4,298,013,964.00	82.91			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,324,059,639.00	2,685,339,518.00	80.78			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,783,367,539.00	2,214,478,287.00	79.56			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,627,427,539.00	2,083,467,287.00	79.30			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155,940,000.00	131,011,000.00	84.01			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,240,000.00	12,188,000.00	99.58			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,240,000.00	12,188,000.00	99.58			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	205,776,300.00	199,560,800.00	96.98			
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,796,300.00	6,265,300.00	92.19			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,468,100.00	49,440,000.00	99.94			
7.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,902,100.00	8,902,100.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,996,400.00	560,000.00	9.34			
7.01				Fasilitas Kunjungan Tamu	67,113,400.00	66,893,400.00	99.67			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,500,000.00	67,500,000.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244,218,000.00	184,171,631.00	75.41			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,994,000.00	47,947,631.00	53.28			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154,224,000.00	136,224,000.00	88.33			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,457,800.00	74,940,800.00	95.52			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61,296,000.00	61,074,000.00	99.64			
7.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,200,000.00	4,915,000.00	59.94			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,961,800.00	8,951,800.00	99.89			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	555,792,497.00	420,962,516.00	75.74			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74,860,400.00	61,403,700.00	82.02			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9,338,900.00	9,328,900.00	99.89			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65,521,500.00	52,074,800.00	79.48			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	480,932,097.00	359,558,816.00	74.76			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	480,932,097.00	359,558,816.00	74.76			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,192,369,800.00	1,079,863,130.00	90.56			
7.01				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	600,000,000.00	490,338,330.00	81.72			
7.01				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600,000,000.00	490,338,330.00	81.72			
7.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	471,000,000.00	471,000,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	471,000,000.00	471,000,000.00	100.00			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	121,369,800.00	118,524,800.00	97.66			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	121,369,800.00	118,524,800.00	97.66			
7.01				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17,888,200.00	17,888,200.00	100.00			
7.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17,888,200.00	17,888,200.00	100.00			
7.01				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17,888,200.00	17,888,200.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94,006,100.00	93,960,600.00	99.95			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	94,006,100.00	93,960,600.00	99.95			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94,006,100.00	93,960,600.00	99.95			
7.01		Kecamatan Sumay			2,122,988,137.00	1,902,383,149.00	89.61			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,930,596,337.00	1,712,619,349.00	88.71			
7.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,162,549.00	2,116,600.00	97.88			
7.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,162,549.00	2,116,600.00	97.88			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,609,882,488.00	1,418,378,897.00	88.10			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,550,062,488.00	1,358,558,897.00	87.65			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59,820,000.00	59,820,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000.00	5,400,000.00	90.00			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,000,000.00	5,400,000.00	90.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	13,258,620.00	88.39			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000.00	13,258,620.00	88.39			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	63,091,400.00	60,593,500.00	96.04			
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,442,200.00	2,435,200.00	99.71			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,028,200.00	11,028,200.00	100.00			
7.01				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,739,800.00	1,739,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,284,000.00	1,284,000.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,818,400.00	3,600,000.00	94.28			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32,778,800.00	30,506,300.00	93.07			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,999,700.00	24,998,700.00	100.00			
7.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,999,700.00	24,998,700.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154,431,600.00	137,999,632.00	89.36			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,994,000.00	12,799,634.00	47.42			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127,437,600.00	125,199,998.00	98.24			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,028,600.00	49,873,400.00	90.63			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,632,000.00	41,476,800.00	88.94			
7.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,250,000.00	6,250,000.00	100.00			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,146,600.00	2,146,600.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	147,001,600.00	146,726,800.00	99.81			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43,775,200.00	43,500,400.00	99.37			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5,319,600.00	5,319,600.00	100.00			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38,455,600.00	38,180,800.00	99.29			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	103,226,400.00	103,226,400.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103,226,400.00	103,226,400.00	100.00			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,500,000.00	2,322,000.00	92.88			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2,500,000.00	2,322,000.00	92.88			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2,500,000.00	2,322,000.00	92.88			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40,390,200.00	38,215,000.00	94.61			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40,390,200.00	38,215,000.00	94.61			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40,390,200.00	38,215,000.00	94.61			
7.01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00			
7.01		Kecamatan VII Koto			2,117,667,374.00	1,963,581,872.00	92.72			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,823,249,764.00	1,687,087,208.00	92.53			
7.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,776,279.00	3,620,400.00	95.87			
7.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,776,279.00	3,620,400.00	95.87			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,440,038,865.00	1,327,150,613.00	92.16			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,365,932,865.00	1,253,044,613.00	91.74			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74,106,000.00	74,106,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,539,400.00	13,014,400.00	89.51			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14,539,400.00	13,014,400.00	89.51			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	8,000,000.00	80.00			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	8,000,000.00	80.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	147,411,300.00	132,585,300.00	89.94			
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,525,400.00	6,525,400.00	100.00			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,579,200.00	17,323,100.00	98.54			
7.01				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,002,300.00	999,900.00	99.76			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,236,100.00	12,228,900.00	85.90			
7.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,728,200.00	2,728,200.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,830,100.00	2,830,100.00	100.00			
7.01				Fasilitas Kunjungan Tamu	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92,510,000.00	79,949,700.00	86.42			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28,534,020.00	28,356,000.00	99.38			
7.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,301,900.00	14,299,200.00	99.98			
7.01				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,232,120.00	14,056,800.00	98.77			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,193,400.00	120,639,295.00	97.93			
7.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	992,800.00	992,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,845,400.00	25,926,495.00	93.11			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,355,200.00	93,720,000.00	99.33			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,756,500.00	53,721,200.00	96.35			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,718,000.00	27,838,800.00	93.68			
7.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,956,100.00	2,800,000.00	94.72			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,098,000.00	13,098,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,984,400.00	9,984,400.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	203,158,310.00	196,543,700.00	96.74			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72,817,910.00	66,377,000.00	91.15			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5,458,200.00	5,357,000.00	98.15			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67,359,710.00	61,020,000.00	90.59			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	130,340,400.00	130,166,700.00	99.87			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	130,340,400.00	130,166,700.00	99.87			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49,978,400.00	39,353,464.00	78.74			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	49,978,400.00	39,353,464.00	78.74			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	49,978,400.00	39,353,464.00	78.74			
7.01				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,665,200.00	3,350,000.00	91.40			
7.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,665,200.00	3,350,000.00	91.40			
7.01				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,665,200.00	3,350,000.00	91.40			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37,615,700.00	37,247,500.00	99.02			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37,615,700.00	37,247,500.00	99.02			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37,615,700.00	37,247,500.00	99.02			
7.01		Kecamatan Rimbo Ulu			2,697,197,839.00	2,549,700,743.00	94.53			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,732,693,039.00	1,592,970,043.00	91.94			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,264,188,039.00	1,130,612,007.00	89.43			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,197,468,039.00	1,063,892,007.00	88.85			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66,720,000.00	66,720,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,040,000.00	11,040,000.00	100.00			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,040,000.00	11,040,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	239,389,600.00	237,746,400.00	99.31			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,170,300.00	23,099,000.00	99.69			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72,270,300.00	70,787,500.00	97.95			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,949,500.00	6,949,500.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	59,799,500.00	59,775,000.00	99.96			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77,200,000.00	77,135,400.00	99.92			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,378,700.00	157,048,236.00	99.16			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,045,500.00	29,758,242.00	95.85			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127,333,200.00	127,289,994.00	99.97			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,696,700.00	56,523,400.00	94.68			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,616,000.00	41,487,400.00	92.99			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,080,700.00	15,036,000.00	99.70			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	791,921,900.00	786,733,500.00	99.34			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	63,931,100.00	59,618,900.00	93.25			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63,931,100.00	59,618,900.00	93.25			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	727,990,800.00	727,114,600.00	99.88			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	727,990,800.00	727,114,600.00	99.88			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106,831,900.00	106,694,200.00	99.87			
7.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14,027,400.00	14,001,100.00	99.81			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14,027,400.00	14,001,100.00	99.81			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	92,804,500.00	92,693,100.00	99.88			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	92,804,500.00	92,693,100.00	99.88			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65,751,000.00	63,303,000.00	96.28			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65,751,000.00	63,303,000.00	96.28			
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39,865,000.00	39,755,000.00	99.72			
7.01				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25,886,000.00	23,548,000.00	90.97			
7.01		Kecamatan Rimbo Ilir			1,965,755,673.00	1,955,188,225.00	99.46			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,626,615,173.00	1,616,267,503.00	99.36			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,287,792,577.00	1,283,181,147.00	99.64			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,227,972,577.00	1,223,361,147.00	99.62			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59,820,000.00	59,820,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,960,000.00	5,880,000.00	84.48			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,960,000.00	5,880,000.00	84.48			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	147,048,400.00	146,944,129.00	99.93			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,705,000.00	12,674,100.00	99.76			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,056,300.00	39,006,300.00	99.87			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	45,287,100.00	45,287,100.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	49,976,629.00	99.95			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,734,196.00	87,860,527.00	95.78			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,999,100.00	15,365,527.00	80.88			
7.01				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,775,000.00	5,775,000.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,960,096.00	66,720,000.00	99.64			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,080,000.00	67,401,700.00	99.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,795,000.00	44,116,700.00	98.49			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,285,000.00	23,285,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	136,821,300.00	136,691,522.00	99.91			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	126,821,300.00	126,691,522.00	99.90			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	126,821,300.00	126,691,522.00	99.90			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	162,004,300.00	161,914,300.00	99.94			
7.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	103,649,200.00	103,649,200.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103,649,200.00	103,649,200.00	100.00			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	58,355,100.00	58,265,100.00	99.85			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	58,355,100.00	58,265,100.00	99.85			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40,314,900.00	40,314,900.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40,314,900.00	40,314,900.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40,314,900.00	40,314,900.00	100.00			
7.01		Kecamatan Tengah Ilir			1,866,072,070.00	1,619,259,708.00	86.77			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,629,862,170.00	1,383,049,808.00	84.86			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,268,343,170.00	1,033,688,408.00	81.50			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,209,489,170.00	974,834,408.00	80.60			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58,854,000.00	58,854,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,080,000.00	9,840,000.00	97.62			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,080,000.00	9,840,000.00	97.62			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000.00	3,000,000.00	60.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	122,463,600.00	122,463,600.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,986,400.00	2,986,400.00	100.00			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152,800.00	152,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,225,400.00	7,225,400.00	100.00			
7.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,434,000.00	4,434,000.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,290,000.00	6,290,000.00	100.00			
7.01				Fasilitas Kunjungan Tamu	11,375,000.00	11,375,000.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,548,400.00	27,030,800.00	78.24			
7.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,548,400.00	27,030,800.00	78.24			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126,747,100.00	124,347,100.00	98.11			
7.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,488,000.00	4,488,000.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,474,300.00	32,074,300.00	93.04			
7.01				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,784,800.00	9,784,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78,000,000.00	78,000,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,679,900.00	62,679,900.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,692,300.00	41,692,300.00	100.00			
7.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,677,400.00	2,677,400.00	100.00			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,310,200.00	18,310,200.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122,630,700.00	122,630,700.00	100.00			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	120,130,700.00	120,130,700.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	120,130,700.00	120,130,700.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72,063,400.00	72,063,400.00	100.00			
7.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28,281,200.00	28,281,200.00	100.00			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28,281,200.00	28,281,200.00	100.00			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43,782,200.00	43,782,200.00	100.00			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	43,782,200.00	43,782,200.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40,515,800.00	40,515,800.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40,515,800.00	40,515,800.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38,415,800.00	38,415,800.00	100.00			
7.01				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00			
7.01		Kecamatan Serai Serumpun			2,216,416,272.00	2,124,708,493.00	95.86			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,920,855,772.00	1,829,154,239.00	95.23			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,569,877,672.00	1,480,630,961.00	94.32			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,510,057,672.00	1,420,810,961.00	94.09			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	59,820,000.00	59,820,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kuangan SKPD						
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,160,000.00	14,160,000.00	100.00			
7.01				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14,160,000.00	14,160,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	108,547,700.00	108,542,936.00	100.00			
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,244,500.00	2,244,500.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,038,600.00	22,038,600.00	100.00			
7.01				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,270,800.00	1,270,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,993,800.00	1,993,800.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,000,000.00	52,995,236.00	99.99			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,786,200.00	34,786,200.00	100.00			
7.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,786,200.00	34,786,200.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103,359,200.00	101,855,742.00	98.55			
7.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,590,400.00	3,590,400.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,810,400.00	32,965,342.00	97.50			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65,958,400.00	65,300,000.00	99.00			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,125,000.00	80,178,400.00	98.83			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,645,000.00	34,698,400.00	97.34			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,480,000.00	45,480,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	156,269,000.00	156,262,754.00	100.00			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,875,000.00	10,875,000.00	100.00			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,875,000.00	10,875,000.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	145,394,000.00	145,387,754.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	145,394,000.00	145,387,754.00	100.00			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87,587,200.00	87,587,200.00	100.00			
7.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00			
7.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	82,087,200.00	82,087,200.00	100.00			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	82,087,200.00	82,087,200.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51,704,300.00	51,704,300.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	51,704,300.00	51,704,300.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	51,704,300.00	51,704,300.00	100.00			
7.01		Kecamatan VII Koto Ilir			1,901,344,406.00	1,848,665,476.00	97.23			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,643,621,806.00	1,591,160,076.00	96.81			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,356,802,629.00	1,307,380,919.00	96.36			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,296,982,629.00	1,247,560,919.00	96.19			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59,820,000.00	59,820,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,280,000.00	11,280,000.00	100.00			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,280,000.00	11,280,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,122,577.00	86,093,500.00	99.97			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,800,500.00	1,800,500.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,788,800.00	7,788,800.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,428,800.00	2,400,000.00	98.81			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,500,000.00	15,500,000.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,604,477.00	58,604,200.00	100.00			
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26,007,200.00	26,007,200.00	100.00			
7.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,502,100.00	17,502,100.00	100.00			
7.01				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,505,100.00	8,505,100.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,289,100.00	115,280,657.00	97.46			
7.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,999,100.00	2,999,100.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,290,000.00	22,281,557.00	88.10			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,620,300.00	32,617,800.00	99.99			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,500,000.00	19,500,000.00	100.00			
7.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,385,500.00	3,383,000.00	99.93			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,734,800.00	9,734,800.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	197,722,700.00	197,617,300.00	99.95			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	133,455,300.00	133,364,900.00	99.93			
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70,573,700.00	70,573,700.00	100.00			
7.01				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62,881,600.00	62,791,200.00	99.86			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	64,267,400.00	64,252,400.00	99.98			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64,267,400.00	64,252,400.00	99.98			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22,484,300.00	22,477,600.00	99.97			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	22,484,300.00	22,477,600.00	99.97			
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	22,484,300.00	22,477,600.00	99.97			
7.01				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37,515,600.00	37,410,500.00	99.72			
7.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37,515,600.00	37,410,500.00	99.72			
7.01				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	37,515,600.00	37,410,500.00	99.72			
7.01		Kecamatan Muara Tabir			1,522,245,436.00	1,480,764,294.00	97.28			
7.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,227,642,746.00	1,188,571,849.00	96.82			
7.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,730,000.00	3,730,000.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,730,000.00	3,730,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	890,668,264.00	859,496,276.00	96.50			
7.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	845,722,264.00	814,550,276.00	96.31			
7.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44,946,000.00	44,946,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,280,000.00	11,280,000.00	100.00			
7.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,280,000.00	11,280,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00			
7.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00			
7.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,586,082.00	111,313,600.00	99.76			
7.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,278,600.00	27,242,800.00	99.87			
7.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,111,700.00	16,111,300.00	100.00			
7.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00			
7.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,334,500.00	23,334,500.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,081,282.00	42,845,000.00	99.45			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17,291,300.00	17,290,700.00	100.00			
7.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,291,300.00	17,290,700.00	100.00			
7.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,426,400.00	109,277,973.00	95.50			
7.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,468,000.00	18,437,973.00	78.57			
7.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,958,400.00	90,840,000.00	99.87			
7.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,660,700.00	51,183,300.00	95.38			
7.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,290,700.00	36,813,300.00	93.69			
7.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,370,000.00	14,370,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	179,995,500.00	177,685,500.00	98.72			
7.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,649,600.00	2,649,600.00	100.00			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2,649,600.00	2,649,600.00	100.00			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	61,400,900.00	61,400,900.00	100.00			
7.01				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	61,400,900.00	61,400,900.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	115,945,000.00	113,635,000.00	98.01			
7.01				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	115,945,000.00	113,635,000.00	98.01			
7.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59,409,200.00	59,338,845.00	99.88			
7.01				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	59,409,200.00	59,338,845.00	99.88			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	59,409,200.00	59,338,845.00	99.88			
7.01				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,140,000.00	2,140,000.00	100.00			
7.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,140,000.00	2,140,000.00	100.00			
7.01				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,140,000.00	2,140,000.00	100.00			
7.01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51,497,990.00	51,478,100.00	99.96			
7.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	51,497,990.00	51,478,100.00	99.96			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	46,028,200.00	46,028,200.00	100.00			
7.01				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,445,000.00	2,445,000.00	100.00			
7.01				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3,024,790.00	3,004,900.00	99.34			
7.01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1,560,000.00	1,550,000.00	99.36			
7.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,560,000.00	1,550,000.00	99.36			
7.01				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,560,000.00	1,550,000.00	99.36			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan dara Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025



VIII. Unsur Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (Urusan) Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik** yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Target Anggaran sebesar Rp.34.679.312.779,- dan Realisasi sebesar Rp.33.933.938.541 atau 97,85 persen.

Adapun rincian realisasi masing- masing Unsur Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Unsur Pemerintahan Umum
Tahun Anggaran 2025

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				5,228,352,364.00	4,985,977,507.00	95.36			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5,228,352,364.00	4,985,977,507.00	95.36			
8.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5,228,352,364.00	4,985,977,507.00	95.36			
8.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,381,406,440.00	2,149,857,238.00	90.28			
8.01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,898,131,840.00	1,672,912,758.00	88.13			
8.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,801,891,840.00	1,576,672,758.00	87.50			
8.01				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96,240,000.00	96,240,000.00	100.00			
8.01				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,680,000.00	11,640,000.00	85.09			
8.01				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,680,000.00	11,640,000.00	85.09			
8.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,500,000.00	17,393,000.00	99.39			
8.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,500,000.00	12,489,000.00	99.91			
8.01				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	4,904,000.00	98.08			
8.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	151,631,700.00	151,385,880.00	99.84			
8.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,834,900.00	2,833,200.00	99.94			
8.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,589,600.00	16,501,850.00	99.47			
8.01				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,941,300.00	10,940,400.00	99.99			
8.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan			100.00			

				Peraturan Perundang-undangan	5,845,900.00	5,845,900.00				
8.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,420,000.00	10,420,000.00	100.00			
8.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105,000,000.00	104,844,530.00	99.85			
8.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,107,500.00	27,000,000.00	99.60			
8.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,107,500.00	27,000,000.00	99.60			
8.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,531,800.00	205,296,600.00	99.89			
8.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	244,800.00	240,000.00	98.04			
8.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,607,000.00	35,376,600.00	99.35			
8.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169,680,000.00	169,680,000.00	100.00			
8.01				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,823,600.00	64,229,000.00	94.70			
8.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56,286,000.00	52,791,300.00	93.79			
8.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,227,600.00	4,127,700.00	97.64			
8.01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,310,000.00	7,310,000.00	100.00			
8.01				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	877,352,300.00	868,512,051.00	98.99			
8.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	877,352,300.00	868,512,051.00	98.99			

8.01				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	28,982,050.00	28,830,500.00	99.48			
8.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5,125,000.00	5,078,000.00	99.08			
8.01				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	782,536,150.00	781,503,651.00	99.87			
8.01				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60,709,100.00	53,099,900.00	87.47			
8.01				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,286,581,518.00	1,286,249,218.00	99.97			
8.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,286,581,518.00	1,286,249,218.00	99.97			

8.01				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33,450,000.00	33,388,500.00	99.82			
8.01				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,197,556,418.00	1,197,544,918.00	100.00			
8.01				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	53,775,100.00	53,515,800.00	99.52			
8.01				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00			
8.01				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	78,700,000.00	78,563,200.00	99.83			

8.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	78,700,000.00	78,563,200.00	99.83			
8.01				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	78,700,000.00	78,563,200.00	99.83			
8.01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	148,530,350.00	148,051,200.00	99.68			
8.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	148,530,350.00	148,051,200.00	99.68			
8.01				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	55,832,100.00	55,476,100.00	99.36			
8.01				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	92,698,250.00	92,575,100.00	99.87			
8.01				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	455,781,756.00	454,744,600.00	99.77			

8.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	455,781,756.00	454,744,600.00	99.77			
8.01				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	131,207,400.00	130,281,700.00	99.29			
8.01				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31,170,000.00	31,093,700.00	99.76			
8.01				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	293,404,356.00	293,369,200.00	99.99			

Sumber: Aplikasi SIPD dan Data Realisasi OPD, LRA, dan data Seluruh OPD per 31 Desember TA. 2025



Mengakomodir penyelenggaraan seluruh urusan tersebut di atas, tentunya harus berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, Efisiensi, Efektifitas, Pembagian Habis Tugas, Rentang kendali, Tata kerja yang jelas dan Fleksibilitas. Untuk itu susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tebo disusun dengan mengacu pada kondisi, Kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Tabel 3.19
Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2025

N o	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi kesenjangan akses antarwilayah
2	Peningkatan mutu pembelajaran melalui penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme pendidik
3	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme pendidik	Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Meningkatnya Mutu Pendidikan
4	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional dan kesetaraan	Permendikbud Keaksaraan Dasar No 86 Tahun 2014 Permendikbud nomor 86 tahun 2014 pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar	Meningkatkan pendidikan keaksaraan fungsional dan kesetaraan
5	Peningkatan Penyusunan Kurikulum 2013 Peningkatan Kurikulum Merdeka Belajar	Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah Kempendikbudristek No. 56 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka)	Meningkatkan Penyusunan Kurikulum 2013 Meningkatnya Kurikulum Merdeka Belajar
6	Peningkatan pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional	Permendikbud Keaksaraan Dasar No 86 Tahun 2014 Permendikbud nomor 86 tahun 2014 pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar	Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional
7	Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, mendorong proses peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi Guru Tenaga Kependidikan (GTK).	Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru	Meningkatkan kualifikasi Pendidik dan Kualitas Pendidikan
8	Distribusi tenaga pendidik masih belum merata dan belum semua tenaga pendidik bersertifikasi	Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan tenaga pendidik yang merata di seluruh wilayah
9	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional	Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah

10	Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah	Permendikbud 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2009 tentang pedoman pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah
2	Dinas Kesehatan		
	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024	Terpenuhinya jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
	Penyelenggaraan Puskesmas	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	acuan bagi semua puskesmas di Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari manajemen puskesmas hingga pelayanan kesehatan sesuai kluster siklus hidup sehingga sesuai dengan konsep integrasi pelayanan primer
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
	Peraturan Daerah	Nomor 7 Tahun 2024	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 - 2044
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024, Tanggal 17 Desember 2024, Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).	Undang - Undang no.23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak Perpres no.25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Perwujudan Kota layak Anak (KLA)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo	Perda Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 2. Mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan 3. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.
	Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Tebo	Keputusan Bupati Tebo Nomor 565 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Tebo	1. Mengawasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Tingkat Kabupaten
	Penyelenggaraan Rencana Strategis (RENSTRA)	Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2024 Tanggal 03 September 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tebo	Pedoman Pelaksanan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Penyelenggaraan Rencana Kerja (RENJA)	Peraturan Bupati Tebo Nomor 87 Tahun 2024 Tanggal 17 September 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tebo	Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Penetapan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tebo	Keputusan Bupati Tebo Nomor 703 tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tebo	Pedoman Pelaksanaan Dalam Membuat Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tebo
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan		
1	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Tebo	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun	Sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan

		2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Surat Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2022	
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Untuk mendapatkan kondisi aktual gambaran kualitas lingkungan hidup atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ada di Kabupaten Tebo melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) serta Indeks Kualitas Lahan (IKL).
3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup;	Untuk menciptakan keindahan, kenyamanan dan kesehatan bagi penggunaannya, selain itu pengendalian iklim mikro, konservasi tanah dan air, habitat flora dan fauna
	Pengelolaan Sampah	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;	Untuk melakukan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas, pengurangan dan penanganan sampah, adapun pengurangan sampah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	Pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah	Memberikan kesadaran kepada masyarakat pengguna kelengkapan kendaraan dan kepemilikan surat izin mengemudi dan ketentuan membayar pajak kendaraan bermotor bertujuan menciptakan kenyamanan, keamanan dalam berlalu lintas sesuai dengan ketentuan yang
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Penerapan Aplikasi Siskeudes Online	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa	Mempercepat dan mempermudah dalam penginputan Terlaksananya Pengukuhan Kepala Desa dalam Kabupaten Tebo Tercapainya Pemekaran Desa dalam Kabupaten Tebo dari 107 Desa menjadi 122 Desa
2	Monev BUMDes	Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Permendesa No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan DBM PNPM MPD menjadi BUM Desa Bersama (Cipta Desa) Permendagri No. 3 Tahun 2021 tentang	Revitalisasi dan Terbinanya BUMDesa

		Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa dan Bumdesma PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	
8	Dinas Komunikasi dan Informatika		
1	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2024	Melindungi transaksi elektronik dan resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah.
	Forum Satu Data Indonesia.	Keputusan Bupati Tebo Tahun 2024	Mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui data yang akurat.
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	Pembinaan Perpustakaan	Peraturan Daerah Tebo Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar dan Program-program pendidikan keterampilan masyarakat.
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan	Menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat
	Pemberdayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Tebo	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan	Untuk Meningkatkan Kegemaran Membaca
	Penyelamatan, Pelestarian Kearsipan Daerah	Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah
10	Sekretariat Daerah		
	Peraturan Bupati Tebo Nomor 36 Tahun 2024 tentang penyesuaian sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kab.Tebo untuk penyederhanaan Birokrasi	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi.	penyesuaian sistem kerja dilaksanakan bertujuan: mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kerja unit organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ASN dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
	Peraturan Bupati Tebo Nomor 91 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Tebo.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
	Peraturan Bupati Tebo Nomor 101 Tahun 2024 tentang Pedoman pengembangan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kab.Tebo.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja.	pedoman pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, mendorong perubahan sikap dan perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja.
	BADAN KEUANGAN DAERAH		
1	Peraturan Bupati Tebo	Nomor 1 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO	PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
2	Perda APBD	UU No 1 tentang HKPD	Dasar pengelolaan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024
3	Perda Perubahan APBD	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar pengelolaan Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
4	Perbup Penjabaran APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Dasar pengelolaan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024

5	Perda Perubahan APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Dasar pengelolaan Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
6	Surat Edaran Bupati Tebo 900.1.3.5/0814/BAKEUDA-IV/2024	Permendagri 77 Tahun 2020 tentang TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 900/1367/BAKEUDA-IV/2023 tentang Persyaratan Pengajuan Pencairan UP/GU/TU/LS
7	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo	Perda nomor 02 tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023	Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024
8	Peraturan Bupati Tebo	Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023	Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024
9	Surat Edaran Bupati Tebo 900.1.3.5/1986/BAKEUDA-IV/2024	Permendagri 77 Tahun 2020 tentang TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas Akhir Pengajuan Pencairan Dana Tahun Anggaran 2024
	Surat Edaran Bupati Tebo 900.1.3.5/2033/BAKEUDA-IV/2024	Permendagri 77 Tahun 2020 tentang TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 900.1.3.5/1986/BAKEUDA-IV/2024 tentang Batas Akhir Pengajuan Pencairan Dana Tahun Anggaran 2024
	Peraturan Bupati Tebo	Perbup No 112 Tahun 2024 Tentang Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembangunan 3 juta Rumah
1 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Meningkatkan kedisiplinan, motivasi, kinerja serta memupuk dan mengembangkan jiwa ASN yang profesional dan bertanggungjawab Meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN

Sumber : Data Perangkat Daerah Kab. Tebo, 2025

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PADA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEBO TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tebo tahun Anggaran 2024, Bupati Tebo menerima Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tebo tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Kinerja Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024. Dan selanjutnya hasil Rekomendasi dimaksud telah ditindak lanjuti dengan melakukan:

1. Pengelompokan/merangkum beberapa poin Rekomendasi menjadi satu Rekomendasi karena dilihat dari arah dan tujuan Rekomendasi adalah sama.
2. Mensinkronisasikan setiap rekomendasi dengan kondisi Tahun 2024.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, hasil Rekomendasi DPRD pada Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel : 3.20
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tebo
dengan DPRD Kabupaten Tebo Nomor 100.3.7.1/4/Hkm/2025 dan 000.1.5/03/DPRD/2025

No.	Catatan dan Saran Pendapat Akhir Fraksi Terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024	Tindak Lanjut Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025	OPD PENANGGUNGJAWAB
1. Urusan Pendidikan			
1)	Kami menegaskan kepada Bupati untuk mengatasi judi online dikalangan pelajar serta masyarakat serta penambahan anggaran untuk pemberantasan narkoba, pemberantasan paham ekstrim serta segala sesuatu yang berdampak buruk bagi Kabupaten Tebo.	Dinas Komunikasi dan Informasi ikut berperan dalam mengatasi judi online dengan cara menyampaikan himbauan Bupati mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kanal media sosial resmi Pemkab Tebo (Instagram, Facebook, TikTok)	1 Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat pendidikan karakter serta literasi digital di satuan pendidikan guna mencegah praktik judi online, penyalahgunaan narkoba, dan penyebaran paham ekstrem di kalangan pelajar	2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo siap berkontribusi dalam pencegahan yang berkaitan dengan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.	3 Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemberantasan paham ekstrim radikal yang berdampak negatif bagi kabupaten Tebo Kesbangpol telah melakukan penutupan Yayasan Amal Jariah Indonesia Rimbo Bujang	4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2)	Menegaskan kepada Bupati untuk melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan dan penggunaan gadget agar segala dampak negatif yang diakibatkan mampu diatasi dan dilakukan tindakan preventif yang efektif. Sehingga kasus judi online pada anak usia dini dan penyalahgunaan narkoba akibat interaksi online dapat diatasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait digitalisasi pendidikan dan melakukan sosialisasi pada media yang dimiliki pemerintah untuk mengatasi dampak negatif penggunaan gadget.	1 Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatkan pengawasan penggunaan gawai dan internet di lingkungan sekolah serta memperkuat peran guru BK dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap peserta didik yang terindikasi melakukan perilaku menyimpang	2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo siap berkontribusi dalam pencegahan yang berkaitan dengan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.	3 Satuan Polisi Pamong Praja
		Melakukan sosialisasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Tebo.	4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3)	Menegaskan kepada Bupati untuk mengatasi judi online pada anak sekolah dan anak usia dini, membantu penambahan dana untuk pemberantasan paham ekstrim, narkoba dan segala tindakan negatif, melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan dan penggunaan gadget agar segala dampak negatif dapat diminimalisir.	Dinas Komunikasi dan Informasi ikut berperan dalam mengatasi judi online pada anak sekolah dan anak usia dini, dengan cara menyampaikan himbauan Bupati mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kanal media sosial resmi Pemkab Tebo (Instagram, Facebook, TikTok)	5 Dinas Komunikasi dan Informatika
		Mendorong pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, seni, budaya, dan olahraga sebagai wadah penyaluran minat dan bakat peserta didik agar terhindar dari pengaruh negatif.	6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo siap berkontribusi dalam pencegahan yang berkaitan dengan ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.	7 Satuan Polisi Pamong Praja

			Melakukan sosialisasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Tebo.	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4)	Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk mengevaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama (Smp) dan Kepala Sekolah Dasar (Sd) Yang Ada Di Kabupaten Tebo.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tebo melalui monitoring, supervisi, serta penilaian berbasis indikator kinerja, sebagai dasar pembinaan, pemberian sanksi, atau rekomendasi pergantian kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku melalui SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan)	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Urusan Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat					
1)	Untuk peningkatan pelayanan kesehatan, DPRD meminta Bupati agar memaksimalkan pelayan kesehatan masyarakat. Terutama pada puskesmas untuk di anggarkan pengadaan supir ambulance agar memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan menuju rumah sakit rujukan.		Pada prinsipnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sependapat dan mendukung penuh pandangan DPRD bahwa keberadaan sopir ambulans yang tersedia secara khusus dan memadai di Puskesmas sangat penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat menuju rumah sakit rujukan. selanjutnya Mengusulkan penganggaran penyediaan tenaga sopir ambulans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah	1	Dinas Kesehatan
2)	terkait stunting untuk fokus pada pencegahan stunting melalui intervensi dini, seperti pemantauan tumbuh kembang anak, dan edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita. Memastikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai terutama di daerah terpencil. Sehingga hal ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Tebo.		Upaya Pencegahan Stunting telah di laksanakan dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita di setiap Posyandu yang ada di wilayah kerja Kabupaten Tebo dan Pemberian Edukasi tentang gizi seimbang baik pada balita maupun ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi. serta dengan pemberian Makanan Tambahan pada balita sebagai upaya intervensi dini bagi balita dan ibu hamil dengan melibatkan kader sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Rumah stunting sebanyak 84 Desa.	1	Dinas Kesehatan
3)	Menegaskan kepada Bupati untuk menindaklanjuti masalah pungutan liar di area RSUD STS Tebo karena ini merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat jika diperlukan untuk bekerjasama dengan pihak terkait untuk menindak pungutan liar dan memastikan keamanan di Rumah sakit bebas parkir akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.		Pengelolaan parkir sudah dilaksanakan sesuai dengan Perda Retribusi Daerah yaitu setiap punguta kepada masyarakat wajib melampirkan bukti tiket atau nota pembayaran. hal ini sudah dilakukan oleh pihak pengelola parkir. namun memang pada pelaksanaanya belum dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. dan belum adanya pengawasan yang ketat terhadap petugas parkir yang bertugas. saat ini RS masih dalam tahap rencana kerjasama dengan penyedia layanan parkir menggunakan alat otomatis	1	RSUD

		1. PADA DASARNYA PARKIR YANG ADA DIRUMAH SAKIT TIDAK ADA KERJASAMA DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN. 2. PARKIR DIKELOLA MASYARAKAT DAN BEKERJA SAMA DENGAN RUMAH SAKIT. 3. DIKARENAKAN BELUM ADANYA KERJASAMA ANATRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN DAN RUMAH SAKIT KAMI TIDAK BISA MELAKUKAN PENGAWASAN PARKIR YANG ADA DIRUMAH SAKIT SAMPAI SAAT INI.	2	Dinas LH & Perhubungan
4)	Meminta agar pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas tinggi dan fasilitas rumah sakit yang memadai dan nyaman untuk kepuasan pasien sehingga hal ini juga dapat meminimalkan pulang paksa pasien untuk resiko komplikasi.	Dalam rangka peningkatan fasilitas rumah sakit agar dapat memadai dan sesuai standar, RSUD Sultan Thaha Saifuddin berupaya untuk mengajukan Anggaran dan Pembiayaan dalam rangka pengembangan gedung, untuk Tahun 2026 akan dilaksanakan Pengembangan Gedung Rawat Inap Kebidanan, Bedah, THT, Mata dan Syaraf. RSUD berharap dengan adanya pengembangan ini, gedung yang ada akan disesuaikan dengan standar, sehingga membuat pasien nyaman dan petugas rumah sakit dapat bekerja sesuai standar. selain itu, RSUD berupaya untuk meningkatkan peralatan kesehatan yang sesuai standar dan mengikuti perkembangan zaman. RSUD Sultan Thaha Saifuddin telah memiliki SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) dimana sistem ini sudah terintegrasi dengan Mobile JKN dan E-Rekam Medis, hal ini sangat berguna untuk pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. misalnya pendaftaran online, pasien tidak perlu membawa rekam medik disetiap pindah pelayanan, pelayanan semakin cepat karena antar pelayanan sudah berkomunikasi langsung lewat sistem tersebut. Untuk menjalani ini semua harus dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini diawasi langsung oleh bagian manajemen rumah sakit yang selalu intens memonitoring agar pelayanan berjalan dengan lancar	1	RSUD

5)	Menekankan agar pelayanan Masyarakat lebih ditingkatkan lagi, Pelayanan Masyarakat adalah kunci kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Pelayanan masyarakat yang paling menonjol adalah pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas.	saat ini RSUD Sultan Thaha Saifuddin berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM agar pelayanan kesehatan ke masyarakat semakin baik. diantaranya adalah nanti akan tersedia Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Urologi (Kandung Kemih dan Saluran Kencing), Fellowship Spesialis Jantung & Pembuluh Darah, Fellowship Spesialis Syaraf, Subspesialis KGEH (sistem pencernaan, hati, pankreas, dan saluran empedu), dan Fellowship Penyakit Dalam-Kanker. selain itu dari perawat, radiologi, penata labor dan tenaga kesehatan lainnya juga akan diberangkatkan untuk meningkatkan kompetensi SDM nya. selain itu, RSUD Sultan Thaha Saifuddin telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat di setiap Triwulan yang direkap dan menjadi indikator untuk tindak lanjut apabila memerlukan perbaikan. selain itu terdapat pula survey kepuasan masyarakat dari pihak luar. RSUD Sultan Thaha Saifuddin juga tengah mengembangkan sistem dan program untuk memberikan informasi kepada pasien pasca perawatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin.	1	RSUD
6)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo untuk dapat menambah Ruang Inap pada Puskesmas Desa Teluk Singkawang dan Kec. Lainnya.	Pada Prinsipnya Dinas Kesehatan sependapat dan mendukung penuh pandangan DPR bahwa penambahan ruangan inap pada Puskesmas Teluk Singkawang dan kecamatan lainnya dapat menunjang pelayanan kesehatan yang prima, untuk pemenuhan tersebut kami perlu dukungan diberikan anggaran demi menunjang pembangunan/penambahan ruang sesuai peraturan yang ada melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang SAH	1	Dinas Kesehatan
7)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo agar dapat memenuhi alat kesehatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Lansia, mengingat jumlah Lansia Kab. Tebo tahun 2024 meningkat 10,49% Dri Thun 2023.	Sehubungan dengan saran pendapat akhir Fraksi, Dinas Kesehatan mendukung penuh dan akan mengawasi serta memasukkan dalam perencanaan pemenuhan alkes yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan lansia dan untuk pemenuhan alat tersebut perlu di dukung dengan anggaran APBD atau Sumber Pendanaan yang lainnya yang SAH sehingga dinkes bisa memenuhi alkes dan program dapat berjalan untuk memenuhi target SPM	1	Dinas Kesehatan
8)	Memonitoring Kerja Dokter jaga pada setiap Puskesmas	Pada prinsipnya, Dinas Kesehatan sependapat dan mendukung penuh upaya DPRD dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, serta mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan medis yang diberikan oleh dokter jaga di Puskesmas. adapun salah satu upaya yg dilakukan adalah :	1	Dinas Kesehatan
		- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala		
		- Mendorong pemanfaatan sistem pelaporan dan absensi berbasis digital		
		- Memberikan pembinaan dan teguran secara berjenjang		
9)	Memonitoring dan memaksimalkan kinerja Bidan Desa.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan dalam pengelolaan serta pembinaan Bidan Desa, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah dan dukungan DPRD Kabupaten Tebo	1	Dinas Kesehatan

10)	Terhadap pelayanan kesehatan, meminta kepada Bupati untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk dengan indikator kesehatan ibu hamil, menyusui, bayi baru lahir dan balita. Karena berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan data yang dimiliki oleh dinkes angka indikator kunci stunting dan gizi buruk masih tinggi sehingga ditahun 2024 Tebo mengalami peningkatan stunting dan gizi buruk.	A. Untuk Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat salah satunya dengan mengatasi masalah stunting dan gizi buruk. Oleh sebab itu masalah ini dapat di cegah melalui Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, ibu menyusui dan bayi baru lahir. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil di lakukan dengan Pemeriksaan Kehamilan minimal 6x Pemeriksaan selama kehamilan, 2x Pemeriksaan kehamilan dengan USG oleh dokter dan Pemberian Tablet Tambah Darah sebagai upaya Pencegahan Anemia yang akan mengakibatkan bayi lahir BBLR (BB<2500 gram). B. pelayanan bayi baru lahir diberikan IMD, imunisasi dan Asi Eksklusif sampai umur 6 bulan. C. Palayanan Balita dilakukan dengan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan, Pemberian Imunisasi, Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing serta Pemberian Makanan sesuai Pedoman gizi seimbang pada balita.	1	Dinas Kesehatan
11)	Menegaskan, agar persoalan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitas memadai seperti ambulance dan dioperasikan sebagai mana fungsinya.	Ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo akan menjadikan masukan DPRD ini sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan program, baik dalam penganggaran daerah maupun dalam pengusulan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan sumber lain yang sah, sehingga permasalahan sulitnya akses pelayanan rujukan dari Puskesmas dapat diminimalisir secara bertahap.	1	Dinas Kesehatan
12)	Dalam mewujudkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ke semua masyarakat Kabupaten Tebo, untuk dapat mengaktifkan puskesmas keliling dan memaksimalkan dokter turun kedusun serta guru turun ke seluruh pelosok di kabupaten Tebo dan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi digital melalui aplikasi yang user friendly dan fungsionalitas yang lengkap	Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan pada prinsipnya sependapat dan mendukung penuh upaya DPRD Kabupaten Tebo dalam mewujudkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkesinambungan, khususnya melalui pengaktifan kembali Puskesmas Keliling dan optimalisasi pelayanan kesehatan berbasis komunitas.	1	Dinas Kesehatan
13)	Meminta kepada Saudara Bupati Tebo, untuk dapat mengaktifkan kembali posyandu bagi lansia minimal satu bulan sekali.	Terkait peningkatan pelayanan bagi usia lanjut melalui posyandu Integrasi layanan primer semua siklus hidup dilayani diposyandu (bayi balita,ibu hamil,remaja dan lansia)yang dilaksanakan dalam satu posyandu dan dilaksanakan dalam satu bulan dan semua terlayani dan memenuhi yang tidak datang ke posyandu di lakukan pelayanan pada saat program Dokter masuk Dusun	1	Dinas Kesehatan
14)	Meminta kepada Saudara Bupati Tebo, melengkapi Peralatan Medis Untuk Posyandu Lansia, supaya petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.	Sehubungan dengan Saran Pendapat akhir Fraksi, Dinkes akan menjadikan bahan evaluasi dan perencanaan dalam penyusunan anggaran APBD maupun Sumber Dana lainnya yang SAH sehingga terpenuhinya peralatan medis untuk posyandu Lansia yang sesuai Standar dan mohon menjadi pertimbangan bapak bupati untuk mengalokasikan anggarannya	1	Dinas Kesehatan
15)	Meminta kepada Saudara Bupati Tebo, mengangkat driver Ambulance di puskesmas menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (Pppk).	Pengangkatan driver Ambulance Puskesmas menjadi PPPK akan diusulkan jika memenuhi persyaratan regulasi/peraturan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Dinas Kesehatan

16)	Meminta kepada Saudara Bupati Tebo, untuk memperhatikan dan memastikan ketersediaan obat-obatan di setiap puskesmas. Agar nantinya ketika masyarakat yang berobat ke puskesmas dapat ditangani dan dilayani dengan optimal.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo pada prinsipnya sangat mendukung dan berkomitmen untuk memastikan tersedianya obat-obatan di faskes TK.I (Puskesmas), Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, salah satu program pokok yang ada di Puskesmas adalah program pengobatan yang merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar yang bersifat kuratif serta program unggulan Bapak Bupati Tebo terpilih yaitu Dokter masuk Dusun. Obat merupakan unsur yang penting dan tidak tergantikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauannya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna sebagaimana tercantum dalam amanat UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat adalah penyediaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Dinas kesehatan dalam hal ini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan merekap semua kebutuhan obat di Puskesmas berdasarkan Rencana kebutuhan obat (RKO) ditambah dengan kebutuhan lainnya yang diluar kondisi normal, seperti kondisi darurat lainnya. Rekap kebutuhan obat tersebut menjadi dasar permintaan alokasi dana baik dari dana DAU-SG, DAK Non Fisik dan APBDP. Akan tetapi untuk mengalokasikan dana belanja obat tergantung pada kemampuan dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dinas kesehatan sendiri akan memaksimalkan belanja obat sesuai dengan kebutuhan puskesmas berdasarkan dana alokasi yang di terima.	1	Dinas Kesehatan
17)	Mendorong kepada saudara Bupati untuk memastikan setiap Puskesmas memiliki unit ambulance yang layak operasi sehingga mempermudah proses rujuk pasien. Pihak Puskesmas juga harus menyediakan driver Ambulance yang sudah digaji.	Pada Prinsipnya Dinas Kesehatan sependapat dan mendukung penuh dan berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat namun untuk mempermudah layanan rujukan setiap Puskesmas harus memiliki ambulance yang layak, dan sesuai standar dan draiver ambulance yang terlatih untuk memenuhi hal ini membutuhkan dukungan anggaran dari APBD ataupun anggaran lainnya yang SAH	1	Dinas Kesehatan
18)	Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan ke semua masyarakat Kabupaten Tebo, fraksi partai keadilan sejahtera mendorong Kepada Saudara Bupati terus menjalankan program Dokter turun ke Dusun serta Guru turun ke seluruh Pelosok Di Kabupaten Tebo.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo pada prinsipnya sangat mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu program strategis daerah yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, meningkatkan cakupan pelayanan promotif dan preventif, serta mempercepat penanganan masalah kesehatan di tingkat dusun.	1	Dinas Kesehatan
19)	Menyarankan Kepada Saudara Bupati untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir Di Rsud Sts Kabupaten Tebo. Tindakan memasang tarif parkir sesuka hati merupakan tindakan pungli dan premanisme yang harus dihapuskan.	Hal ini tengah dilaksanakan. saat ini RS masih dalam tahap rencana kerjasama dengan penyedia layanan parkir menggunakan alat otomatis	1	RSUD
3. Urusan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana				

1)	Terkait dengan kebersihan dan pengolahan sampah di kabupaten Tebo kami meminta kepada Bupati agar menindak tegas para pegawai kebersihan yang tidak disiplin serta bantuan perbaikan atau pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dengan mengurangi produk sekali pakai, memisahkan sampah plastik dan organik dengan mengolah sampah melalui daur ulang, komposting yang jika tepat pengolahannya akan bernilai ekonomis tinggi.	Terhadap petugas kebersihan yang tidak disiplin sudah dilakukan evaluasi dengan cara memberikan surat peringatan (SP), dan apabila sudah diberikan SP 2 tidak ada perubahan terhadap petugas kebersihan tersebut maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada yang bersangkutan dan kemudian akan dicari penggantinya. Adapun terhadap kendaraan pengangkut sampah tetap dilakukan pemeliharaan rutin agar kendaraan angkut sampah tersebut tetap layak beroperasi, sedangkan untuk pengadaan kendaraan angkut sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo akan membuat Proposal bantuan kendaraan angkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah.	1	Dinas LH & Perhubungan
2)	Meminta kerjasama dengan dinas Perkim bersama PLN untuk penanggulangan mati lampu di dalam daerah kabupaten Tebo agar bisa membentuk tim kerja untuk meningkatkan sistem kerja tenaga teknis di masing-masing Kecamatan. Serta menegaskan kepada Bupati untuk mengatasi kawasan kumuh tak layak huni dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan drainase untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang nyaman dan layak huni.	Terkait dengan mati lampu didalam daerah Kabupaten Tebo, itu merupakan wilayahnya PT. PLN	1	Dinas Perkim
3)	Menekankan agar pengelolaan sampah dapat segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat terutama dilingkungan pasar.	Saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sedang berusaha untuk meminimiliasir sampah liar yang ada di sepanjang jalan lintas dari Km. 1 sampai Km.12 dengan menugaskan petugas bendor sebagai rute tambahan untuk menyisir tumpukan sampah liar tersebut, sedangkan untuk kebersihan di lingkungan pasar akan akan diusahakan agar lingkungan pasar tetap bersih.	1	Dinas LH & Perhubungan
5)	Memberikan saran untuk mengolah sampah industri dan rumah tangga yang bersifat organik dilakukan dengan metode wormcomposting, sehingga hasil sampah memiliki nilai tambah yaitu cacing tanah (<i>Lumbricus rubellus</i>) yang dimanfaatkan untuk obat demam typhus, hasil samping dimanfaatkan menjadi kompos yang memiliki nilai gizi tinggi untuk tanaman yang kaya unsur makro dan mikro mineral dan decay (Air sisa limbah) dijadikan pupuk cair untuk perkebunan dan pertanian.	Saran akan ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada pimpinan perusahaan yang menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk mengolah sampah industri dan rumah tangga yang bersifat organik dilakukan dengan metode wormcomposting, sehingga hasil sampah memiliki nilai tambah yaitu cacing tanah (<i>Lumbricus rubellus</i>) yang dimanfaatkan untuk obat demam typhus, hasil samping dimanfaatkan menjadi kompos yang memiliki nilai gizi tinggi untuk tanaman yang kaya unsur makro dan mikro mineral dan decay (Air sisa limbah) dijadikan pupuk cair untuk perkebunan dan pertanian.	1	Dinas LH & Perhubungan
6)	Menegaskan Bupati untuk kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan persampahan yang ramah lingkungan dan zerowaste dengan menerapkan ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen K3L. Jangan hanya mengolah sampah dengan cara ditimbun dan dibakar. Sampah plastik diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan, sehingga tebo bersih dapat diwujudkan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sedang merencanakan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan merangkul Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pihak swasta lainnya untuk membuat TPS 3R, sehingga timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tebo dapat dikelola dengan baik.	1	Dinas LH & Perhubungan
7)	Kami mengapresiasi capaian kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tebo yang selalu siap dalam menyelesaikan dan memitigasi dan mempreventifikasi bencana alam ditebo, sehingga dampak bencana yang diakibatkan tidak berdampak fatal. Hal ini perlu	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati Kinerja BPBD,. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas Kinerja BPBD ke	1	BPBD

	untuk terus ditingkatkan sebagai pilar utama pengendalian bencana di kabupaten tebo.	depan		
8)	Terhadap pelayanan PLN yang belum maksimal karena sering terjadi mati lampu di beberapa wilayah, fraksi Golkar berharap kerjasama dinas Perkim bersama pihak PLN agar segera menanggulangi kendala tersebut. Diharapkan agar pihak Perkim meningkatkan sistem kerja teknis di masing-masing wilayah kecamatan melalui pembentukan tim kerja.	Terkait Kerja Tim Teknis Perkim itu khusus untuk memperbaiki LPJU yang ada, akan dilaksanakan dengan optimal sesuai sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia	1	Dinas Perkim
9)	Kemudian terhadap pelayanan Damkar, kami meminta agar dinas terkait dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak menimbulkan opini negative ditengah masyarakat.	Damkar selalu mengoptimalkan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran namun dari jarak TKP dan pos yang jauh dan belum meratanya pos Damkar di seluruh kecamatan seperti Sumay, VII Koto ilir, Serai Serumpun, Rimbo Ilir, Rimbo ulu dan Tengah Ilir sehingga Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran belum optimal.	1	Dinas Damkar
10)	Damkar juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan tanggap terhadap kasus kebakaran dan bencana lainnya dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup dan tepat guna. Tentunya, untuk memaksimalkan kinerja petugas damkar, terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan maka diharapkan pemerintah daerah dapat merealisasikan pengadaan kendaraan pemadam dan tenaga pemadam.	di beberapa Kecamatan Seperti Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo ulu, Rimbo Bujang, VII Koto sudah ada Kendaraan Pemadam dan tenaga pemadam namun diluar dari kecamatan yang disebut seperti Tengah Ilir, Rimbo Ulu Rimbo Ilir, Serai Serumpun, VII Koto Ilir, Sumay belum ada pos Damkar namun di muara Tabir hanya ada Pos Damkar tidak ada Kendaraan Pemadam dan Tenaga Pemadam sehingga ketidak terjadi Kebakaran di Kecamatan yang belum mempunyai Pos Damkar sehingga kecamatan yang ada pos Damkar melakukan Backup dengan kendala jarak yang jauh dan kadang tidak terjangkau sehingga Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran kurang maksimal	1	Dinas Damkar
11)	Kami mengapresiasi capaian kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Bpbd kabupaten tebo yang selalu siap dalam menyelesaikan dan memitigasi dan mempreventivikasi bencana alam di tebo, sehingga dampak bencana yang diakibatkan tidak berdampak fatal. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan sebagai pilar utama pengendalian bencana di kabupaten tebo.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati Kinerja BPBD, Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas Kinerja BPBD ke depan	1	BPBD
12)	Dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah, fraksi Golkar menyarankan agar pengelolaan sampah rumah tangga dan ndustri melalui metode Insinerasi (Membakar sampah dan menghasilkan panas, menggerakkan turbin dan generator) serta dapat menghasilkan produk dari sampah yang bernilai ekonomis tinggi. Juga menyarankan kepada Dinas Lh dan Perhubungan agar meminta bantuan kementerian terkait pengadaan kendaraan pengangkut sampah.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo akan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hdup terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan industri melalui metode Insinerasi (Membakar sampah dan menghasilkan panas, menggerakkan turbin dan generator), dan kan mengajukan Proposal bantuan kendaraan angkut sampak ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum.	1	Dinas LH & Perhubungan
13)	Mendorong saudara Bupati menyediakan dana taktis bagi Bpbd untuk memaksimalkan penanganan bencana. Berdasarkan informasi dari Bmkg bahwa curah hujan di Provinsi Jambi berada pada posisi menengah dimana terdapat 75% wilayah Jambi berpotensi mengalami banjir. Hal ini perluantisipasi pra bencana kepada masyarakat Kabupaten Tebo.	pada tahun 2024 Tebo menerima dana hibah dari BNPB yang dipergunakan untuk untuk perbaikan infrastruktur terdampak bencana (seperti jalan longsor, turap, dan triple box) di tiga lokasi. Selain dana dari pusat, penanganan darurat didukung oleh Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Tebo untuk kebutuhan mendesak dan bantuan sosial bagi korban banjir	1	BPBD
14)	Mendorong saudara Bupati untuk meningkatkan kinerja Damkar Terutama terhadap wilayah Kecamatan yang jauh dari jangkauan	di pos Damkar muara tabir belum ada kendaraan dan personil damkar yang jaga sehingga pos Damkar Muara Tabir kosong, dan pentingnya Kendaraan	1	Dinas Damkar

	dengan merealisasikan pengadaan kendaraan pemadam dan tenaga pemadam.	Pemadam dan tenaga pemadam agar Pelayanan dari Damkar yaitu Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dapat terealisasi		
4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.				
1)	DPRD mendukung upaya digitalisasi Dukcapil untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan sehingga membuatnya lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga meminimalisir pungli oleh oknum tak bertanggung jawab.	Dukcapil selalu berusaha memaksimalkan pelayanan agar memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan dokumen kependudukannya	1	Dinas Dukcapil
5. Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur Dan Pengawasan				
1)	Kami berpendapat masih banyak sisi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan yang masih perlu diperbaiki dan dikritisi sebagai feedback guna menapak kedepan yang lebih baik lagi. Untuk itu kami meminta kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan dan terus mencermati rencana aksi dan tindak lanjut OPD.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo melaksanakan: 1. Pendampingan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 2. Pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal akan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	1	Inspektorat
2)	Terkait dengan infrastruktur, DPRD meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menangani jalan rusak, banjir dan menyusun rencana strategis yang lebih komprehensif.	Dinas PUPR telah menyusun rencana penanganan infrastruktur secara komprehensif mempertimbangkan asumsi/prediksi kemampuan sumber daya pemerintah yang ada. Rencana tersebut dituangkan secara rinci dalam Renstra Dinas PUPR Tahun 2026-2029.	1	Dinas PU & PR
3)	Memberikan apresiasi kepada Bupati dan waki Bupati Tebo karena begitu dilantik langsung gerak cepat turun kelapangan mengatasi permasalahan yang ada seperti banjir, jembatan padang lamo yang rusak, yang saat ini dijadikan sebagai jalan alternatif dari sumbar ke jambi karena jalan lintas sumatra putus diperbatasan jambi sumbar.	Atas arahan Bapak Bupati-Wakil Bupati Dinas PUPR terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengupayakan pelayanan bidang infrastruktur	1	Dinas PU & PR
4)	Meminta agar jalan yang berlobang seperti perbatasan unit 1 dan unit 2, jalan 14 sampai jalan 20 unit 3 rimbo bujang serta jalan-jalan lain yang rusak parah untuk dibenahi minimal ditambal yang berlobang meskipun jalan tersebut adalah jalan provinsi, karena kalau nunggu anggaran dari provinsi terlalu lama dan sudah terlanjur banyak korban.	Dinas PUPR berupaya terus mengupayakan perbaikan infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Tebo. Mengingat kewenangan, penanganan bersifat sementara sembari mengusulkan perbaikan sesuai kewenangan.	1	Dinas PU & PR
5)	Menekankan pentingnya pembangunan dan/atau perbaikan akses jalan yang layak ditingkat desa. desa ke kecamatan maupun desa ke kabupaten. Kemudian fraksi PAN juga mengharapkan percepatan pembangunan infrastruktur lainnya secara merata di Kab. Tebo.	Perbaikan akses jalan terus diupayakan untuk dilakukan oleh Dinas PUPR. Keterbatasan sumberdaya (anggaran dan personil) menjadi salahsatu faktor belum tuntasnya penanganan. Untuk itu perlu mendapatkan dukungan Pihak legislatif agar pendanaan dapat dialokasikan secara memadai.	1	Dinas PU & PR
6)	Meminta agar program LPJU tetap berjalan pada setiap Desa.	Terkait Program LPJU setiap Desa akan dianggarkan sesuai kemampuana keuangan daerah	1	Dinas Perkim
7)	Menekankan agar pemeliharaan LPJU dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.	Terkait pemeliharaan LPJU akan dilakukan dengan optimal	1	Dinas Perkim
8)	Meminta agar pembukaan akses jalan pertanian tetap berlangsung, mengingat masih banyak aktifitas masyarakat yang terhambat dikarenakan susah nya akses jalan.	Dengan dukungan Legislatif, Dinas PUPR siap melaksanakan penyediaan akses jalan khususnya untuk perkembangan sektor pertanian. TA 2025 telah membuka jalan baru sepanjang XXXX km yang beberapa diantaranya sangat	1	Dinas PU & PR

			mendukung akses pertanian dan perkebunan bagi masyarakat.		
9)	Menekankan agar dalam menilai dan menerima hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh rekanan dapat dilakukan secara objektif, dengan demikian stigma negative terhadap pemerintah akan berkurang.	Dalam pelaksanaan pekerjaan, Dinas PUPR selalu melibatkan pihak ketiga (Konsultan) yang diikat dalam perjanjian profesional (kontrak) sesuai ketentuan berlaku. Dinas PUPR juga melaksanakan pengujian-pengujian sesuai standar dan ketentuan berlaku	1	Dinas PU & PR	
10)	Meminta kepada Bupati dan Opd agar transparan dalam penyusunan program atau kegiatan pembangunan kabupaten Tebo di tahun-tahun yang akan datang.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
11)	Selanjutnya meminta kepada Bupati dan Bappeda agar dapat memaksimalkan perencanaan kabupaten Tebo dengan mengumpulkan informasi yang akurat dari berbagai sumber dan pemangku kebijakan.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
12)	Mengingatkan agar Bappeda dapat menginventarisir pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana dalam waktu yang lama.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
13)	Meminta kepada Bappeda agar sama-sama berkoordinasi dalam mendorong program pembangunan jalan Padang Lamo yang merupakan program prioritas Gubernur Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
14)	Terhadap kinerja Pupr kabupaten Tebo, fraksi Golkar mengapresiasi capaian tahun 2024. Kedepan, dinas Pupr ditegaskan untuk lebih objektif dalam menilai dan menerima hasil pekerjaan fisik rekanan dalam melaksanakan pembangunan agar tidak ada opini negatif masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan.		1	Dinas PU & PR	
15)	Selanjutnya, Meminta kepada Bupati Tebo, agar melakukan pemetaan wilayah dalam kabupaten Tebo yang belum tersedia Baseline kawasan kumuh daerah, sebagai syarat pencairan dana DAK dari pemerintah pusat. Untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo.	Terkait Penyusunan Baseline kawasan kumuh tergantung dengan kemampuan keuangan daerah	1	Dinas Perkim	
16)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo, untuk melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan disetiap Kecamatan.	Dinas PUPR terus berupaya menyediakan infrastruktur jalan yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Tebo. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Prioritasi dan kesepakatan bersama menjadi jala tengah dala pelaksanaannya.	1	Dinas PU & PR	
17)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo, untuk melanjutkan kembali kegiatan pengaspalan dan atau rigit beton jalan di Sp 1 dan sp 7 Kecamatan Serai Serumpun.	Dinas PUPR telah mengusulkan pelaksanaannya, keterbatasan anggaran memaksa penyesuaian realisasinya.	1	Dinas PU & PR	

18)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo, untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan di desa sungai pandan, Kecamatan Rimbo Ulu. Mulai dari jalan Dempo hingga sampai di jalan Mawar, mengingat jalan tersebut menjadi alseese vital bagi petani untuk membawa hasil panennya.	Dinas PUPR akan mengupayakan untuk memprogramkan penyelesaian infrastruktur jalan tersebut, dukungan Legislatif sangat diharapkan untuk realisasinya.	1	Dinas PU & PR
19)	Terkait infrastruktur jalan Pal 12 Kecamatan Tebo Tengah, Blok E Kecamatan Rimbo Ilir, sampai ke Jalan 21 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang maka meminta kepada saudara Bupati Tebo agar melakukan pengaspalan dengan sesegera mungkin.	Dinas PUPR mengupayakan pelaksanaannya dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar efektif realisasi peminjaman kepada PT SMI segera terwujud.	1	Dinas PU & PR
20)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo, Membangun Pos Damkar di kecamatan Serai Serumpun, untuk mempercepat pelayanan dan penanganan bila terjadi musibah kebakaran atau non kebakaran.	pentingnya pembangunan pos di kecamatan wilayah kabupaten Tebo karena Damkar ingin selalu meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan supaya tercapainya Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	1	Dinas Damkar
21)	Meminta kepada Saudara Bupati Tebo, agar melakukan pemasangan pagar listrik di wilayah Kecamatan Serai Serumpun, untuk mencegah serangan gajah masuk ke pemukiman dan kebun masyarakat.		1	Tanggungjawab Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Provinsi
22)	Mendorong saudara Bupati Tebo untuk membangun sarana dan prasarana jalan lebih merata.	Dinas PUPR terus mengupayakan pemerataan penanganan jalan di seluruh wilayah kabupaten Tebo. Keterbatasan alokasi menjadi kendalanya. Dukungan dari Pihak Legislatif sangat menentukan dalam realisasi pelaksanaannya.	1	Dinas PU & PR
23)	Mendorong saudara Bupati untuk menganggarkan pengadaan Lpju dan pengalokasiannya secara merata dalam rangka upaya pencegahan atas tindakan kejahatan dan kecelakaan.	Terkait penganggaran pengadaan LPJU tergantung dengan kemampuan keuangan daerah	1	Dinas Perkim
6. Urusan UMKM, kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1)	Menegaskan kepada bupati melalui dinas sosial untuk pengadaan anggaran penderita ODGJ. Terkait penerimaan bantuan PKH maupun BPNT agar dilakukan pendataan ulang setiap tahun dan dipastikan harus tepat sasaran karena program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dalam daerah.	Pengadaan anggaran penderita ODGJ Pemerintah Kabupaten Tebo untuk saat ini hanya mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga ODGJ untuk tidak menelantarkannya, karena merupakan bagian dari keluarga kita yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian kita semua. Dan ubntuk penerimaan bantuan PKH maupun BPNT agar dapat dilakukan pendataan ulang setiap tahun itu benar adanya.	1	Dinas Sosial P2&PA
		* Dasar hukum kita melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yaitu :		
		(1). UUD Tahun 1945 Pasal 5 tentang fakir miskin;		
		(2). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Ekonomi;		
		(3). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;		
		* Verifikasi data dilaksanakan oleh Operator Desa dan		

			Kelurahan , yang dapat dilakukan pada :		
			(1). Usulan PBI-JKN, BPNT, PKH dan Bansos lainnya pada tanggal 01-11 setiap bulannya;		
			(2). Pembaruan Data pada tanggal 01-13 setiap bulannya;		
			(3). Usulan Tambahan pada tanggal 01-30 setiap bulannya		
			(4). Data yang diusulkan harus di musyawarah desa (musdes) / musyawarah kelurahan (muskel);		
			(5). Pengesahan oleh Operator Kabupaten setiap tanggal 01-17 setiap bulannya.		
			* Perubahan data yang diusulkan dengan range waktu 3 Bulan.		
2)	Tentang lambannya operator DTKS di setiap Desa, pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di desa, seperti jaringan internet dan perangkat komputer untuk memfasilitasi penggunaan sistem DTKS dan memastikan data yang dikumpulkan akurat dan tepat waktu.	Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dengan cara penyediaan Jaringan Internet. Pada Tahun 2020 telah membangun Jaringan Internet Yang Yg disediakan oleh Dinas Kominfo (Internet Terintegrasi). Sampai dengan Tahun 2025 seluruh OPD termasuk 4 Kecamatan (Tebo Tengah, Tebo Ilir, Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang) internet telah disediakan oleh Dinas Kominfo. Dan Tahun 2026 ini juga dilanjutkan terhadap 8 kecamatan yaitu, Tebo Ulu, Sumay, Tengah Ilir, Rimbo Ilir, VII Koto, VII Koto Ilir, Serai Serumpun dan Muara Tabir.	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3)	Kami mengapresiasi turunnya tingkat kemiskinan walau belum sesuai target 5.97%.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
4)	Pada dasarnya fraksi partai Demokrat mendukung penuh semua kebijakan pemerintah daerah dalam rangka untuk melayani kepentingan masyarakat serta untuk akselerasi mewujudkan Tebo Maju.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
5)	Fraksi partai Demokrat sangat setuju dengan slogan Tebo Maju, untuk itu sesuai dengan namanya dibawah kepemimpinan agus nazar tebo harus maju.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	
6)	Fraksi Partai Demokrat meminta agar bupati dan wakil bupati tidak segan-segan mengganti kepala-kepala dinas yang tidak mendukung program bupati dan wakil bupati, agar cita-cita tebo maju benar-benar terwujud.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda	

7)	Terakhir fraksi partai Demokrat meminta agar janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye dapat terealisasi mulai dari sekarang, sehingga diakhir jabatan semua janji politik dapat terealisasi.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
8)	Kepada Bakeuda untuk bekerja profesional, inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di kabupaten tebo guna mendapatkan PAD, salah satunya peningkatan kesejahteraan seluruh UMKM se Kabupaten Tebo disetiap dusunnya. Sehingga segala pembiayaan penting yang terdampak efisiensi anggaran dapat ditanggulangi sehingga dapat mencapai semua target pembiayaan daerah khususnya pengadaan P3K yang menjadi polemik saat ini.	Bakeuda melakukan beberapa inovasi dalam rangka optimalisasi PAD yaitu : 1. Melaksanakan Penilaian langsung terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) potensial dengan bantuan tenaga ahli Penilai Pajak bersertifikasi dari MAPI Jakarta 2. Melakukan kerja sama dengan OPD pengelola retribusi dan Bank Persepsi yakni Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi dalam hal penyediaan layanan fitur QRIS Retribusi Daerah 3. Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai Mitra Pembayaran Pajak Daerah secara Online. 4. Pemutakhiran Nilai Jual Objek Oajak (NJOP) PBB dan BPHTB. 5. Penggunaan sistem pembayaran Pajak Daerah dengan QRIS mobile banking Bank Jambi	1	Bakeuda
9)	Kami mengapresiasi segala bentuk kerja keras bupati dalam membangun kabupaten tebo dalam berbagai capaian yang telah dicapai dan berbagai penghargaan yang telah diraih. Kami berharap apa yang didapatkan dapat ditingkatkan dan yang belum dapat diusahakan pencapaiannya, pandangan ini bukan hanya sebuah narasi, jadi, apa yang disampaikan segera dijadikan bahan pertimbangan untuk dinyatakan dalam program nyata. Mari kita berjuang untuk Tebo MAJU SDM Unggul dan Profesional, Lingkungan yang sehat untuk hidup, UMKM yang sejahtera dan merata diseluruh kabupaten tebo. Karena pilar ekonomi kerakyatan ditentukan oleh kesejahteraan UMKM nya.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
10)	Meminta kepada bupati untuk menyukseskan program Desa Digital, Ayunda dan IKD serta memaksimalkan penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dalam seluruh dokumen kependudukan guna memaksimalkan pelayanan kependudukan se Kabupaten Tebo dan meminimalkan kejadian pungli oleh oknum dan pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terhadap Ayunda, Dinas Komunikasi dan Informatika hanya membangun sistemnya. Dan ini telah di bangun. Untuk Penggunaannya ada pada Dinas Dukcapil. Begitupun dengan TTE untuk dokumen kependudukan dan IKD juga ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
11)	Meminta kepada bupati melalui Dpmptsp dan Dppkukm untuk memberdayakan seluruh Umkm berbadan hukum di seluruh desa se Kabupaten Tebo. Pemberian modal usaha, hibah alat dan prasarana serta kemudahan pengurusan izin usaha guna meningkatkan Pad melalui sektor Umkm dan Ekonomi Kerakyatan. Jika Umkm berkembang maka ekonomi daerah tumbuh dan menumbuhkan iklim investasi yang baik sehingga berdampak nyata dalam segala aspek kehidupan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan padat karya daerah, pengembangan potensi	Adapun langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo : 1. Menerbitkan NIB melalui sistem OSS-RBA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo bertugas memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) secara mandiri melalui online single submission risk-based approach (OSS-RBA) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, mempermudah legalitas usaha mikro dan kecil.	1	DPMPTSP

		daerah, dan peningkatan Sdm berkualitas dan menekan angka inflasi dan deflasi daerah.	2. Sosialisasi dan pendampingan hukum: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo pada Tahun 2024 terakhir mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman hukum terhadap pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya usaha dan prosedur pendirian badan hukum yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (DAK NF FPM) Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI. Namun ditahun 2025 DAK NF FPM dimaksud tidak ada lagi.		
			3. Jemput Bola (Pelayanan Pro aktif) : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo melakukan aksi "Jemput Bola" untuk mendatangi UMKM langsung guna mengurus NIB dan untuk mempercepat legalitas usaha kepada Pelaku usaha UMKM di Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tebo.		
	11)		4. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo menggunakan MPP sebagai pusat layanan terpadu untuk mempermudah pelaku usaha UMKM mendapatkan berbagai perizinan dalam satu tempat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.		
			5. Pendampingan akses permodalan : dimana legalitas yang diterbitkan oleh DPMPSTP Kabupaten Tebo dapat mempermudah pelaku usaha UMKM mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan lainnya melalui perbankan.		
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo dalam melakukan pemberdayaan tersebut diatas berupaya untuk mengubah pelaku usaha UMKM dari sektor informal menjadi formal agar lebih berdaya saing dan memberikan kontribusi lebih besar kepada perekonomian di Kabupaten Tebo.		
			1. Disperindagkop dan UKM untuk meningkatkan produksi, nilai produksi, membuka lapangan tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan, pada tahun 2025 memberikan bantuan alat pada beberapa pelaku usaha atau Industri Kecil Menengah (IKM) di Kecamatan VII Koto Ilir, Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu.	2	Disperindag UKM
			2. Disperindagkop dan UKM untuk meningkatkan nilai produksi dan meningkatkan penghasilan, pada tahun 2025 memberikan bantuan sticker pada beberapa pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir.		
			3. Disperindagkop dan UKM melakukan pembinaan pada pelaku Usaha/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tahun 2025 sehingga terjadi peningkatan dari pelaku Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dimana bertambah 24 Usaha Kecil.		

12)	mendukung penuh program Desa Digital dan berharap layanan administrasi bisa selesai ditingkat Desa.	Sebagai tahap awal, Dinas Kominfo telah Memulai program digitalisasi di beberapa desa sebelum diterapkan secara menyeluruh yaitu dengan dibangunnya website desa. Dinas kominfo telah menuntaskan pendaftaran, sosialisasi dan bimtek website desa yang dilanjutkan dengan evaluasi dan monitoring terhadap 50 desa yang telah di bangun website tersebut. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah membangun sistem/Aplikasi Ayunda dengan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Urusan Ekonomi				
1)	UMKM memiliki peran penting dalam menguatkan ekonmi daerah dan mendukung perkembangan koperasi. Perannya dalam menguatkan ekonomi skala mikro, kecil dan menengah akan menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi daerah semakin baik. Oleh sebab itu, kami menegaskan kepada Bupati untuk melakukan upaya dalam memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro yang ada di masyarakat terutama dalam kemudahan pengelolaan izin.		1	Disperindag UKM
2)	Terkait realisasi anggaran tahun 2024 yang mana pada sektor pendapatan daerah telah ditargetkan sebesar Rp. 1.301.093.783.247,-(<i>satu triliun tiga ratus satu milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah</i>)dan terealisasi sebesar Rp 1.254.634.663.544.32,-(<i>satu triliun dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat koma tiga puluh dua rupiah</i>) atau sebesar 96,43%. Terkait hal ini fraksi PDIP berpendapat pertanggungjawaban pendapatan daerah bukan sebatas menilai dan menghitung penggunaan anggaran pembangunan saja akan tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah seperti meningkatkan kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan uang itu sendiri. Dengan demikian setiap kegiatan pembangunan akan semakin memenuhi sasaran, tepat waktu, dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil kerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Tebo secara merata.	Pertanggungjawaban Pendapatan Daerah tidak berhenti pada aspek teknis berupa perhitungan realisasi anggaran, akan tetapi pertanggungjawaban mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara berkualitas, mulai dari tahap perencanaan yang matang dan terukur, pelaksanaan anggaran yang disiplin dan berorientasi hasil, serta pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tebo telah melakukan perhitungan berdasarkan pendekatan analisa potensi penerimaan PAD dan regulasi penetapan besaran dana transfer pusat/transfer antar daerah yang akan diterima Kabupaten Tebo. Dalam penyelenggaraan perpajakan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak baik pemberian pelayanan yang transparan dan akuntabel maupun dengan mendekatkan layanan ke masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan pajak daerah menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan layanan kepada masyarakat dilakukan dengan digitalisasi pajak daerah menggunakan website resmi sehingga pendaftaran, pelaporan dan pembayaran dapat dilakukan secara online. Pengembangan digitalisasi pajak daerah dimaksudkan untuk meminimalisasi transaksi tunai guna menghindari kebocoran pendapatan serta memberikan kemudahan dan kepraktisan kepada wajib pajak yakni transaksi non tunai melalui QRIS dan Virtual Account (VA) dari perbankan serta pembayaran juga dapat dilakukan pada PT. Pos Indonesia terdekat.	1	Bakeuda
3)	Terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo Fraksi PDIP meminta agar pemerintah dapat menginventarisir pembangunan yang belum terlaksana dengan mengumpulkan informasi dan data yang akurat dari berbagai kepentingan dan kebijakan. Kami meminta agar pemerintah selalu bertindak transparan terhadap setiap pelaporan		1	Dinas PU & PR

	kegiatan, dengan fokus dengan target, pencapaian dan output dari seluruh OPD terkhusus dinas PUPR agar tidak terlalu banyak memanipulasi laporan kegiatan.			
4)	Di bidang perekonomian, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan petani sebagai tulang punggung ekonomi daerah.	Pemerintah Kabupaten Tebo mendorong peningkatan investasi swasta pada sektor pariwisata dan pertanian untuk mempercepat berkembangnya kedua sektor utama perekonomian daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan investasi di sektor pariwisata dan pertanian, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang ramah investasi, diantaranya kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, keringanan tarif pajak/retribusi daerah.	1	Bakeuda
5)	DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi penyerapan anggaran untuk program-program yang diprioritaskan kepentingan masyarakat.	Bidang Perbendaharaan sudah mengeluarkan surat Edaran tentang Pengimputan Rencana Anggaran Kas yg tetap Memperhatikan Skala Prioritas Kegiatan, sehingga OPD teknis lebih fleksibel untuk menjalankan Kegiatan lebih awal tanpa harus ada kasus Belum ada dana atau Anggaran Kas Kurang untuk pelaksanaan kegiatan	1	Bakeuda
6)	Kami juga mengapresiasi atas capaian Gini Ratio Kabupaten Tebo Tahun 2024 terealisasi sebesar 0.257 poin dari target 0.280 poin dengan persentase capaian 108.95%. Dengan angka ini menjadikan kabupaten tebo menjadi kabupaten dengan tingkat ketimpangan terendah diprovinsi jambi.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
7)	Kami juga mengapresiasi meningkatnya PDRB per kapita tahun 2024 sebesar 67,39 juta rupiah, melampaui target yang ditetapkan sebesar 52,75 juta rupiah.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
8)	Dengan adanya efisiensi anggaran, Fraksi PAN menekan agar pemerintah Kab. Tebo dapat mendorong BUMD maupun PERUMDA yang ada di Kab. Tebo untuk lebih berkontribusi terhadap pendapatan daerah demi menunjang pembangunan Tebo secara berkelanjutan sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat memenuhi target.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
10)	Menegaskan Bupati untuk bekerjasama dengan DPRD Tebo disetiap bantuan daerah yang diberikan ke masyarakat melalui setiap komisi yang membidangi agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel dan paripurna dalam pelayanan kepada masyarakat.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
9. Urusan Ketertiban dan Keamanan				
	DPR mengakui peran penting Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Maka dalam hal ini kami meminta agar dapat menertibkan hewan ternak yang dalam kenyataannya menjadi liar di lingkungan kota Kabupaten Tebo serta dapat menertibkan anak sekolah berkeliraran di jam sekolah.	1. Menyusun Rencana Aksi peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat secara terintegrasi. 2. Memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah dan unsur terkait. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekolah untuk membentuk kesadaran hukum dan ketertiban umum	1	Satpol PP
10. Urusan SDM dan Komunikasi Informasi				

1)	Meminta agar pemerintah kabupaten Tebo untuk meningkatkan sumber daya termasuk anggaran, personel, pelatihan dan peningkatan peralatan untuk memaksimalkan penanganan bencana dan kebakaran. Pengadaan kendaraan damkar di wilayah kecamatan yang jauh dari jangkauan sangat dibutuhkan serta peningkatan pelatihan dan pendidikan untuk personel damkar.		1	Dinas Damkar
2)	Kami mengapresiasi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo dari target 69,95 melampaui target dengan realisasi di angka 72,67.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
6)	Menegaskan kepada bupati untuk menindak tegas tenaga kebersihan yang tidak disiplin. Kabupaten Tebo butuh orang yang disiplin, cerdas dan mampu berkinerja dan produktif. Kebersihan adalah cerminan daerah, jika petugas kebersihan tidak profesional dan disiplin hanya membuat malu daerah	Terhadap petugas kebersihan yang tidak disiplin sudah dilakukan evaluasi dengan cara memberikan surat peringatan (SP), dan apabila sudah diberikan SP 2 tidak ada perubahan terhadap petugas kebersihan tersebut maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja kepada yang bersangkutan dan kemudian akan dicari penggantinya	1	Dinas LH & Perhubungan
7)	Mengapresiasi capaian daerah dalam indeks pembangunan manusia, namun pembangunan tersebut belum sejalan dengan kualitas Sdm dilapangan. Sehingga kami meminta kepada Bupati Tebo untuk melakukan evaluasi mendalam secara menyeluruh, teliti dalam menilai dan mencari data yang akurat serta relevan. Sehingga Ipm tidak hanya bagus melalui data, namun berdampak nyata pada kualitas Sdm Pemerintah Kabupaten Tebo.	Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas apresiasi, perhatian, serta dedikasinya dalam mencermati dokumen perencanaan yang disusun Bappeda. Sinergi yang harmonis ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan	1	Bappeda
8)	Meminta Kepada Bupati dan Kominfo segera menginventarisir daerah-daerah yang tergolong Blank Spot demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan Telepon dan Internet.	Dinas Kominfo akan segera melakukan pendataan dan monitoring evaluasi (Monev) secara komprehensif terhadap wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai blank spot di Kabupaten Tebo, sebagai tindak lanjut atas permintaan DPRD demi memastikan pemerataan akses jaringan Telepon dan Internet bagi masyarakat.	1	dinas Komunikasi dan Informatika
9)	Kominfo juga diminta mengawasi kabel-kabel vendor penyedia jaringan internet ilegal yang terpantau banyak terdapat di wilayah Kabupaten Tebo.	Dinas Kominfo melakukan melalui evaluasi dan monitoring terhadap kabel-kabel yang terpasang tanpa izin atau semrawut di berbagai titik wilayah Kabupaten Tebo. Berkoordinasi dengan APJII wilayah Jambi yang dimulai dengan mendata dan memanggil para vendor terkait untuk merapikan instalasi kabel mereka agar tidak merusak pemandangan kota dan membahayakan warga	1	dinas Komunikasi dan Informatika
10)	Kemudian rencana pembentukan sekretariat anti Siber Kabupaten Tebo yang rencananya akan di louncing di tahun 2025 ini, kami berharap segera terwujud sehingga bisa berjalan se-segera mungkin.	Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat tim TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) dan telah launching dan dikuatkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Rumah Dinas Gubernur Jambi berkomitmen mendukung tata kelola digital yang aman, adaptif, dan berdaya tahan ditengah perkembangan teknologi informasi	1	dinas Komunikasi dan Informatika
11)	Meminta kepada saudara Bupati Tebo melalui dinas terkait, untuk menginvestigasi kerusakan jalanan di perbatasan Babeko, tepatnya DI Blok B, Blok C dan Blok D Kecamatan Rimbo Ilir. Serta memberikan solusi yang kongkrit demi meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.	Dinas PUPR akan melaksanakan inventarisir kondisi jalan secara berkala di seluruh wilayah Kab Tebo. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Dinas PUPR untuk menentukan penanganan infrastruktur jalan.	1	Dinas PU & PR



Berikut terlampir Berita Acara beserta Lampiran Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024 :

BERITA ACARA
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DENGAN DPRD KABUPATEN TEBO

Nomor : 100.3.7.1/ 4 /Hkm/2025
000.1.5/ 03 /DPRD /2025

TENTANG
PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEBO TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA BUPATI
TEBO TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AGUS RUBIYANTO, SE., MM.**
Jabatan : Bupati Tebo
Alamat Kantor : Kantor Bupati Tebo,
Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo
Nomor 01 KM.12 Muara Tebo.
2. Nama : **NAZAR EFENDI, SE., M.Si.**
Jabatan : Wakil Bupati Tebo
Alamat Kantor : Kantor Bupati Tebo,
Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo
Nomor 01 KM.12 Muara Tebo.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

3. a. Nama : **KHALIS MUSTIKO, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo,
Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo
Nomor 02 KM.12 Muara Tebo.
- b. Nama : **IHSANUDDIN, SP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo,
Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo
Nomor 02 KM.12 Muara Tebo.
- c. Nama : **SAHENDRA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kabupaten Tebo,
Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo
Nomor 02 KM.12 Muara Tebo.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat antara lain:

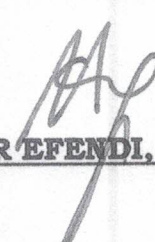
- I. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mempelajari, membahas dan menyusun Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024 serta penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini kepada **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PIHAK PERTAMA** telah menerima Rekomendasi DPRD Kabupaten Tebo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024 untuk diperhatikan dan digunakan sebagai bahan dalam :
 - a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan Anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Tebo, dan/atau kebijakan strategis Bupati Tebo.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TEBO
Selaku,
PIHAK PERTAMA,

AGUS RUBIYANTO, SE., MM.

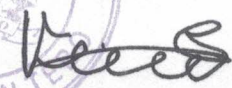
WAKIL BUPATI TEBO


NAZAR EFENDI, SE., M.Si.

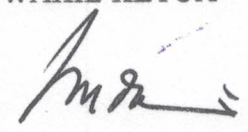
Muara Tebo, 28 April 2025
PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TEBO

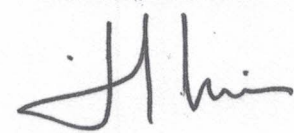
Selaku,
PIHAK KEDUA,
KETUA


KHALIS MUSTIKO, S.H.

WAKIL KETUA


IHSANUDDIN, SP

WAKIL KETUA


SAHENDRA, SE

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD
KABUPATEN TEBO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA BUPATI TEBO TAHUN
ANGGARAN 2024
NOMOR 000.1.5/03 /DPRD /2025
TANGGAL 28 APRIL 2025
TENTANG PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN
TEBO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA BUPATI TEBO TAHUN
ANGGARAN 2024

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEBO TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KINERJA BUPATI TEBO TAHUN ANGGARAN 2023**

BAGIAN PERTAMA: CATATAN UMUM

1. Sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menyampaikan LKPJ penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam hal evaluasi atas kinerja eksekutif yang tertuang dalam LKPJ Kinerja Bupati Tebo Tahun 2024 sebagaimana telah disampaikan oleh Sdr. Wakil Bupati Tebo kepada DPRD Kabupaten Tebo dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 25 Maret 2024, DPRD berkewajiban memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Tebo dapat meningkat secara berkesinambungan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Disinilah pentingnya fungsi DPRD untuk melakukan *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga kami mengharap Sdr. Bupati Tebo beserta jajaran tetap memandang positif terhadap saran dan masukan DPRD. Oleh karena itu melalui pemberian rekomendasi DPRD ini kami berharap Sdr. Bupati Tebo bersama seluruh jajarannya secepatnya melakukan tindak lanjut, dan di sisi lain DPRD akan tetap melakukan pengawasan atas tindak lanjut yang disarankan.
4. Setelah kami melakukan pengkajian dan dengan mempertimbangkan segala masukan dari berbagai pihak, seluruh hasil pembahasan LKPJ yang dilakukan dengan Rapat *Hearing* Komisi-Komisi bersama Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, dapat kami laporkan catatan-catatan strategis kepada para undangan Rapat Paripurna yang terhormat ini yang tertuang dan tak terpisahkan pada Bagian Kedua Catatan Khusus lampiran Keputusan ini.

BAGIAN KEDUA: CATATAN KHUSUS

Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024 berupa catatan-catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Catatan-catatan strategis yang dimaksud dituangkan pada beberapa urusan sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

- 1) Kami menegaskan kepada Bupati untuk mengatasi judi online di kalangan pelajar serta masyarakat serta penambahan anggaran untuk pemberantasan narkoba, pemberantasan paham ekstrim serta segala sesuatu yang berdampak buruk bagi Kabupaten Tebo.
- 2) Menegaskan kepada bupati untuk melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan dan penggunaan gadget agar segala dampak negatif yang diakibatkan mampu diatasi dan dilakukan tindakan preventif yang efektif. Sehingga kasus judi online pada anak usia dini dan penyalahgunaan narkoba akibat interaksi online dapat diatasi.
- 3) Menegaskan kepada Bupati untuk mengatasi judi online pada anak sekolah dan anak usia dini, membantu penambahan dana untuk pemberantasan paham ekstrim, narkoba dan segala tindakan negataif, melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan dan penggunaan gadget agar segala dampak negatif dapat diminimalisir.
- 4) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk Mengevaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Pertama (Smp) Dan Kepala Sekolah Dasar (Sd) Yang Ada Di Kabupaten Tebo.

B. Urusan Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat

- 1) Untuk peningkatan pelayanan kesehatan, DPRD meminta Bupati agar memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama pada puskesmas untuk di anggarkan pengadaan supir ambulance agar memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan menuju rumah sakit rujukan.
- 2) Terkait stunting untuk fokus pada pencegahan stunting melalui intervensi dini, seperti pemantauan tumbuh kembang anak, dan edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita. Memastikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai terutama di daerah terpencil. Sehingga hal ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Tebo.
- 3) Menengaskan kepada bupati untuk menindaklanjuti masalah pungutan liar di area RSUD STS Tebo karena ini merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat jika diperlukan untuk bekerjasama dengan pihak terkait untuk menindak pungutan liar dan memastikan keamanan di rumah sakit. Rumah sakit bebas parkir akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
- 4) Meminta agar pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas tinggi dan fasilitas rumah sakit yang memadai dan nyaman untuk kepuasan pasien sehingga hal ini juga dapat meminimalkan pulang paksa pasien untuk mengurangi resiko komplikasi.
- 5) Menekankan agar Pelayanan Masyarakat lebih ditingkatkan lagi, Pelayanan Masyarakat adalah kunci kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Pelayanan Masyarakat yang paling menonjol adalah pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas.

- 6) Meminta kepada Saudara Bupati Tebo untuk dapat menambah Ruang Inap pada Puskesmas Desa Teluk Singkawang dan Kec. Lainnya.
- 7) Meminta kepada Saudara Bupati Tebo agar dapat memenuhi alat kesehatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Lansia, mengingat jumlah Lansia Kab. Tebo tahun 2024 meningkat 10,49% dari tahun 2023.
- 8) Memonitoring Kerja Dokter jaga pada setiap Puskesmas.
- 9) Memonitoring dan memaksimalkan kinerja Bidan Desa.
- 10) Terhadap pelayanan kesehatan, meminta kepada Bupati untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk dengan indikator kesehatan ibu hamil, menyusui, bayi baru lahir dan balita. karena berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan data yang dimiliki oleh dinkes angka indikator kunci stunting dan gizi buruk masih tinggi sehingga di tahun 2024 Tebo mengalami peningkatan stunting dan gizi buruk.
- 11) Mengasakan, agar persoalan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitas memedai seperti ketersediaan ambulance dan dioperasikan sebagaimana fungsinya.
- 12) Dalam mewujudkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ke semua masyarakat Kabupaten Tebo, kami meminta kepada Bupati untuk mengaktifkan puskesmas keliling dan memaksimalkan dokter turun ke dusun serta guru turun ke seluruh pelosok di kabupaten tebo dan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi digital melalui aplikasi yang user friendly dan fungsionalitas yang lengkap.
- 13) Meminta kepada Saudara Bupati Tebo, untuk dapat mengaktifkan kembali posyandu bagi lansia minimal satu bulan sekali.
- 14) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Melengkapi Peralatan Medis Untuk Posyandu Lansia, Supaya Petugas Kesehatan Dapat Memberikan Pelayanan Yang Maksimal.
- 15) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Mengangkat Driver Ambulance Di Puskesmas Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk).
- 16) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk Memperhatikan Dan Memastikan Ketersediaan Obat-Obatan Di Setiap Puskesmas. Agar Nantinya Ketika Masyarakat Yang Berobat Ke Puskesmas Dapat Ditangani Dan Dilayani Dengan Optimal.
- 17) Mendorong Kepada Saudara Bupati Untuk Memastikan Setiap Puskesmas Memiliki Unit Ambulance Yang Layak Operasi Sehingga Mempermudah Proses Rujuk Pasien. Pihak Puskesmas Juga Harus Menyediakan Driver Ambulance Yang Sudah Digaji.
- 18) Untuk Memaksimalkan Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Ke Semua Masyarakat Kabupaten Tebo, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mendorong Kepada Saudara Bupati Terus Menjalankan Program Dokter Turun Ke Dusun Serta Guru Turun Ke Seluruh Pelosok Di Kabupaten Tebo.
- 19) Menyarankan Kepada Saudara Bupati Untuk Memperbaiki Sistem Pengelolaan Parkir Di Rsud Sts Kabupaten Tebo. Tindakan Memasang Tarif Parkir Sesuka Hati Merupakan Tindakan Pungli Dan Premanisme Yang Harus Dihapuskan.

C. Urusan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

- 1) Terkait dengan kebersihan dan pengolahan sampah di kabupaten Tebo kami meminta kepada bupati agar menindak tegas para pegawai kebersihan yang tidak disiplin serta bantuan perbaikan atau pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dengan mengurangi produk sekali

pakai, memisahkan sampah plastik dan organik dengan mengolah sampah melalui daur ulang, komposting yang jika tepat pengolahannya akan bernilai ekonomis tinggi.

- 2) Meminta kerjasama dengan dinas Perkim bersama PLN untuk penanggulangan mati lampu di dalam daerah kabupaten Tebo agar bisa membentuk tim kerja untuk meningkatkan sistem kerja tenaga teknis di masing-masing kecamatan. Serta menegaskan kepada bupati untuk mengatasi kawasan kumuh tak layak huni dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan drainase untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang nyaman dan layak huni.
- 3) Menekankan agar pengelolaan sampah dapat segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat terutama dilingkungan pasar.
- 4) Menekankan agar setiap tempat yang menghasilkan limbah B3 mempunyai system IPAL yang baik, terutama di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Puskesmas dan Klinik Kesehatan.
- 5) Memberikan saran untuk mengolah sampah industri dan rumah tangga yang bersifat organik dilakukan dengan metode wormcomposting, sehingga hasil sampah memiliki nilai tambah yaitu cacing tanah (*Lumbricus rubellus*) yang dimanfaatkan untuk obat demam typhus, hasil samping dimanfaatkan menjadi kompos yang memiliki nilai gizi tinggi untuk tanaman yang kaya unsur makro dan mikro mineral dan decay (Air sisa limbah) dijadikan pupuk cair untuk perkebunan dan pertanian.
- 6) Menegaskan Bupati untuk Kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan persampahan yang ramah lingkungan dan zerowaste dengan menerapkan ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen K3L. Jangan hanya mengolah sampah dengan cara ditimbun dan di bakar. Sampah plastik diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan, sehingga tebo bersih dapat diwujudkan.
- 7) Kami mengapresiasi capaian kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tebo yang selalu siap dalam menyelesaikan dan memitigasi dan mempreventifikasi bencana alam ditebo, sehingga dampak bencana yang diakibatkan tidak berdampak fatal. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan sebagai pilar utama pengendalian bencana di kabupaten tebo.
- 8) Terhadap Pelayanan Pln Yang Belum Maksimal Karena Sering Terjadi Mati Lampu Di Beberapa Wilayah, Fraksi Golkar Berharap Kerjasama Dinas Perkim Bersama Pihak Pln Agar Segera Menaggulangi Kendala Tersebut. Diharapkan Agar Dinas Perkim Meningkatkan Sistem Kerja Tekhnis Di Masing-Masing Wilayah Kecamatan Melalui Pembentukan Tim Kerja.
- 9) Kemudian Terhadap Pelayanan Damkar, Kami Meminta Agar Dinas Terkait Dapat Meningkatkan Kualitas Kinerja Dalam Hal Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Sehingga Tidak Menimbulkan Opini Negative Ditengah Masyarakat.
- 10) Damkar Juga Diharapkan Dapat Meningkatkan Pelayanan Dan Tanggap Terhadap Kasus Kebakaran Dan Bencana Lainnya Dengan Didukung Sarana Dan Prasarana Yang Cukup Dan Tepat Guna. Tentunya, Untuk Memaksimalkan Kinerja Petugas Damkar, Terutama Di Wilayah Yang Jauh Dari Jangkauan Maka Diharapkan Pemerintah Daerah Dapat Merealisasikan Pengadaan Kendaraan Pemadam Dan Tenaga Pemadam.
- 11) Kami Mengapresiasi Capaian Kinerja Dan Kegiatan Yang Dilakukan Ole Bpbd Kabupaten Tebo Yang Selalu Siap Dalam Menyelesaikan Dan Memitigasi Dan Mempreventifikasi Bencana Alam Ditebo, Sehingga Dampak Bencana Yang Diakibatkan Tidak Berdampak Fatal. Hal Ini Perlu Untuk Terus Ditingkatkan Sebagai Pilar Utama Pengendalian Bencana Di Kabupaten Tebo.
- 12) Dalam Hal Penanganan Dan Pengelolaan Sampah, Fraksi Golkar Menyatakan Agar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Industri Melalui Metode Insinerasi (Membakar Sampai Dan Menghasilkan Panas, Menggerakkan

Turbin Dan Generator) Serta Dapat Menghasilkan Produk Dari Sampah Yang Bernilai Ekonomis Tinggi. Juga Menyarankan Kepada Dinas Lh Dan Perhubungan Agar Meminta Bantuan Kementerian Terkait Pengadaan Kenadaraan Pengangkut Sampah.

- 13) Mendorong Saudara Bupati Menyediakan Dana Taktis Bagi Bpbd Untuk Memaksimalkan Penanganan Bencana. Berdasarkan Informasi Dari Bmkg Bahwa Curah Hujan Di Provinsi Jambi Berada Pada Posisi Menengah Dimana Terdapat 75% Wilayah Jambi Berpotensi Mengalami Banjir. Hal Ini Perlu Antisipasi Pra Bencana Kepada Masyarakat Kabupaten Tebo.
- 14) Mendorong Saudara Bupati Untuk Meningkatkan Kinerja Damkar Terutama Terhadap Wilayah Kecamatan Yang Jauh Dari Jangkauan Dengan Merealisasikan Pengadaan Kendaraan Pemadam Dan Tenaga Pemadam.

D. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

DPRD mendukung upaya digitalisasi Dukcapil untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan sehingga membuatnya lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga meminimalisir pungli oleh oknum tak bertanggung jawab.

E. Perencanaan Pembangunan, Infrastruktur Dan Pengawasan

- 1) Kami berpendapat masih banyak sisi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan yang masih perlu diperbaiki dan dikritisi sebagai feedback guna menapak kedepan yang lebih baik lagi. Untuk itu kami meminta kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan, dan terus mencermati rencana aksi dan tindaklanjut OPD.
- 2) Terkait dengan infrastruktur, DPRD meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menangani permasalahan jalan rusak, banjir dan menyusun rencana strategis yang lebih komprehensif.
- 3) Memberikan apresiasi kepada Bupati dan wakil bupati tebo karena begitu dilantik langsung gerak cepat turun kelapangan mengatasi permasalahan yang ada seperti banjir, jembatan padang lamo yang rusak, yang saat itu dijadikan sebagai jalan alternatif dari sumbar ke jambi karena jalan lintas sumatera putus diperbatasan jambi sumbar.
- 4) Meminta agar jalan yang berlobang seperti perbatasan unit 1 dan unit 2, jalan 14 sampai jalan 20 unit 3 rimbo bujang serta jalan-jalan lain yang rusak parah untuk dibenahi minimal ditambal yang berlobang meskipun jalan tersebut adalah jalan provinsi, karena kalau nunggu anggaran dari provinsi terlalu lama dan sudah terlanjur banyak korban.
- 5) Menekankan pentingnya pembangunan dan/atau perbaikan akses jalan yang layak ditingkat desa, desa ke kecamatan maupun desa ke kabupaten. Kemudian Fraksi PAN juga mengharapkan percepatan pembangunan infrastruktur lainnya secara merata di Kab. Tebo.
- 6) Meminta agar program LPJU tetap berjalan pada setiap Desa.
- 7) Menekankan agar pemeliharaan LPJU dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
- 8) Meminta agar pembukaan akses jalan pertanian tetap berlangsung, mengingat masih banyak aktifitas masyarakat yang terhambat dikarenakan susah akses jalan.
- 9) Menekankan agar dalam menilai dan menerima hasil pekerjaan Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh rekanan dapat dilakukan secara objektif, dengan demikian stigma negative terhadap pemerintah akan berkurang.

- 10) Meminta Kepada Bupati Dan Seluruh Opd Agar Dapat Transparan Dalam Penyusunan Program Atau Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tebo Di Tahun-Tahun Yang Akan Datang.
- 11) Selanjutnya Meminta Kepada Bupati Dan Bappeda Agar Dapat Memaksimalkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tebo Dengan Mengumpulkan Informasi Yang Akurat Dari Berbagai Sumber Dan Pemangku Kebijakan.
- 12) Mengingatkan Agar Bappeda Dapat Menginventarisir Pembangunan Infrastruktur Yang Belum Terlaksana Dalam Waktu Yang Lama.
- 13) Meminta Kepada Bappeda Agar Sama-Sama Berkoordinasi Dalam Mendorong Program Pembangunan Jalan Padang Lamo Yang Merupakan Program Prioritas Gubernur Jambi Dalam Rpjmd Provinsi Jambi.
- 14) Terhadap Kinerja Dinas Pupr Kabupaten Tebo, Fraksi Golkar Mengapresiasi Capaian Tahun 2024. Kedepan, Dinas Pupr Ditegaskan Untuk Lebih Objektif Dalam Menilai Dan Menerima Hasil Pekerjaan Fisik Rekanan Dalam Melaksanakan Pembangunan Agar Tidak Ada Opini Negatif Masyarakat Terhadap Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pembangunan.
- 15) Selanjutnya, Meminta Kepada Bupati Tebo Agar Melakukan Pemetaan Wilayah Dalam Kabupaten Tebo Yang Belum Tersedia **Baseline** Kawasan Kumuh Daerah, Sebagai Syarat Pencairan Dana Dak Dari Pemerintah Pusat Untuk Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Tebo.
- 16) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo Untuk Melaksanakan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Setiap Kecamatan.
- 17) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk Melanjutkan Kembali Kegiatan Pengaspalan Dan Atau Rigid Beton Jalan Di Sp 1 Dan Sp 7 Kecamatan Serai Serumpun.
- 18) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk Melakukan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Sungai Pandan Kecamatan Rimbo Ulu. Mulai Dari Jalan Dempo Hingga Sampai Ke Jalan Mawar, Mengingat Jalan Tersebut Menjadi Akses Vital Bagi Petani Untuk Membawa Hasil Panennya.
- 19) Terkait Infrastruktur Jalan Pall 12 Kecamatan Tebo Tengah, Blok E Kecamatan Rimbo Ilir, Sampai Ke Jalan 21 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Maka Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo Agar Melakukan Pengaspalan Dengan Sesegera Mungkin.
- 20) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Membangun Pos Damkar Di Kecamatan Serai Serumpun, Untuk Mempercepat Pelayanan Dan Penanganan Bila Terjadinya Musibah Kebakaran Atau Non Kebakaran.
- 21) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Agar Melakukan Pemasangan Pagar Listrik Di Wilayah Kecamatan Serai Serumpun, Untuk Mencegah Serangan Gajah Masuk Ke Pemukiman Dan Kebun Masyarakat.
- 22) Mendorong Saudara Bupati Untuk Membangun Sarana Dan Prasarana Jalan Lebih Merata.
- 23) Mendorong Saudara Bupati Untuk Menganggarkan Pengadaan Lpju Dan Pengalokasiannya Secara Merata Dalam Rangka Upaya Pencegahan Atas Tindakan Kejahatan Dan Kecelakaan.

F. Urusan UMKM, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Menegaskan kepada bupati melalui dinas sosial untuk pengadaan anggaran penderita ODGJ. Terkait penerimaan bantuan PKH maupun BPNT agar dilakukan pendataan ulang setiap tahun dan dipastikan harus tepat sasaran karena program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dalam daerah.
- 2) Tentang lambannya operator DTKS di setiap desa, pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di desa, seperti jaringan internet dan perangkat komputer untuk

- memfasilitasi penggunaan sistem DTKS dan memastikan data yang dikumpulkan akurat dan tepat waktu.
- 3) Kami mengapresiasi turunnya tingkat kemiskinan walau belum sesuai target 5.97%.
 - 4) Pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melayani kepentingan masyarakat serta untuk akselerasi mewujudkan Tebo Maju.
 - 5) Fraksi Partai Demokrat sangat setuju dengan slogan tebo maju, untuk itu sesuai dengan namanya dibawah kepemimpinan agus nazar tebo harus maju
 - 6) Fraksi Partai Demokrat meminta agar bupati dan wakil bupati tidak segan-segan mengganti kepala-kepala dinas yang tidak mendukung program bupati dan wakil bupati, agar cita-cita tebo maju benar-benar terwujud
 - 7) Terakhir Fraksi Partai Demokrat meminta agar janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye dapat direalisasikan mulai dari sekarang, sehingga diakhir masa jabatan semua janji politik dapat terealisasi.
 - 8) Kepada Bakeuda untuk bekerja profesional, inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di kabupaten tebo guna mendapatkan PAD, salah satunya peningkatan kesejahteraan seluruh UMKM se Kabupaten Tebo disetiap dusunnya. Sehingga segala pembiayaan penting yang terdampak efisiensi anggaran dapat ditanggulangi sehingga dapat mencapai semua target pembiayaan daerah khususnya pengadaan P3K yang menjadi polemik saat ini.
 - 9) Kami mengapresiasi segala bentuk kerja keras bupati dalam membangun kabupaten tebo dengan berbagai capaian yang telah dicapai dan berbagai penghargaan yang telah diraih. Kami berharap apa yang didapatkan dapat ditingkatkan dan yang belum dapat diusahakan pencapaiannya. Pandangan ini bukan hanya sebuah narasi, jadi, apa yang disampaikan segera dijadikan bahan pertimbangan untuk dinyatakan dalam program nyata. Mari kita berjuang bersama untuk Tebo MAJU, SDM Unggul dan Profesional, Lingkungan yang sehat untuk hidup, UMKM yang sejahtera dan merata diseluruh kabupaten Tebo, tidak hanya di seluruh kecamatan rimbo saja tapi seluruh desa yang ada di kabupaten tebo. Karena pilar ekonomi kerakyatan ditentukan oleh kesejahteraan UMKM nya.
 - 10) Meminta Kepada Bupati Untuk Menyukseskan Program Desa Digital, Ayunda Dan IKD Serta Memaksimalkan Penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik) Dalam Seluruh Dokumen Kependudukan Guna Memaksimalkan Pelayanan Kependudukan Se Kabupaten Tebo Dan Meminimalkan Kejadian Pungli Oleh Oknum Dan Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab.
 - 11) Meminta Kepada Bupati Melalui Dpmpstsp Dan Dppkukm Untuk Memberdayakan Seluruh Umkm Berbadan Hukum Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Tebo. Pemberian Modal Usaha, Hibah Alat Dan Prasarana Serta Kemudahan Pengurusan Izin Usaha Guna Meningkatkan Pad Melalui Sektor Umkm Dan Ekonomi Kerakyatan. Jika Umkm Berkembang Maka Ekonomi Daerah Tumbuh Dan Menumbuhkan Iklim Investasi Yang Baik Sehingga Berdampak Nyata Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat, Mengurangi Angka Pengangguran, Menurunkan Angka Kemiskinan, Meningkatkan Padat Karya Daerah, Pengembangan Potensi Daerah, Dan Peningkatan Sdm Berkualitas Dan Menekan Angka Inflasi Dan Deflasi Daerah.
 - 12) Mendukung Penuh Program Desa Digital Dan Berharap Layanan Administrasi Bisa Selesai Di Tingkat Desa.

G. Urusan Ketahanan Pangan

- 1) Menekankan agar produktifitas tanaman pangan di Kab Tebo lebih ditingkatkan lagi untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan di Kab. Tebo. Serta dapat memonitoring penyebaran bibit atau benih berjalan dengan efektif dan tepat sasaran ;
- 2) Sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan peningkatan ekonomi rakyat sektor pertanian, di harapkan saudara Bupati Tebo dapat menambah kuota alat pertanian terutama diwilayah penghasil beras di Kab Tebo seperti Kec. VII Koto Ilir, Kec.. Sumay dan kecamatan lainnya ;
- 3) Meminta agar petani tanaman pangan maupun hortikultura dapat dilakukan pembinaan yang baik sehingga hasil produksinya memiliki nilai ekonomis tinggi ;
- 4) Pendistribusian pupuk subsidi agar dimonitor kembali dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi permasalahan pupuk subsidi yang diperjual belikan secara komersil oleh oknum – oknum tertentu ;
- 5) Meminta agar dibangun irigasi untuk area persawahan yang belum memiliki irigasi, supaya hasil pertanian masyarakat lebih maksimal ;
- 6) Meminta agar dilakukan inventarisasi terhadap kelompok tani di Kab. Tebo yang belum mempunyai legalitas (P3AI), hal ini dilakukan agar mempermudah kelompok tani tersebut mendapat bantuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi ;
- 7) Meminta pemerintah Kab. Tebo dapat mendorong Pemerintah Desa melalui BumDes untuk membuat kelompok peternak ayam petelor, yang mana dengan adanya kelompok peternak ayam petelor tersebut maka kebutuhan protein hewani Kab. Tebo dapat tercukupi.
- 8) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Melakukan Pengawasan Dan Peningkatan Kemampuan Terhadap Pengurus Bumdes. Karena Bumdes Memiliki Peran Penting Sebagai Pelaksana Pengelolaan Program Ketahanan Pangan.
- 9) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk Meningkatkan Capaian Program (Silela) Sistem Nasi Lengkap Lansia. Karena Saat Ini, Dari 60 Orang Lansia Yang Sudah Terdata, Baru 6 Orang Lansia Yang Terakomodir. Berdasarkan Angka Tersebut Maka Perlu Adanya Perhatian Serius Dari Pemerintah Daerah Untuk Tercapainya Hasil Yang Maksimal.

H. Urusan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

- 1) Meminta untuk segala bentuk bantuan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan agar dapat memaksimalkan realisasi anggaran dan juga tepat sasaran serta dilaksanakan secara merata disetiap kecamatan. Pengadaan peralatan, vaksin atau obat-obatan serta bantuan bibit sangat diperlukan.
- 2) Menegaskan bupati untuk mengawasi dan mengingatkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk teliti, selektif dan profesional dalam pemberian PSR dan bantuan Ternak kepada masyarakat agar tepat sasaran dan kepada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk diberikan efek jera yang tegas dan ketat.

I. Urusan Ekonomi

- 1) UMKM memiliki peran penting dalam menguatkan ekonomi daerah dan mendukung perkembangan koperasi. Perannya dalam menguatkan ekonomi skala mikro, kecil dan menengah akan menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi daerah semakin baik. Oleh sebab itu, kami menegaskan kepada Bupati untuk melakukan upaya dalam

memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro yang ada di masyarakat terutama dalam kemudahan pengelolaan izin.

- 2) Terkait realisasi anggaran tahun 2024 yang mana pada sektor Pendapatan daerah telah ditargetkan sebesar Rp.1.301.093.783.247,- (*satu triliun tiga ratus satu milyar Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga dua ratus empat puluh tujuh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp1.254.634.663.544.32,- (*satu triliun dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat koma tiga puluh dua rupiah*) atau sebesar 96,43%. Terkait hal ini fraksi PDIP berpendapat pertanggungjawaban pendapatan daerah bukan sebatas menilai dan menghitung penggunaan anggaran pembangunan saja akan tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah seperti meningkatkan kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan uang itu sendiri. Dengan demikian setiap kegiatan pembangunan akan semakin memenuhi sasaran, tepat waktu dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil kerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Tebo secara merata.
- 3) Terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo Fraksi PDIP meminta agar pemerintah dapat menginventarisir pembangunan yang belum terlaksana dengan mengumpulkan informasi dan data yang akurat dari berbagai kepentingan dan kebijakan. Kami meminta agar pemerintah selalu bertindak transparan terhadap setiap pelaporan kegiatan, dengan fokus pada target, pencapaian dan output dari seluruh OPD terkhusus dinas PUPR agar tidak terlalu banyak memanipulasi laporan kegiatan.
- 4) Di bidang perekonomian, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan petani sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
- 5) DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi penyerapan anggaran untuk program-program yang di prioritaskan kepentingan masyarakat.
- 6) Kami juga mengapresiasi atas capaian **Gini Ratio Kabupaten Tebo Tahun 2024** terealisasi sebesar 0.257 poin dari target 0,280 poin dengan persentase capaian 108.95%. dengan angka ini menjadikan kabupaten tebo menjadi kabupaten dengan tingkat ketimpangan terendah di provinsi jambi.
- 7) Kami juga mengapresiasi meningkatnya **PDRB** per kapita tahun 2024 sebesar 67,39 juta rupiah, melampaui target yang ditetapkan sebesar 52,75 juta rupiah.
- 8) Dengan adanya efisiensi anggaran, Fraksi PAN menekankan agar Pemerintah Kab. Tebo dapat mendorong BUMD maupun PERUMDA yang ada di kab. Tebo untuk lebih berkontribusi terhadap pendapatan daerah demi menunjang pembangunan Tebo secara berkelanjutan sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat memenuhi target.
- 9) Fraksi PAN meminta agar Potensi Pariwisata baik itu wisata budaya maupun wisata alam di Kab. Tebo dapat di optimalkan sehingga dapat meningkatkan PAD Kab. Tebo.
- 10) Menegaskan Bupati untuk bekerjasama dengan DPRD Tebo disetiap bantuan daerah yang diberikan ke masyarakat melalui setiap komisi yang membidangi

agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel dan paripurna dalam pelayanan kepada masyarakat.

- 11) Menegaskan kepada bupati untuk mempelajari ulang tentang permendagri nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan aset desa, permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa agar segala permasalahan desa dapat ditangani dengan baik serta segala kerugian akibat buruknya pengelolaan aset desa, ketidakprofesional dan ketidakmampuan LKD/LAD dan buruknya manajemen keuangan desa dapat diatasi. Selain itu dalam menerapkan permendes nomor 2 tahun 2024 dan Kepmendes Nomor 3 tahun 2025 tentang ketahanan pangan yang mengamankan 20% ADD untuk ketahanan pangan sehingga segala perangkat desa dan kepala desa wajib mengimplementasikan ini. Tebo membutuhkan SDM berkualitas dan Unggul, jika segala perangkat desa dan kepala desa tidak mampu memenuhi ini segera ditindak tegas. Terkait Bumdes-bumdes yang tidak produktif untuk segera mengembalikan kerugian daerah ke kas Daerah.
- 12) Terhadap Pelayanan Perumda Tirta Muaro Kabupaten Tebo, Kami Mengapresiasi Progres Kinerja Perumda Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun 2024. Terakut Tunggakan Pelanggan Disejumlah Wilayah, Kami Meminta Agar Pihak Perumda Tirta Muaro Segera Melakukan Pengecekan Meteran Pelanggan Agar Dapat Segera Dimaksimalkan.
- 13) Menyerankan Kepada Perumda Tirta Muaro Kabupaten Tebo, Selain Rencana Peningkatan Jumlah Pelanggan Yang Saat Ini Sebanyak 18.751 Ditergetkan Menjadi 20.000 Pelanggan Di Tahun 2025, Kami Meminta Agar Perumda Tirta Muaro Kabupaten Tebo Juga Fokus Melakukan Ekspansi Produksi Air Minum Kemasan Agar Kedepan Dapat Berkontribusi Pada Peningkatan PAD Kabupaten Tebo.

J. Urusan Ketertiban dan Keamanan

DPRD mengakui peran penting Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Maka dalam hal ini kami meminta agar dapat menertibkan hewan ternak yang dalam kenyataannya menjadi liar di lingkungan kota Kabupaten Tebo serta dapat menertibkan anak sekolah berkelian di jam sekolah.

K. Urusan SDM dan Komunikasi Informasi

- 1) Meminta agar pemerintah kabupaten Tebo untuk meningkatkan sumber daya termasuk anggaran, personel, pelatihan dan peningkatan peralatan untuk memaksimalkan penanganan bencana dan kebakaran. Pengadaan kendaraan damkar di wilayah kecamatan yang jauh dari jangkauan sangat dibutuhkan serta peningkatan pelatihan dan pendidikan untuk personel damkar.
- 2) Kami mengapresiasi meningkatnya **Indeks Pembangunan Manusia** Kabupaten Tebo dari target 69,95 melampaui target sengan realisasi di angka 72,67.
- 3) DPRD meminta agar layanan publik seperti rumah sakit dan Dinas-dinas yang berhubungan dengan layanan publik menjadi prioritas utama dibenahi agar masyarakat tidak kecewa dengan layanan publik tersebut.
- 4) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo, Untuk Mengangkat Tenaga Honorer : Kesehatan, Guru, Dan Teknis, Untuk Di Jadikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- 5) Menegaskan kepada Bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan P3K secara menyeluruh, efektif, adil, terbuka dan transparan dengan

- menjalankan rekomendasi yang pernah disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Tebo.
- 6) Menegaskan bupati untuk menidak tegas semua tenaga kebersihan yang tidak disiplin. Kabupaten Tebo Butuh Orang yang disiplin, cerdas dan mampu berkinerja dan produktif. Kebersihan adalah cerminan daerah. Jika Petugas kebersihan tidak profesional dan disiplin hanya membuat malu daerah.
 - 7) Mengapresiasi Capaian Daerah Dalam Indeks Pembangunan Manusia, Namun Pembangunan Tersebut Belum Sejalan Dengan Kualitas Sdm Dilapangan. Sehingga Kami Meminta Kepada Bupati Tebo Untuk Melakukan Evaluasi Mendalam Secara Menyeluruh, Teliti Dalam Menilai Dan Mencari Data Yang Akurat Serta Relevan. Sehingga Ipm Tidak Hanya Bagus Melalui Data, Namun Berdampak Nyata Pada Kualitas Sdm Pemerintah Kabupaten Tebo.
 - 8) Meminta Kepada Bupati Dan Kominfo Segera Menginventarisir Daerahdaerah Yang Tergolong Bank Sapot Demi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Terhadap Jaringan Telepon Dan Internet.
 - 9) Kominfo Juga Diminta Mengewasi Kabel-Kabel Vendor Penyedia Jaringan Internet Illegal Yang Terpantau Banyak Terdapat Di Wilayah Kabupaten Tebo.
 - 10) Kemudian Rencana Pembentukan Sekretariat Anti Siber Kabupaten Tebo Yang Rencananya Akan Di Louncing Di Tahun 2025 Ini, Kami Berharap Segera Terwujud Sehingga Bisa Bejalan Se-Segera Mungkin.
 - 11) Meminta Kepada Saudara Bupati Tebo Melalui Dinas Terkait, Untuk Menginvestigasi Kerusakan Jalanan Di Perbatasan Babeko, Tepatnya Di Blok B, Blok C Dan Blok D Kecamatan Rimbo Ilir. Serta Memberikan Solusi Yag Kongkrit Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO**



KHALIS MUSTIKO

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan merupakan capaian kinerja atas Tugas Pembantuan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi sehingga pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum serta ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional, provinsi ataupun kebijakan pemerintah kabupaten dengan pendekatan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran-



anggaran dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan kepada daerah untuk penyelenggaraan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau disebut juga dengan tugas pembantuan, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Sedangkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan”.

Laporan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tebo Tahun 2025 ini meliputi tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan pada Pemerintah Kabupaten Tebo

Sebagaimana DIPA Tahun Anggaran 2025 yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo, ada dua Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan yakni :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Tebo di terima oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Alokasi total anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan sebesar Rp.62.953.624.600,- realisasi sebesar Rp.62.135.133.689,- atau 98,70 persen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo pada tahun 2025 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat/Provinsi dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp58.732.741.600,-** dengan realisasi **Rp57.976.035.689,-** atau mencapai 98,71 persen, Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2025

No.	Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Pelaksana	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan					58,732,741,600	57,976,035,689	98.71	98.71	
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab Tebo	Dinas Pendidikan					
		Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025	Kegiatan Pengelolaan BOP PAUD (281 Satuan Pendidikan)			4,569,310,000	4,557,654,000	100%	100%	
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Mengelola Dana BOP PAUD (281 Satuan Pendidikan)							
			Rincian Kegiatan: Jumlah Sekolah Mengelola Dana BOP PAUD (281 Satuan Pendidikan)							
		Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025	Kegiatan Pengelolaan BOP KESETARAAN (10 Satuan Pendidikan)			2,451,500,000	2,450,312,800	100%	100%	
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Mengelola Dana BOP KESETARAAN (10 Satuan Pendidikan)					100%	100%	
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Mengelola Dana BOP KESETARAAN (10 Satuan Pendidikan)					100%	100%	
		Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025	Kegiatan Pengelolaan BOS SD DAN SMP (326 Satuan Pendidikan)			50,545,740,000	49,801,921,289	98.53%	98.53%	
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Mengelola Dana BOS SD DAN SMP (326 Satuan Pendidikan)							
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Mengelola Dana BOS SD DAN SMP (326 Satuan Pendidikan)							
		Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 25 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2025	Kegiatan DAK FISIK SD (4 Paket)			263,029,000	263,029,000	100%	100%	

			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Penerima DAK FISIK SD (3 Sekolah)							
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah DAK FISIK SD							
		Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 25 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2025	Kegiatan DAK FISIK SMP (4 Paket)			253,680,000	253,680,000	100%	100%	
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Penerima DAK FISIK SMP (3 Sekolah)							
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah DAK FISIK SMP (3 Sekolah)							
		Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 25 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2025	Kegiatan DAK FISIK PAUD (13 Satuan Pendidikan)			649,482,600	649,438,600	100%	100%	
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah Penerima DAK FISIK PAUD (13 Satuan Pendidikan)							
			Keluaran (output): Jumlah Sekolah DAK FISIK PAUD (13 Satuan Pendidikan)							
			Total			58,732,741,600	57,976,035,689	98.71	98.71	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo 2025



2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo pada Tahun 2025 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat/Provinsi dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp4.220.883.000,-** dengan realisasi **Rp4.159.098.000,-** atau tercapai **98,54** persen. Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2025

No.	Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah Pelaksana	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura					Rp4,220,883,000.00	Rp4,159,098,000.00	98.54	98.54	
	Kementerian Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		A. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		DTPH					
			1) Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah 800 Ha	Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Sumay, Kecamatan Serai Serumpun, dan Kecamatan Tebo Tengah.	DTPH			100%	100%	APBN
			2) Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah 829 Ha	Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tengah Ilir, dan Kecamatan Tebo Ilir.	DTPH			100%	100%	APBN

			3) Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah 320 Ha	Kecamatan Tebo Tengah	DTPH			100%	100%	APBN
			4) Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah OPLAH I Tahun 2024 (185 Ha)	BP Puding Sepakat Kecamatan Tebo Ulu dan BP Agro Muda Kecamatan Tebo Tengah	DTPH			100%	100%	APBN
			5) Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah OPLAH II Tahun 2025 (958 Ha)	BP Tunas Tani dan BP Pangan Bersinar Kecamatan Tebo Ulu, BP Sumay Ilir dan BP Sumay Ulu Kecamatan Sumay, BP Tengil Jaya Kecamatan Tengah Ilir, dan BP Daulat Pangan Kecamatan Muara Tabir.	DTPH			100%	100%	APBN
			6) Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah OPLAH III Tahun 2025 (111 Ha)	BP Puding Sepakat Kecamatan Tebo Ulu dan BP Agro Muda Kecamatan Tebo Tengah	DTPH			100%	100%	APBN

			7) Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering 2.335 Ha	Kecamatan VII Koto, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Rimbo Bujang, dan Kecamatan Rimbo Ulu.	DTPH			100%	100%	APBN
			8) Kegiatan Bantuan Kawasan Jagung Hibrida 769 Ha	12 Kecamatan	DTPH			100%	100%	APBN
			9) Kegiatan Bantuan Kawasan Ubi Jalar 0,3 Ha		DTPH			100%	100%	APBN
			10) Kegiatan Bantuan Benih Kegiatan Penangkaran Padi Sawah (10 Ha)	Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Sumay, Kecamatan Serai Serumpun, dan Kecamatan Tebo Tengah.	DTPH			100%	100%	APBN
			11) Kegiatan Bantuan Sarana Pasca Panen 1 Unit Combine	Kecamatan VII Koto Ilir	DTPH			100%	100%	APBN

			Harvester							
			12) Kegiatan Alokasi Bantuan 11 Unit Power Thresher	Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Sumay dan Kecamatan VII Koto	DTPH			100%	100%	APBN
			B. Kegiatan Kontruksi Optimasi Lahan (729 Ha)	Kec. VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir	DTPH	Rp3,335,400,000.00	Rp3,335,400,000.00	100%	100%	APBN
			C. Kegiatan Pasca Olah Lahan 2024 (254,87 Ha)	Kec. Tebo Ulu, Tebo Tengah, Tengah ilir	DTPH	Rp229,383,000.00	Rp174,537,000.00	76,09%	76,09%	Ada Pengembalian dana dari Petani karena tidak mampu melakukan olah lahan
			D. Kegiatan Olah Lahan 2025 (729 Ha)	Kec. VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir	DTPH	Rp656,100,000.00	Rp649,161,000.00	98.942%	98.942%	Ada Pengembalian dana dari Petani karena tidak mampu melakukan olah lahan
			E. Bantuan Pestisida Keg. Opla 871 Kg	Kec. VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir	DTPH			100%	100%	

			F. Bantuan Dolomit Keg. Olah Lahan 182.250 Kg	Kec. VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Tebo Ilir, Muara Tabir	DTPH			100%	100%	
			G. ALSINTAN							
			1. Pompa Air 3" (27 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo Ulu, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Sumay, Tengah ilir, Serai Serumpun, VII Koto	DTPH			100%	100%	
			2. Pompa Air 6" (2 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo Ulu	DTPH			100%	100%	
			3. Traktor Roda 4 (12 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo Ulu, Sumay, Tengah Ilir, VII Koto, Muara Tabir	DTPH			100%	100%	
			4. Traktor Roda 2 Singkal (10 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo Ulu, Sumay, VII Koto Ilir, Muara Tabir	DTPH			100%	100%	
			5. Traktor Roda 2 Rotary (14 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo Ulu, Sumay, Tengah ilir, Serai Serumpun, VII Koto	DTPH			100%	100%	
			6. Traktor Roda Crawler (9 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo Ulu, Sumay, Tengah Ilir, Muara Tabir	DTPH			100%	100%	

			7. Drone Pertanian (2 Unit)	Kec. Tebo Tengah, Tebo ulu	DTPH			100%	100%	
			8. Hand Sprayer (2 unit)	Kec. Tebo Tengah, Tengah Ilir	DTPH			100%	100%	
			9. Rice Transplanter (1 Unit)	Kec. Tebo ulu	DTPH			100%	100%	
			Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditi Pertanian		DTPH					
			Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah Reguler 200 Ha	Kecamatan Tebo Tengah dan Tebo Ilir	DTPH			100%	100%	APBD I
			Total			4,220,883,000.00	4,159,098,000.00	98.54	98.54	

Sumber : Dinas Tanam Pangan dan Holtikultura Tahun 2025

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, terdapat beberapa permasalahan/ kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Waktu Pelaksanaan

Keterlambatan DIPA Final dari Kementerian yang baru disahkan sehingga baru bisa melaksanakan lelang terjadi keterlambatan pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2025.

b. Konsultasi secara daring

Konsultasi maupun Koordinasi dalam melaksanakan dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan karna dibutuhkan informasi yang detail

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis dan hasil review dengan Kementerian Pertanian RI.
- b. Melakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan kegiatan, dan apabila dirasa perlu memerintahkan rekanan, menambah pekerja agar pelaksanaan kegiatan bisa tepat waktu.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara aktif dengan kementerian terkait.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Tebo Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul, salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Tebo yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Tebo membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan



kritiknya, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Kabupaten Tebo pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 ini, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Sekian terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI TEBO,



AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M.